

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
LAKIP/LKjP
TAHUN ANGGARAN 2024



Pemerintah Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025





PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
INSPEKTORAT DAERAH

JL. H. M. Arsyad B No. 1 Telp. (0410) 22295; Email: ipdapangkep2022@gmail.com Pangkajene-90611

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

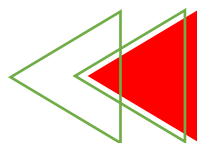
Pangkajene, 21 Maret 2025

Inspektur Daerah,
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Drs. Bachtiar, M.Si., CGCAE, FRMP
Pembina Utama Muda, (IVc)
NIP. 19760930 199511 1 001



Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024
Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji Syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024. LKjIP merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama 1 (satu) tahun anggaran. Proses kinerja Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP.

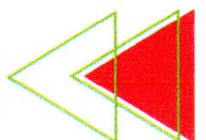
Adapun tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk memberikan gambaran penerapan RPJMD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta keberhasilan capaian saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKjIP ini kami susun, semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Pangkajene, 14 Maret 2025

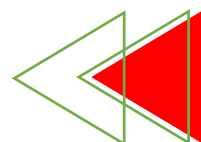
Bupati Pangkajene dan Kepulauan

Dr. H. Muhammad Yusran Lalogau, S.Pi, M.Si



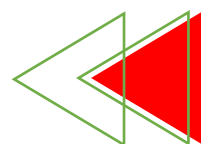
DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	v
BAB I. PERENCANAAN KINERJA	1
A. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....	1
B. Strategi dan Arah Kebijakan.....	4
C. Kebijakan Umum dan Program Prioritas Daerah.....	6
D. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	10
E. Perjanjian Kinerja	11
BAB II. CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH	13
A. Pengukuran Kinerja.....	13
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	15
C. Analisis Capaian Kinerja.....	19
Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Lingkungan dan Sosial Masyarakat	26
Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah	34
Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dasar dan Pelayanan Publik	38
Sasaran Strategis 4 : Terciptanya Inovasi Layanan Publik dan Penggunaan Sistem Informasi Daerah	41
Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	44
Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat	47
Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah	64
Sasaran Strategis 8 : Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan	87
Sasaran Strategis 9 : Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Jangkauan Pelayanan Masyarakat	102
Sasaran Strategis 10 : Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	132
Sasaran Strategis 11 : Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan	135
Sasaran Strategis 12 : Kepatuhan Terhadap RT/RW	144



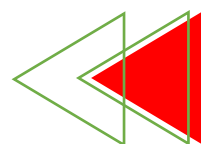
DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Penjelasan Visi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2021-2026	2
1.2 Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 – 2026	4
1.3 Hubungan Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 – 2026	5
1.4 Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024	8
1.5 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	10
1.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	12
2.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja Pembangunan	14
2.2 Capaian Kinerja Tahun 2024	16
2.3 Capaian Tujuan 1: Meningkatkan Keswadayaan dan Kemandirian Masyarakat Dalam Pembangunan	20
2.4 Jumlah Desa yang berstatus Menurut Kriteria Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024	22
2.5 Capaian Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Lingkungan dan Sosial Masyarakat	26
2.6 Capaian Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah	34
2.7 Penilaian Komponen SAKIP Tahun 2024	35
2.8 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pada 5 (lima) Unit Pelayanan Publik	39
2.9 Pencapaian Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dasar dan Pelayanan Publik Lainnya	39
2.10 Pencapaian Sasaran Strategis: Terciptanya Inovasi Layanan Publik dan Penggunaan Sistem Informasi Daerah	41
2.11 Capaian Sasaran Strategis 5: Meningkatnya penyerapan tenaga kerja.	44
2.12 Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan , 2020 – 2024	45
2.13 Capaian Sasaran Strategis 6: Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat.	47
2.14 Hasil Perhitungan Indeks Infrastruktur Untuk Setiap Aspek, Tahun 2024	66
2.15 Indikator Kinerja Sasaran Strategis 7 pada Perangkat Daerah Terkait	67
2.16 Analisa Capaian Indikator <i>“Persentase Panjang Jalan dengan Kondisi Mantap”</i>	68
2.17 Perbandingan Capaian Berdasarkan Jenis Pekerjaan Jalan Antara Tahun 2023 dan Tahun 2024	69
2.18 Analisa Capaian Indikator <i>“Persentase Saluran Irigasi dan Drainase Dalam Kondisi Baik”</i>	69
2.19 Analisa Capaian Indikator <i>“Persentase Sarana Dasar Permukiman”</i>	71
2.20 Data Rincian Capaian indikator Persentase Perumahan yang Menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	73
2.21 Analisa Capaian Indikator <i>“Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Dalam Kondisi Baik”</i>	75
2.22 Analisa Capaian Indikator Persentase Fasilitas Pendidikan Dalam Kondisi Baik	76
2.23 Data kondisi ruang dalam kondisi baik yang ada di sekolah pada Tahun 2024	77
2.24 Analisa Capaian Indikator Persentase Fasilitas Kesehatan Dalam Kondisi Baik	78



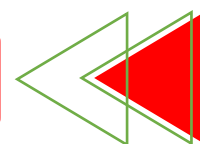


2.25	Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Pembentuk IPM Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 s/d 2024	84
2.26	Pencapaian Sasaran Strategis 8 Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan	88
2.27	Capaian Kinerja Sasaran Kualitas Layanan Pendidikan Tahun 2024	91
2.28	Program dan Anggaran Pada Sasaran 8 Tahun 2024 (Indeks Pendidikan)	100
2.29	Tingkat Efisiensi Pada Sarana Strategis Indeks Pendidikan	100
2.30	Capaian sasaran strategis 9: Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan	102
2.31	Capaian Kinerja Indeks Kesehatan Tahun 2024	103
2.32	Capaian Kinerja Sasaran “Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat” Tahun 2024	105
2.33	Jumlah Kematian Ibu Per Puskesmas Wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024	109
2.34	Jumlah Kematian Bayi Per Puskesmas Wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024	111
2.35	Jumlah Kematian Bayi Per Puskesmas Wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024	114
2.36	Prevalensi stunting Per Puskesmas Wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024	115
2.37	Sasaran Meningkatnya Status Kesehatan	120
2.38	Capaian Kinerja Sasaran “Meningkatnya Kepuasan Bidang Kesehatan” Tahun 2024	123
2.39	Persepsi Penilaian IKM MUTU PELAYANAN	125
2.40	Realisasi IKM Lingkup Dinas Kesehatan Kab, Pangkep Tahun 2024	126
2.41	Pencapaian Sasaran Strategis 10 Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	132
2.42	Perkembangan Indeks Daya Beli Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2019 s.d. 2024	133
2.43	Indeks Pembangunan Gender kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2019 – 2023	138
2.44	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2023 dan Komponen Pembentuknya	138
2.45	Capaian Sasaran Strategis ke- 11: Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan	140
2.46	Indikator Pembentuk IDG Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2019 s/d Tahun 2024	141
2.47	Analisis Pencapaian Tujuan Ke- 5 “Indeks Kualitas Lingkungan Hidup”	147
2.48	Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2023 dan nilai komponen penyusun “Indeks Kualitas Lingkungan Hidup”	148
2.49	Target dan Capaian Tahun 2023 “Indeks Kualitas Lingkungan Hidup” Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	148
2.30	Lokasi Titik Pemantauan Air Sungai Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	149
2.31	Penetapan Status Mutu Air Tahun 2023	150
2.32	Analisis Pencapaian Sasaran Ke- 5 “Persentase Kepatuhan Terhadap RTRW”	156

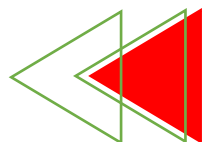


DAFTAR GRAFIK

	Halaman
2.1 Perkembangan IDM Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 – 2024	21
2.2 Perkembangan Status Desa Kabupaten Pangkep Tahun 2020-2024	23
2.3 Capaian Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024	27
2.4 Capaian Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024	29
2.5 Capaian Indeks Ketahanan Sosial (IKS) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024	31
2.6 Capaian Nilai SAKIP 5 (Lima) Tahun Terakhir.	35
2.7 Capaian Indeks Pelayanan Publik s/d Tahun 2024	40
2.8 Perkembegangan Capaian Inovasi Daerah	42
2.9 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kab. Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024	44
2.10 Perbandingan Rasio Gini Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Tahun 2020-2024	48
2.11 Perkembangan Penduduk Miskin Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024	49
2.12 Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa) Menurut Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan Tahun 2024	50
2.13 Persentase Penduduk Miskin (P0) Pangkep, Sulsel dan Nasional Tahun 2020-2024	51
2.14 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan Tahun 2024	52
2.15 Perubahan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan Tahun 2024	52
2.16 Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1) Pangkep, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024	54
2.17 Perubahan Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2024	54
2.18 Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2) Pangkep, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024	55
2.19 Perubahan Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2024	56
2.20 Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan) Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2024	57
2.21 Perubahan Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan) Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2024	57
2.22 Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah selama 4 (Empat) Tahun terakhir	66
2.23 Perkembangan IPM Kab. Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024	85
2.24 Perbandingan IPM Kabupaten Pangkep, SulSel dan Nasional Tahun 2024	86
2.25 Perkembangan Indeks Pendidikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024	89
2.26 Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan & Kabupaten Pangkep Tahun 2020-2024	90
2.27 Perkembangan Indeks Kesehatan Kab. Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2018 – 2024	103



2.28	Rata-rata Realisasi Capaian Sasaran Strategis Indeks Kesehatasn Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024	104
2.29	Perbandingan Angka Kematian Ibu (per 100.000 KLH) Tahun 2022, 2023 dan 2024	106
2.30	Perbandingan Angka Kematian Bayi (per 1000 KLH) Tahun 2022, 2023 dan 2024	110
2.31	Perbandingan Capaian Dinas Kesehatan Indikator Prevalensi Stunting Tahun 2022 – 2024	116
2.32	Perbandingan Realisasi Dinas Kesehatan Indikator Prevalensi Stunting Tahun 2022 – 2024	116
2.33	Perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2022 – 2024	123
2.34	Perkembangan IDG Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2019 2023	140
2.35	Indikator IDG Kab. Pangkep 2019-2024	141
2.36	IKLH Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2020-2024	146





BAB I

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akadicapai oleh Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Perencanaan kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Bupati Pangkajene dan Kepulauan dalam suatu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 – 2026 merupakan dokumen perencanaan lima tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan panduan bagi stakeholder lain dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu periode tahun 2021 - 2026.

RPJMD disusun berdasarkan visi dan misi Bupati Pangkajene dan Kepulauan, sekaligus berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang mengakomodir berbagai aspirasi masyarakat dalam wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

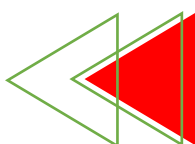
Tahun 2024 merupakan tahun ke-empat pelaksanaan RPJMD Tahun 2021 - 2026. Rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran jangka menengah diharapkan mampu mewujudkan cita-cita pembangunan dalam jangka waktu lima tahun. RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021-2026 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 7 Tahun 2021.

A. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

1. Visi

Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Visi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021-2026 adalah:

“Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Mewujudkan Masyarakat Madani yang Sejahtera, Unggul, Berdaya Saing dan Religius Berbasis Sumber Daya Lokal Berkelanjutan”



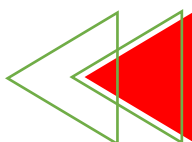


Visi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdiri dari 5 (lima) kata kunci, yaitu: Masyarakat Madani, Sejahtera, Unggul, Berdaya Saing dan Religius. Masing-masing memiliki makna strategis dan mencerminkan cita-cita dan harapan yang ingin diwujudkan. Visi ini mengandung pemahaman terjalannya sinergi yang harmonis antara 3 (tiga) pilar kekuatan pembangunan daerah yaitu pemerintah, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan dalam setiap proses manajemen pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Secara filosofi, visi pembangunan tahun 2021 - 2026 dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung pada kata kunci dan pilar misi sebagai berikut:

Tabel 1
Penjelasan Visi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2021-2026

VISI	POKOK-POKOK VISI	PENJELASAN VISI
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Mewujudkan Masyarakat Madani yang Sejahtera, Unggul, Berdaya Saing dan Religius Berbasis Sumber Daya Lokal Berkelanjutan	Masyarakat Madani	Dimaksudkan sebagai masyarakat yang memiliki kehidupan ideal yang didalamnya hak dan kewajiban warga dapat terlaksana secara seimbang serta mampu berkembang seiring dengan dunia luar demi majunya kehidupan
	Sejahtera	Adalah kondisi masyarakat Pangkajene dan Kepulauan yang terpenuhi segala kebutuhan hidupnya, semua hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh komponen masyarakat di semua wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, serta tercipta adanya kesetaraan kondisi yang dibutuhkan bagi setiap warga untuk dapat mengembangkan dirinya secara proporsional sehingga makmur serta sejahtera lahir dan batin.
	Unggul dan Berdaya Saing	Adalah kondisi dimana masyarakat memiliki kekuatan, ketangguhan, dan keutamaan serta kemampuan untuk menghadapi segala persoalan yang dihadapi. Pembangunan yang menjadikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagai kabupaten yang lebih maju, lebih sejahtera, dan lebih Makmur.
	Religius	Adalah kondisi dimana masyarakat mencapai perkembangan pada aspek rohaniah, batiniah, intelektualitas dan fitrahnya sebagai manusia yang utuh, tidak hanya mencapai perkembangan dari segi jasad/fisik, akan tetapi mengarah pada peningkatan akhlak mulia, baik secara individual maupun sosial, bermuara pada terciptanya keharmonisan sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari serta diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa





VISI	POKOK-POKOK VISI	PENJELASAN VISI
	Berbasis Sumberdaya Lokal Berkelanjutan	Bermakna bahwa pembangunan yang dijalankan berbasis pada pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang merupakan potensi lokal untuk suatu manfaat dan daya guna yang memiliki keberlangsungan terus-menerus (berkesinambungan).

2. Misi

Untuk mewujudkan visi “Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Mewujudkan Masyarakat Madani yang Sejahtera, Unggul, Berdaya Saing dan Religius Berbasis Sumber Daya Lokal Berkelanjutan”, ditetapkan 5 (lima) misi yaitu:



Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap program pembangunan guna menunjang percepatan pembangunan yang berbasis pada nilai agama yang toleran dan budaya lokal.



Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tatakelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi



Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, kelautan/perikanan, pariwisata, dan industri kreatif, dengan didukung infrastruktur berbasis wilayah.



Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif.

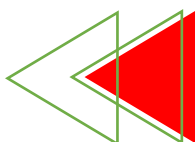


Meningkatkan tata kelola sumber daya alam berdasarkan perencanaan tata ruang wilayah yang berbasis lingkungan hidup yang berkelanjutan.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan pembangunan merupakan kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2021 - 2026 dalam bentuk pernyataan-pernyataan dalam mendukung pencapaian visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Sedangkan sasaran pembangunan adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan pembangunan berupa hasil pembangunan daerah. Sasaran hingga tahun 2026 merupakan penjabaran dari tujuan yang





diformulasi secara terukur, spesifik dan dapat dicapai secara rasional dalam kurun waktu 5 tahun ke depan (2021-2026).

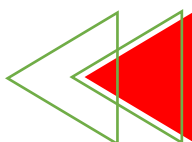
Tabel 2
Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 – 2026

Visi : Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Mewujudkan Masyarakat Madani yang Sejahtera, Unggul, Berdaya Saing dan Religius Berbasis Sumber Daya Lokal Berkelanjutan

Misi	Tujuan	Sasaran
Memantapkan Kesadaran Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Program Program Pembangunan Guna Menunjang Percepatan Pembangunan Yang Berbasis Pada Nilai Agama Yang Toleran Dan Budaya Lokal	Meningkatkan Keswadayaan Dan Kemandirian Masyarakat Dalam Pembangunan	Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Lingkungan dan Sosial Masyarakat
Memperluas Inovasi Dan Reformasi Birokrasi Demi Tatakelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Akuntabel Dan Demokratis Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatkan kualitas implementasi (road map) reformasi birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintah Daerah
		Meningkatnya kualitas pelayanan dasar dan pelayanan publik lainnya
		Terciptanya Inovasi Layanan Publik dan Penggunaan Sistem Informasi Daerah
Mengembangkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Kelautan/Perikanan, Pariwisata, Dan Industri Kreatif, Dengan Didukung Infrastruktur Berbasis Wilayah	Meningkatkan Produktivitas Perekonomian Yang Merata Dan Berkeadilan (Inklusif)	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja
		Meningkatnya taraf hidup masyarakat
		Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur daerah
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Cerdas Dan Produktif	Meningkatkan Daya Saing SDM Daerah	Meningkatnya Aksesibilitas dan mutu Pendidikan
		Meningkatnya kualitas Kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan Kesehatan
		Meningkatnya daya beli Masyarakat
		Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan
Meningkatkan Tata Kelola Sumber Daya Alam Berdasarkan Perencanaan Tata Ruang Wilayah Yang Berbasis Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Kepatuhan Terhadap RTRW

B. Strategi

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah berisi grand design perencanaan pembangunan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Strategi dirumuskan dengan menganalisis kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dalam mencapai sasaran. Sebuah strategi



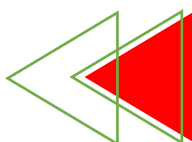


dapat dirumuskan untuk mencapai satu sasaran, dapat juga untuk mewujudkan lebih dari satu sasaran.

Dalam kurun waktu 2021-2026, Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menetapkan strategi yang akan dikembangkan sebagai langkah taktis dan efektif, untuk menjamin hasil secara maksimal dari pelaksanaan berbagai program pembangunan, yang merupakan strategi terpadu yang melibatkan dukungan dan komitmen seluruh stakeholder dan perangkat daerah.

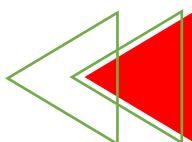
Tabel 3
Hubungan Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan]
Tahun 2021 – 2026

Visi : Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Mewujudkan Masyarakat Madani yang Sejahtera, Unggul, Berdaya Saing dan Religius Berbasis Sumber Daya Lokal Berkelanjutan.		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Misi 1 : Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap program-program pembangunan guna menunjang percepatan pembangunan yang berbasis pada nilai agama yang toleran dan budaya local		
Tujuan 1 : Meningkatkan keswadayaan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan	1. Meningkatnya ketahanan ekonomi, lingkungan dan sosial masyarakat.	Mengembangkan kerjasama dengan lembaga eksternal dalam Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Dan Ketahanan Desa Berbasis Potensi Sumberdaya Lokal Dan Nilai-Nilai Kebersamaan
Misi 2 : Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tatakelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi		
Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas implementasi (road map) reformasi birokrasi	2. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintah Daerah	Mengembangkan Sistem Pemerintahan Yang Integratif Melalui Institusionalisasi Reformasi Birokrasi Dalam Proses Bisnis Di Semua Level Pemerintahan
	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dasar Dan Pelayanan Publik Lainnya	Mengembangkan sistem pelayanan yang Andal, Efisien, Responsive, Transparan dan terpercaya, serta terjangkau oleh masyarakat luas.
	4. Terciptanya Inovasi Layanan Publik dan Penggunaan Sistem Informasi Daerah	Menciptakan inovasi untuk meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan keterbukaan informasi dan komunikasi publik.
Misi 3 : Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, kelautan/perikanan, pariwisata, dan industri kreatif, dengan didukung infrastruktur berbasis wilayah		
Tujuan 3 : Meningkatkan produktivitas perekonomian daerah yang merata dan berkeadilan (inklusif)	5. Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Mengembangkan agrobisnis perdesaan melalui revitalisasi perikanan, pertanian dan perkebunan rakyat, meningkatkan kualitas dan nilai tambah komoditi unggulan, meningkatkan aksesibilitas petani terhadap teknologi, meningkatkan kapasitas pelaku usaha dagang kecil, fasilitasi usaha perdagangan konvensional dan non konvensional (e-commerce), penguatan kemitraan antara petani dengan pelaku/pengusaha pengolahan dan pemasaran serta pencitraan produk





Visi : Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Mewujudkan Masyarakat Madani yang Sejahtera, Unggul, Berdaya Saing dan Religius Berbasis Sumber Daya Lokal Berkelanjutan.		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		dalam rangka promosi serta menarik investasi agrobisnis, perluasan pertanian organik, revitalisasi pasar tradisional serta penataan kawasan dan diversifikasi produk unggulan dan memperluas kesempatan kerja melalui fasilitasi akses informasi ketenagakerjaan dan meningkatkan produktifitas tenaga kerja melalui pelatihan dan pembinaan
	6. Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Melalui Peningkatan Kualitas Aksesibilitas, serta mengupayakan pemenuhan hak dasar dan pemberdayaan penduduk miskin.
	7. Meningkatnya Kapasitas Dan Kualitas Infrastruktur Daerah	Percepatan pembangunan infrastruktur terutama penunjang ekonomi dan penunjang sektor unggulan lokal seperti pertanian, perikanan dan pariwisata sebagai penopang utama perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
Misi 4 : Meningkatkan sumberdaya manusia yang sehat, cerdas dan produktif		
Tujuan 4 : Meningkatkan Daya Saing SDM Daerah	8. Meningkatnya Aksesibilitas Dan Mutu Pendidikan	Meningkatkan akses layanan pendidikan dan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan serta tenaga kependidikan yang berkualitas dan berdaya saing yang tidak hanya bertumpu terhadap Pendidikan formal juga fokus pada Pendidikan non formal melalui penanaman dan penguatan pendidikan karakter dan berfokus terhadap menciptakan sumber daya manusia yang kreatif
	9. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan baik dalam Preventif , Represif, maupun Kuratif melalui Penyediaan Sarana, Prasarana dan Tenaga Medis Berkualitas
	10. Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Meningkatkan kualitas belanja masyarakat baik pada sector pangan dan non pangan melalui stabilisasi perekonomian Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan penguatan sektor strategis Kabupaten Pangkep.
	11. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan	Meningkatkan pemahaman dan komitmen pentingnya perspektif pemberdayaan gender dan implementasinya dalam berbagai bidang pembangunan termasuk pencapaian kabupaten layak anak serta peningkatan layanan publik bagi penyandang disabilitas

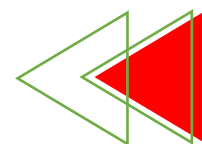




Visi : Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Mewujudkan Masyarakat Madani yang Sejahtera, Unggul, Berdaya Saing dan Religius Berbasis Sumber Daya Lokal Berkelanjutan.		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Misi 5 : Meningkatkan tata kelola sumberdaya alam berdasarkan perencanaan tata ruang wilayah yang berbasis lingkungan hidup yang berkelanjutan		
Tujuan 5 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	12. Kepatuhan Terhadap RTRW	Meningkatkan koordinasi penataan ruang daerah, Meningkatkan pengelolaan SDA LH sesuai daya dukung daya tampung serta Meningkatkan upaya pengurangan risiko bencana melalui pencegahan dan penanganan bencana baik fisik maupun sosia

C. Kebijakan Umum dan Program Prioritas Daerah

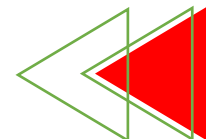
Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit untuk mengarahkan rumusan strategi agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Adapun arah kebijakan pada setiap prioritas pembangunan tahun 2024 adalah sebagai berikut:





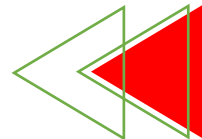
Tabel 4
Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2024
Visi :				
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Mewujudkan Masyarakat Madani yang Sejahtera, Unggul, Berdaya Saing dan Religius Berbasis Sumber Daya Lokal Berkelanjutan.				
1.	Misi 1 :			
	Memantapkan Kesadaran Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Program-Program Pembangunan Guna Menunjang Percepatan Pembangunan Yang Berbasis Pada Nilai Agama Yang Toleran Dan Budaya Lokal			
	Tujuan 1 : Meningkatkan Keswadayaan Dan Kemandirian Masyarakat Dalam Pembangunan	Sasaran 1 : Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Lingkungan dan Sosial Masyarakat	Mengembangkan kerjasama dengan lembaga eksternal dalam fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan ketahanan desa berbasis potensi sumberdaya lokal dan nilai-nilai kebersamaan	Peningkatan kualitas partisipasi masyarakat dalam pembangunan
2.	Misi 2 :			
	Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tatakelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi			
	Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas implementasi (road map) reformasi birokarasi	Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintah Daerah	Meningkatkan kualitas kinerja aparatur, kualitas perencanaan dan penganggaran, serta kualitas pengawasan diiringi dengan pengembangan transparansi rekrutmen dalam jabatan dan pengembangan e-government	Meningkatkan komitmen pimpinan dan staf dalam implementasi SAKIP.
		Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas pelayanan dasar dan pelayanan publik lainnya	Mengembangkan sistem pelayanan yang Andal, Efisien, Responsive, Transparan dan terpercaya, serta terjangkau oleh masyarakat luas.	Pemanfaatan teknologi informasi pada pelayanan publik.
		Sasaran 4 : Terciptanya Inovasi Layanan Publik dan Penggunaan Sistem Informasi Daerah	Menciptakan inovasi untuk meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan keterbukaan informasi dan komunikasi publik	Peenerapan teknologi informasi dalam mendukung good governance
3.	Misi 3 :			
	Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, kelautan/perikanan, pariwisata, dan industri kreatif, dengan didukung infrastruktur berbasis wilayah			
	Tujuan 3 : Meningkatkan produktivitas perekonomian yang merata dan berkeadilan (inklusif)	Sasaran 5 : Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Mengembangkan agrobisnis perdesaan melalui revitalisasi perikanan, pertanian dan perkebunan rakyat, meningkatkan kualitas dan nilai tambah komoditi unggulan, meningkatkan aksesibilitas petani terhadap teknologi, meningkatkan kapasitas pelaku usaha dagang kecil, fasilitasi usaha perdagangan konvensional dan non konvensional (e-commerce), penguatan kemitraan antara petani dengan pelaku/pengusaha pengolahan dan pemasaran serta pencitraan produk dalam rangka promosi serta menarik investasi agrobisnis, perluasan pertanian organik, revitalisasi pasar tradisional serta penataan kawasan dan diversifikasi produk unggulan dan memperluas kesempatan kerja melalui fasilitasi akses informasi ketenagakerjaan dan meningkatkan produktifitas tenaga kerja melalui pelatihan dan pembinaan	Pengintegrasian sektor pertanian, perikanan dan perkebunan dengan sektor pariwisata serta meningkatkan pemasaran produk melalui toko online.





NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2024
		Sasaran 6 : Meningkatnya taraf hidup masyarakat	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Melalui Peningkatan Kualitas Aksesibilitas, serta mengupayakan pemenuhan hak dasar dan pemberdayaan penduduk miskin.	Memperkuat sistem dan kelembagaan penanggulangan kemiskinan.
		Sasaran 7 : Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur daerah	Percepatan pembangunan infrastruktur terutama penunjang ekonomi dan penunjang sektor unggulan lokal seperti pertanian, perikanan dan pariwisata sebagai penopang utama perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.	Akselerasi pemerataan pembangunan infrastruktur di kecamatan luar kota.
4.	Misi 4 :			
	Meningkatkan sumberdaya manusia yang sehat, cerdas dan produktif			
	Tujuan 4 : Meningkatkan daya saing SDM daerah	Sasaran 8 : Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan	Meningkatkan akses layanan pendidikan dan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan serta tenaga kependidikan yang berkualitas dan berdaya saing yang tidak hanya bertumpu terhadap Pendidikan formal juga fokus pada Pendidikan non formal melalui penanaman dan penguatan pendidikan karakter dan berfokus terhadap menciptakan sumber daya manusia yang kreatif	Meningkatkan manajemen dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.
		Sasaran 9 : Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan baik dalam Preventif , Represif, maupun Kuratif melalui Penyediaan Sarana, Prasarana dan Tenaga Medis Berkualitas	Meningkatkan promosi, komunikasi, informasi dan edukasi dan preventif hidup sehat.
		Sasaran 10 : Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Meningkatkan kualitas belanja masyarakat baik pada sektor pangan dan non pangan melalui stabilisasi perekonomian Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan penguatan sektor strategis Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.	Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pengolahan hasil produksi sektor pertanian, perikanan dan sektor potensial lainnya skala ekonomi kecil dan menengah.
		Sasaran 11 : Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan	Meningkatkan pemahaman dan komitmen pentingnya perspektif pemberdayaan gender dan implementasinya dalam berbagai bidang pembangunan termasuk pencapaian kabupaten layak anak serta peningkatan layanan publik bagi penyandang disabilitas	Meningkatkan perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
5.	Misi 5 :			
	Meningkatkan tata kelola sumberdaya alam berdasarkan perencanaan tata ruang wilayah yang berbasis lingkungan hidup yang berkelanjutan			
	Tujuan 5 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup.	Sasaran 12 : Kepatuhan Terhadap RTRW	Meningkatkan koordinasi penataan ruang daerah, Meningkatkan pengelolaan SDA LH sesuai daya dukung daya tampung serta Meningkatkan upaya pengurangan risiko bencana melalui pencegahan dan penanganan bencana baik fisik maupun sosial.	1. Penyediaan infrastruktur pengelolaan air limbah dan persampahan. 2. Penguatan pemantauan, evaluasi dan pengendalian daya dukung dan daya tampung lingkungan serta Pembangunan rendah karbon.





Rumusan strategi dan arah kebijakan disusun dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang akan melahirkan program pembangunan daerah. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

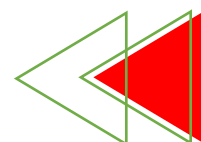
Tema pembangunan pada tahun 2024, yaitu: **“Pemantapan pelayanan publik, pengembangan iklim demokrasi dan pemeliharaan kualitas ketentraman dan ketertiban”**

D. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tabel 5
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Tujuan/Sasaran			Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran	
Tujuan 1	Meningkatkan keswadayaan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan.		1.	IDM
	Sasaran Strategis 1	Meningkatnya ketahanan ekonomi, lingkungan dan sosial masyarakat	2.	Indeks Ketahanan Ekonomi
			3.	Indeks Ketahanan Lingkungan
			4.	Indeks Katahanan Sosial
Tujuan 2	Meningkatkan kualitas implementasi (road map) reformasi birokrasi		5.	Indeks Reformasi Birokrasi
	Sasaran Strategis 2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah	6.	Nilai SAKIP
			7.	IPKD
	Sasaran Strategis 3	Meningkatnya kualitas pelayanan dasar dan pelayanan publik lainnya	8.	Indeks Pelayanan Publik
	Sasaran Strategis 4	Terciptanya inovasi layanan publik dan penggunaan Sistem Informasi Daerah	9.	Indeks Inovasi Daerah
Tujuan 3	Meningkatkan produktivitas perekonomian yang merata dan berkeadilan (inklusif)		10.	Laju Pertumbuhan Ekonomi
	Sasaran Strategis 5	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	11.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
	Sasaran Strategis 6	Meningkatnya taraf hidup masyarakat	12.	Tingkat kemiskinan
			13.	PDRB/kapita
			14.	Rasio Gini
Sasaran Strategis 7	Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur daerah	15.	Indeks daya saing Infrastruktur daerah	
Tujuan 4	Meningkatkan daya saing SDM daerah		16.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
	Sasaran Strategis 8	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	17.	Indeks Pendidikan
	Sasaran Strategis 9	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan Kesehatan.	18.	Indeks Kesehatan





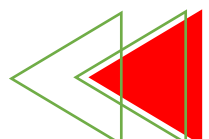
Tujuan/Sasaran			Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran	
	Sasaran Strategis 10	Meningkatnya daya beli masyarakat.	19.	Indeks Pengeluaran perkapita disesuaikan
	Sasaran Strategis 11	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	20.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Tujuan 5	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup.		21.	IKLHD
	Sasaran Strategis 12	Kepatuhan terhadap RTRW	22.	Persentase Kepatuhan Terhadap RTRW

E. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah:

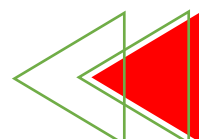
- 1) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
- 2) Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- 3) Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan / kemajuan kinerja penerima amanah;
- 4) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur





Tabel 6
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Tujuan/Sasaran			Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran		Target
Tujuan 1	Meningkatkan Keswadayaan Dan Kemandirian Masyarakat Dalam Pembangunan		1.	IDM	0,7236
	Sasaran 1	Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Lingkungan dan Sosial Masyarakat	2.	Indeks Ketahanan Ekonomi	0,6325
			3.	Indeks Ketahanan Lingkungan	0,6800
			4.	Indeks Katahanan Sosial	0,8581
Tujuan 2	Meningkatkan kualitas implementasi (road map) reformasi birokarasi		5.	Indeks Reformasi Birokrasi	B (>60 – 70)
	Sasaran 2	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintah Daerah	6.	Nilai SAKIP	BB (>70 – 80)
			7.	IPKD	71,000
	Sasaran 3	Meningkatnya kualitas pelayanan dasar dan pelayanan publik lainnya	8.	Indeks Pelayanan Publik	80,73
Sasaran 4	Terciptanya Inovasi Layanan Publik dan Penggunaan Sistem Informasi Daerah	9.	Indeks Inovasi Daerah	70,00	
Tujuan 3	Meningkatkan Produktivitas Perekonomian Yang Merata Dan Berkeadilan (Inklusif)		10.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,70 – 6,15
	Sasaran 5	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	11.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,75
	Sasaran 6	Meningkatnya taraf hidup masyarakat	12.	Tingkat kemiskinan	11,13
			13.	PDRB/kapita	76,84
			14.	Rasio Gini	0,316
	Sasaran 7	Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur daerah	15.	Indeks daya saing Infrastruktur daerah	3,32
Tujuan 4	Meningkatkan Daya Saing SDM Daerah		16.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,48
	Sasaran 8	Meningkatnya Aksesibilitas dan mutu Pendidikan	17.	Indeks Pendidikan	63,28
	Sasaran 9	Meningkatnya kualitas Kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan Kesehatan	18.	Indeks Kesehatan	72,83
	Sasaran 10	Meningkatnya daya beli Masyarakat	19.	Indeks Pengeluaran perkapita disesuaikan	75,97
	Sasaran 11	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan	20.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	91,89
Tujuan 5	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup.		21.	IKLHD	66,63
	Sasaran 12	Kepatuhan Terhadap RTRW	22.	Persentase Kepatuhan Terhadap RTRW	100





BAB II

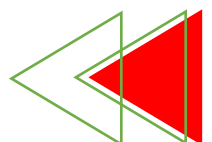
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan dari kewajiban Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang tidak terlepas dari mekanisme fungsi perencanaan, mulai Perencanaan Strategis (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Setelah tahun anggaran berakhir, apa yang sudah direncanakan dan diperjanjikan dalam perjanjian kinerja harus diukur dan dilaporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Untuk itu pada bab ini akan kami uraikan hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan tersebut.

Laporan kinerja ini disusun berdasarkan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 maupun RKPD Tahun 2024.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan demi mewujudkan misi dan visi pemerintah. Capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut :





1. Rumus 1 : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Presentase Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

2. Rumus 2 : Apabila semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Presentase Tingkat Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 7
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91 – 100	Sangat Baik (SB)	
2.	76 – 90	Baik	
3.	66 – 75	Sedang	
4.	51 – 65	Rendah	
5.	= 50	Sangat Rendah	

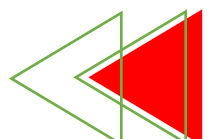
Sedangkan tahapan dalam pengukuran capaian kinerja dilakukan melalui proses pengumpulan data dan analisa data yaitu :

1. Pengumpulan data

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang merupakan indikator outcome dari sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan Perjanjian Kinerja Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024. Indikator tersebut diperoleh melalui dua sumber yaitu data internal yang berasal dari sistem informasi / pelaporan dari masing masing Perangkat Daerah di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan data eksternal yang berasal dari luar instansi / lintas sektoral.

2. Analisa data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode Kinerja Instansi Pemerintah yang meliputi ikhtisar pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Yang





selanjutnya dilakukan penghitungan capaian kinerja untuk pengukuran pencapaian sasaran.

B. CAPAIAN KINERJA

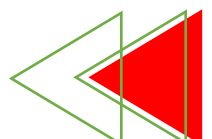
Laporan kinerja tahun 2024 merupakan penyajian capaian kinerja tiap sasaran strategis yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja yang merupakan target awal dari perencanaan. sehingga laporan kinerja ini merupakan dokumen pelaporan kinerja di awal atau tahun pertama. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target dan realisasi.



Indikator kinerja pada tiap sasaran strategis merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja. Kriteria yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun melalui Rencana Kinerja Tahunan (*Performance Plan*) dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Selanjutnya pada akhir tahun 2024 target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya, sehingga diketahui celah kinerja (*Performance Gap*). Selisih yang timbul akan dievaluasi dan dianalisis guna menetapkan strategi untuk peningkatan kinerja di masa datang (*Performance Improvement*).

Secara umum Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

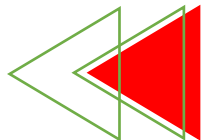
Adapun capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 sebagai berikut :





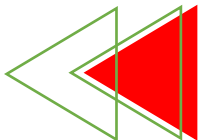
Tabel 8
Capaian Kinerja Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	REALISASI 2023	TAHUN 2024			Target Akhir RPJMD (2026)	Tkt Capaian 2024 terhadap Akhir RPJMD (2026) (%)
					Target	Realisasi	Tkt Capaian 2024 (%)		
Tujuan 1 : Meningkatkan keswadayaan & kemandirian masyarakat dalam pembangunan.	I	IDM	Angka	0,7346	0,7236	0,7623	105,34 %	0,7590	100,43 %
Sasaran 1 : Meningkatnya ketahanan ekonomi, lingkungan & sosial masyarakat.	2.	Indeks Ketahanan Ekonomi	Angka	0,6279	0,6325	0,6446	101,91 %	0,6782	95,05 %
	3.	Indeks Ketahanan Lingkungan	Angka	0,7610	0,6800	0,8185	120,37 %	0,6965	117,52 %
	4.	Indeks Katahanan Sosial	Angka	0,8148	0,8581	0,8237	95,99 %	0,9022	91,30 %
Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas implementasi (roadmap) reformasi birokrasi.	5.	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	CC (53,30)	B (60-70)	58,34	89,75 %	BB (> 70 - 80)	77,78 %
Sasaran 2 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah.	6.	Nilai SAKIP	Huruf / Angka	B 63,53)	BB (70-80)	64,03	85,37 %	A (> 80 - 90)	75,33 %
	7.	IPKD	Angka	77,7000	71,0000	83,6261	117,78 %	72,5000	115,34 %
Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas pelayanan dasar dan pelayanan publik Lainnya.	8.	Indeks Pelayanan Publik	Angka	84,98	80,73	83,06	102,88 %	81,55	102,95 %
Sasaran 4 : Terciptanya inovasi layanan publik & sistem informasi daerah.	9.	Indeks Inovasi Daerah	Angka	62,48 (Inovatif)	63,09	65,82 (Sangat Inovatif)	104,33 %	80,00	82,27 %



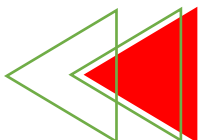


TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	REALISASI 2023	TAHUN 2024			Target Akhir RPJMD (2026)	Tkt Capaian 2024
Tujuan 3 : Meningkatkan produktivitas perekonomian yang merata & berkeadilan (inklusif)	10.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,75	4,70 – 6,15	5,00	91,32 %	4,80 - 6,35	89,76 %
Sasaran 5 : Meningkatnya penyerapan tenaga kerja.	11.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	5,05	4,75	3,99	116,00 %	4,37	101,08 %
Sasaran 6 : Meningkatnya taraf hidup masyarakat.	12.	Tingkat Kemiskinan	Persen	13,40	11,13	12,41	88,50 %	9,83	73,75 %
	13.	PDRB/kapita	Rp. Juta	91,86	76,84	96,36	125,40 %	77,45	124,41 %
	14.	Rasio Gini	Angka	0,354	0,316	0,317	99,68 %	0,300	94,33 %
Sasaran 7 : Meningkatnya kapasitas & kualitas infrastruktur daerah	15.	Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	Angka	3,46	3,32	3,88	116,86 %	3,34	116,16 %
Tujuan 4 : Meningkatkan daya saing SDM daerah	16.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	73,23	70,48	73,87	104,27 %	71,17	103,79 %
Sasaran 8 : Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan.	17.	Indeks Pendidikan	Angka	63,26	63,28	63,82	100,85 %	64,63	98,74 %
Sasaran 9 : Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan	18.	Indeks Kesehatan	Angka	72,86	72,83	73,22	100,53 %	73,32	99,86 %





TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	REALISASI 2023	TAHUN 2024			Target Akhir RPJMD (2026)	Tkt Capaian 2024
Sasaran 10 : Meningkatnya daya beli masyarakat	19.	Indeks Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan	Angka	76,32	75,97	77,30	101,75 %	76,09	101,59 %
Sasaran 11 : Meningkatnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan.	20.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka	64,12	91,89	66,38	72,23 %	92,82	71,51 %
Tujuan 5 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.	21.	IKLHD	Angka	66,39	66,63	75,44	113,22 %	67,43	111,87 %
Sasaran 12 : Kepatuhan terhadap RTRW	22.	Persentase Kepatuhan Terhadap RTRW	Persen	100	100	100	100,00 %	100	100,00 %



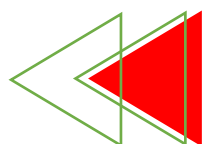


C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sesuai dengan pengukuran kinerja Tahun 2024 disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (kalau ada dengan standar nasional). Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efesiensi pencapaian target kinerja.

Dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024, terdapat 22 (dua puluh dua) indikator kinerja untuk mendukung 12 (dua belas) sasaran strategis.

Berikut ini capaian kinerja (performance results) tiap indikator kinerja sebagai berikut:





Tujuan Ke-1

Meningkatkan Keswadayaan Dan Kemandirian Masyarakat Dalam Pembangunan

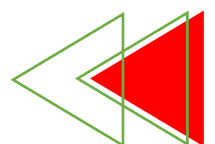
Indeks Desa Membangun (IDM) adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan dan perkembangan desa di Indonesia. IDM mengklasifikasikan desa-desa berdasarkan indikator pembangunan yang ada, seperti ekonomi, infrastruktur, akses terhadap layanan dasar (pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi), serta ketahanan sosial dan budaya. Indeks Desa Membangun memberikan gambaran tentang seberapa jauh suatu desa berkembang dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari fasilitas publik, kesejahteraan masyarakat, hingga kualitas hidup secara keseluruhan. Tujuan utama dari IDM adalah untuk memetakan status pembangunan desa agar dapat memfokuskan upaya pembangunan pada desa-desa yang membutuhkan perhatian lebih besar.

Dengan menggunakan IDM, pembangunan di desa tidak hanya dilihat dari satu aspek, tetapi lebih holistik dan menyeluruh. Misalnya, meskipun sebuah desa memiliki infrastruktur yang cukup baik, tetapi jika masyarakatnya masih mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan atau kesehatan, desa tersebut masih bisa dianggap membutuhkan perhatian lebih. Sebaliknya, desa dengan akses terbatas pada infrastruktur tetapi memiliki tingkat partisipasi sosial yang tinggi bisa dianggap berpotensi berkembang pesat.

Melalui pendekatan yang berbasis data ini, IDM dapat membantu mendukung kebijakan yang lebih terarah dalam pemberdayaan desa dan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan.

Tabel 9
Capaian Tujuan 1: Meningkatkan Keswadayaan dan Kemandirian Masyarakat Dalam Pembangunan

No.	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2023	2024			Target Akhir RPJMD (2026)	Capaian s/d 2024 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
1.	IDM	0,7346	0,7236	0,7623	105,38	0,7590	100,43

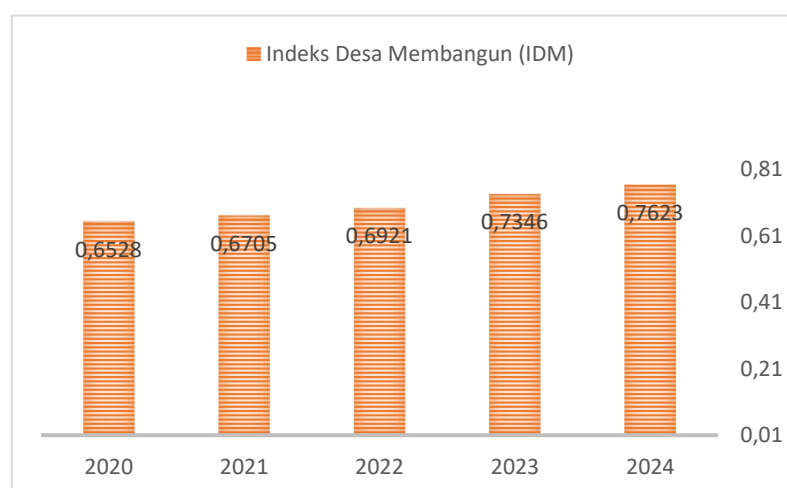




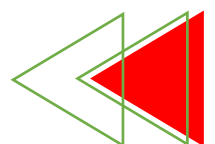
Dari tabel diatas terlihat bahwa indikator tujuan Meningkatkan Keswadayaan dan Kemandirian Masyarakat dalam Pembangunan tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 105,38% atau kategori sangat baik dari tahun sebelumnya. capaian IDM sebesar 0,7623 pada tahun 2024 menunjukkan kinerja yang lebih baik daripada target yang ditetapkan, hal ini memberikan indikasi bahwa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan daya saing manusia berfungsi dengan baik. Capaian tahun 2024 ini juga **melebihi** target yang ditetapkan untuk tahun 2026 pada dokumen RPJMD. Hal ini menunjukkan bahwa program-program yang dijalankan dalam upaya meningkatkan kualitas daya saing manusia sudah cukup efektif. Bahkan, pada tahun 2024, capaian sudah melewati target yang ditetapkan untuk dua tahun ke depan. Ini memberi sinyal bahwa target jangka panjang bisa tercapai lebih cepat, dan bahkan ada peluang untuk meningkatkan target di masa mendatang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 bahwa sudah tidak terdapat desa di kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang masuk kategori sangat tertinggal dan tertinggal. Ini menandakan bahwa program program pemerintah kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah berjalan.

Adapun untuk perkembangan trend peningkatan IDM Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 sampai dengan 2024 digambarkan melalui grafik berikut :

Grafik 1
Perkembangan IDM Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2020 – 2024



Sumber : data IDM diolah dari website Kemendesa Tahun 2025



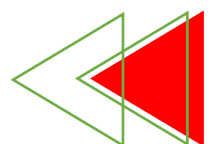


Capaian Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun dengan angka yang terus meningkat. Pada tahun 2020, angka IDM 0.6528 menunjukkan bahwa sebagian besar desa di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berada dalam kategori "Desa Berkembang," dengan sebagian kecil desa berada di kategori lebih rendah. Pada tahun 2021 Peningkatan sebesar 0.0167 dibandingkan tahun sebelumnya mencerminkan adanya upaya nyata dalam pengembangan desa dan kesejahteraan masyarakat. Ada perbaikan di sektor infrastruktur, pendidikan, atau pemberdayaan ekonomi desa. Selanjutnya capaian tahun **2022 (0.6921)** angka ini menunjukkan bahwa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan semakin mendekati kategori "Desa Maju." Peningkatan 0.0216 per tahun mencerminkan program pembangunan yang lebih efektif dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat desa. Pada capaian tahun **2023 (0.7346)**, dengan capaian ini Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menunjukkan bahwa lebih banyak desa yang mengalami perbaikan di berbagai indikator ketahanan sosial dan ekonomi, dengan sebagian desa mencapai kategori "Desa Maju" atau bahkan "Mandiri." Selanjutnya capaian tahun **2024 (0.7623)** Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan semakin mendekati angka yang menunjukkan ketahanan dan kemandirian desa. Peningkatan sebesar 0.0277 ini menunjukkan bahwa kebijakan dan program yang dijalankan semakin berhasil, dan sebagian besar desa kini berada dalam kategori yang lebih tinggi. Berikut tabel dan grafik perkembangan status desa di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Tabel 10
Jumlah Desa yang berstatus Menurut Kriteria Indeks Desa Membangun (IDM)
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024

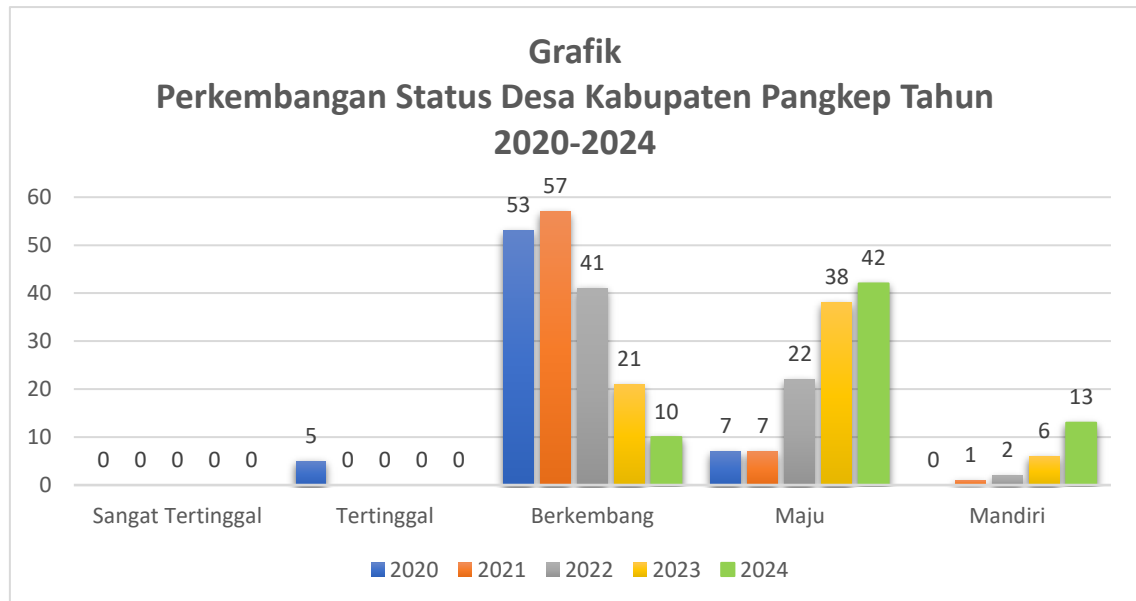
No	Status Desa	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Sangat Tertinggal	Desa	0	0	0	0	0
2	Tertinggal	Desa	5	0	0	0	0
3	Berkembang	Desa	53	57	41	21	10
4	Maju	Desa	7	7	22	38	42
5	Mandiri	Desa	0	1	2	6	13
Jumlah			65	65	65	65	65

Sumber : data Status Desa diolah dari website Kemendesa 2025





Grafik 2
Perkembangan Status Desa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2020-2024



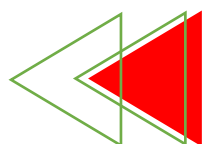
Sumber : data Status Desa diolah dari website Kemendesa 2025

Peningkatan IDM dari **0.6538 pada 2020** hingga **0.7623 pada 2024** menunjukkan capaian yang sangat baik bagi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam mengembangkan kualitas hidup masyarakat desa. Pencapaian ini mencerminkan kemajuan yang signifikan dalam aspek infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Pemerintah daerah perlu terus mempertahankan kebijakan yang mendukung peningkatan ketahanan sosial-ekonomi desa dan memastikan bahwa seluruh desa dapat merasakan manfaat pembangunan secara merata. Hal ini sejalan dengan kebijakan intervensi pembangunan dari Pemerintah sudah tepat dan sesuai dengan partisipasi masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah dan kearifan lokal dan budaya.

Faktor - Faktor Keberhasilan Indeks Desa Membangun

Faktor-faktor keberhasilan IDM pada Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan antara lain :

1. Kebijakan pemerintah yang mendukung baik dari segi perencanaan yang jelas, terarah, dan berkelanjutan dalam pembangunan desa maupun penyediaan anggaran yang memadai dan tepat sasaran untuk program pembangunan desa;

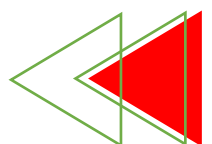




2. Peningkatan kualitas infrastruktur yang memadai, seperti jalan, listrik, air bersih dan sanitasi yang merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kualitas hidup di desa serta **penyediaan fasilitas umum** sarana publik seperti sekolah, puskesmas, pasar, dan fasilitas olahraga juga berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa;
3. Pemberdayaan masyarakat melalui Keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahap pembangunan (perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi) sehingga menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap pembangunan yang dilakukan. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan desa, seperti melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau kelompok masyarakat lainnya serta Penyediaan pelatihan keterampilan dan pendidikan yang relevan sehingga meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengelola sumber daya desa secara lebih efisien, memperbaiki ekonomi lokal, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) desa;
4. Peningkatan SDM dengan memperbaiki **akses dan kualitas terhadap layanan Pendidikan dan** layanan Kesehatan;
5. **Melakukan Kolaborasi Antar Sektor dengan** Kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat penting dalam membangun desa. Program Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan swasta, misalnya, dapat memberikan dukungan finansial dan teknis untuk pembangunan desa dan **Pembangunan Kemitraan diantaranya** Kerja sama dengan lembaga masyarakat, organisasi non-pemerintah (NGO), dan sektor lainnya dapat memperkuat kapasitas desa dalam merancang dan melaksanakan program pembangunan.

Program kegiatan yang mendukung pencapaian indikator tujuan Meningkatkan Keswadayaan Dan Kemandirian Masyarakat Dalam Pembangunan antara lain :

- 1) Program Penataan Desa
- 2) Program administrasi pemerintahan desa
- 3) Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat
- 4) Program Peningkatan Kerjasama Desa
- 5) Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik

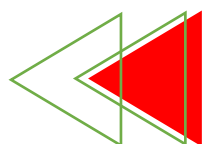




- 6) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- 7) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
- 8) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 9) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- 10) Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public

Indeks Desa Membangun bisa digunakan sebagai acuan dalam melakukan integrasi, afirmasi, dan sinergi pembangunan. Harapannya adalah agar terwujudnya kondisi masyarakat desa yang sejahtera, adil dan mandiri. Indeks Desa Membangun (IDM) mengklasifikasi desa menjadi lima status yakni: Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang, Desa Tertinggal serta Desa Sangat Tertinggal. Klasifikasi di atas berguna untuk mempertajam penetapan status perkembangan desa sekaligus sebagai rujukan intervensi kebijakan.

Sosialisasi Pemutakhiran IDM berbasis SDG's Desa dan Desa Cinta Statistik Tahun 2024





SASARAN STRATEGIS 1

Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Lingkungan dan Sosial Masyarakat

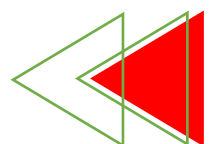
Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Tabel 11
Capaian Sasaran Strategis 1
Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Lingkungan dan Sosial Masyarakat

No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2023	2024			Target Akhir RPJMD (2026)	Capaian s/d 2021 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
1.	Indeks Ketahanan Ekonomi	0,6279	0,6325	0,6446	101,91	0,6782	95,05
2.	Indeks Ketahanan Lingkungan	0,761	0,6800	0,8185	120,37	0,6965	117,52
3.	Indeks Ketahanan Sosial	0,8148	0,8581	0,8237	95,99	0,9022	91,30

1. Indikator Indeks Ketahanan Ekonomi

Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) adalah ukuran yang mencerminkan kemampuan suatu daerah untuk bertahan dan berkembang dalam menghadapi tantangan ekonomi, baik dari faktor internal (seperti daya saing ekonomi, pendapatan, lapangan kerja) maupun eksternal (misalnya krisis ekonomi global, bencana alam) Nilai IKE berkisar antara 0 hingga 1, dengan nilai yang lebih tinggi menunjukkan ketahanan ekonomi yang lebih baik. Berdasarkan informasi dari tabel diatas bahwa realisasi capaian indikator indeks ketahanan ekonomi pada tahun

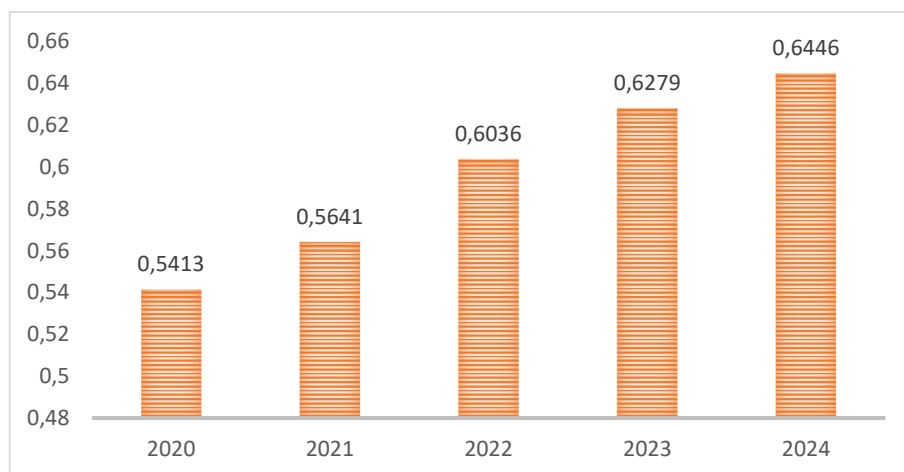




2024 sebesar 0.6446 atau mengalami peningkatan dari tahun 2023 yang sebelumnya sebesar 0,6279 dengan tingkat capaian kinerja 101,91 persen atau kategori sangat baik.

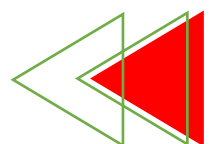
Analisis terhadap nilai Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menunjukkan adanya peningkatan pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023. Terjadi peningkatan sebesar **0,0167** atau sekitar **1,67 persen** dari tahun 2023 ke 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa ketahanan ekonomi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan cenderung mengalami perbaikan pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Grafik 3
Capaian Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024



Sumber : data diolah dari website Kemendesa 2025

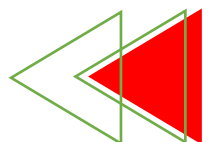
Nilai IKE yang lebih tinggi pada tahun 2024 menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menunjukkan perbaikan dalam aspek ketahanan ekonomi. Hal ini bisa mencerminkan Peningkatan daya saing daerah, **perbaikan dalam sektor-sektor penting**, seperti pertanian, industri, atau perdagangan, Peningkatan pendapatan masyarakat, lebih stabilnya kondisi ekonomi regional. Dengan adanya **peningkatan** yang relatif kecil namun konsisten dan jika tren ini berlanjut, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan bisa mengalami peningkatan ketahanan ekonomi yang lebih signifikan di tahun-tahun mendatang. **Fokus pada keberlanjutan** dalam kebijakan pembangunan ekonomi serta penanganan masalah-masalah struktural yang mungkin masih ada, seperti kemiskinan atau kesenjangan ekonomi, akan sangat penting untuk menjaga





momentum tersebut. Penting untuk terus mengoptimalkan potensi daerah, menjaga stabilitas ekonomi, dan melakukan evaluasi serta inovasi dalam kebijakan ekonomi yang ada.

Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

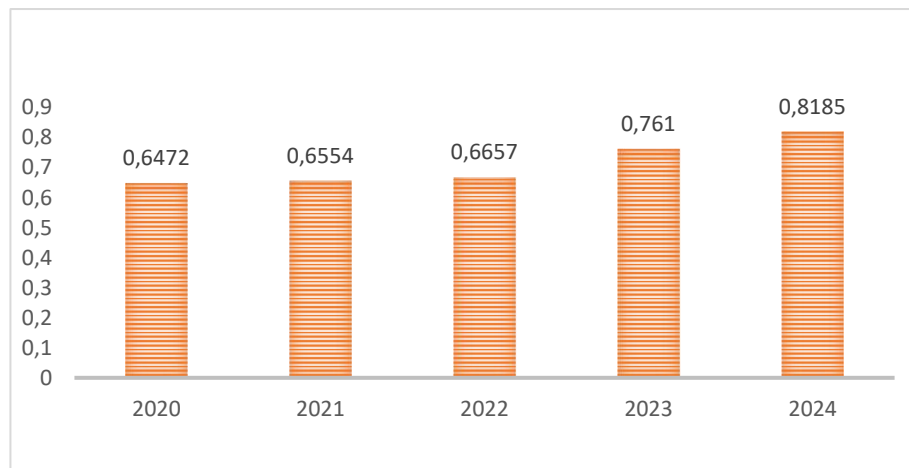




2. Indikator Indeks Ketahanan Lingkungan

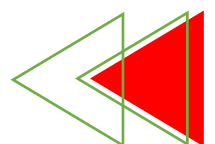
Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) merupakan ukuran yang mencerminkan kemampuan suatu daerah untuk mengelola dan melindungi lingkungannya dalam rangka menghadapi perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan ancaman bencana alam. Nilai IKL yang lebih tinggi mengindikasikan bahwa daerah tersebut memiliki ketahanan lingkungan yang lebih baik. Nilai IKL berkisar antara 0 hingga 1, dengan nilai yang lebih tinggi menunjukkan kondisi lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Realisasi capaian Indikator Indeks Ketahanan Lingkungan untuk tahun 2024 sebesar 0,8185 terjadi peningkatan sebesar **0,0575** atau sekitar **7,57 persen** dari tahun 2023 dengan tingkat capaian kinerja 120,37 persen atau kategori sangat baik.

Grafik 4
Capaian Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024



Sumber : Data diolah dari website Kemendesa 2025

Peningkatan nilai IKL pada tahun 2024 menunjukkan bahwa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah berhasil dalam meningkatkan pengelolaan dan perlindungan lingkungan, sehingga lebih tangguh menghadapi berbagai tantangan lingkungan. Untuk mempertahankan dan bahkan meningkatkan nilai IKL, perlu adanya kebijakan yang lebih mendalam, investasi dalam teknologi ramah lingkungan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelestarian lingkungan.





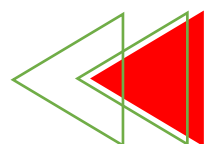
Musyawarah Desa Ketahanan Pangan dalam Rangka Menuju Desa Tematik Pangan Tahun 2025



3. Indeks Ketahanan Sosial

Indeks Ketahanan Sosial (IKS) menggambarkan kemampuan suatu daerah untuk mempertahankan stabilitas sosialnya, serta mengelola hubungan antarwarga, kesetaraan sosial, dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Indeks Ketahanan Sosial terdiri dari:

- 1) Dimensi Modal Sosial (indikator solidaritas sosial, memiliki toleransi, rasa aman penduduk, kesejahteraan Sosial);
- 2) Dimensi Kesehatan (indikator pelayanan kesehatan, keberdayaan masyarakat, dan jaminan kesehatan);

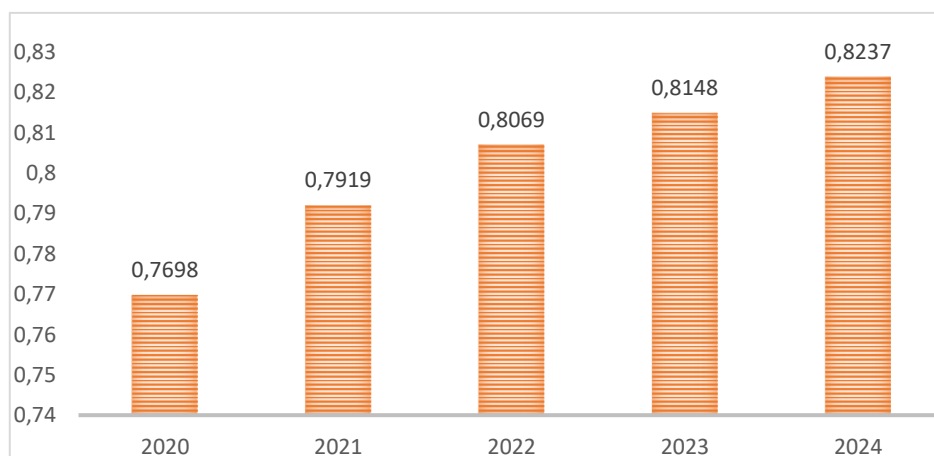




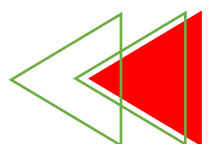
- 3) Dimensi Pendidikan (indikator akses ke pendidikan dasar dan menengah, akses ke pendidikan non formal dan akses ke pengetahuan);
- 4) Dimensi Permukiman (indikator akses ke air bersih, akses ke sanitasi, akses ke listrik, dan akses ke informasi dan komunikasi).

Berdasarkan informasi dari tabel di atas bahwa realisasi capaian indikator indeks ketahanan sosial pada tahun 2024 sebesar 0,8237 atau mengalami peningkatan dari tahun 2023 yang sebelumnya sebesar 0,8148. Dengan tingkat capaian sebesar 95,99 persen dari target sebesar 0,8581 atau kategori sangat baik. Dalam hal ini, peningkatan dari 0,8148 ke 0,8237 mengindikasikan bahwa ketahanan sosial Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sedikit lebih baik pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam ketahanan sosial Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Meskipun perubahan ini relatif kecil, namun mencerminkan adanya kemajuan dalam memperbaiki kondisi sosial masyarakat. **Peningkatan sebesar 1,09 persen** ini dapat diartikan bahwa berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat mulai menunjukkan dampak positif, terutama dalam hal kesejahteraan sosial, pendidikan, dan pengelolaan hubungan antarwarga. Untuk menjaga dan meningkatkan nilai IKS, penting untuk terus memperkuat kebijakan yang fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan sosial, dan pengelolaan ketimpangan sosial yang lebih baik.

Grafik 5
Capaian Indeks Ketahanan Sosial (IKS)
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024



Sumber : data diolah dari website Kemendesa 2025

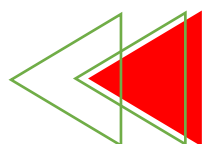




Tantangan kedepannya adalah bagaimana nilai IDM Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dapat meningkat hingga status IDM masuk pada kategori maju dan selanjutnya kategori mandiri. Olehnya itu diperlukan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, serta Pemerintah Desa dan Kelurahan. Terdapat beberapa Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian IDM Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagaimana yang tergambarkan di dalam dokumen RPJMD tahun 2021-2026 yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Perangkat Daerah Kecamatan.

1. Program di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang berkaitan dengan pencapaian IDM yaitu Program Peningkatan Kerjasama Desa, Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat, Program administrasi pemerintahan desa, Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
2. Program di Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang berkaitan dengan pencapaian IDM yaitu Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial.
3. Program di Perangkat Daerah Kecamatan yang berkaitan dengan pencapaian IDM yaitu Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
4. Program di Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang berkaitan dengan pencapaian IDM yaitu Program Pengembangan Kebudayaan dan Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya.

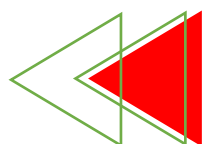
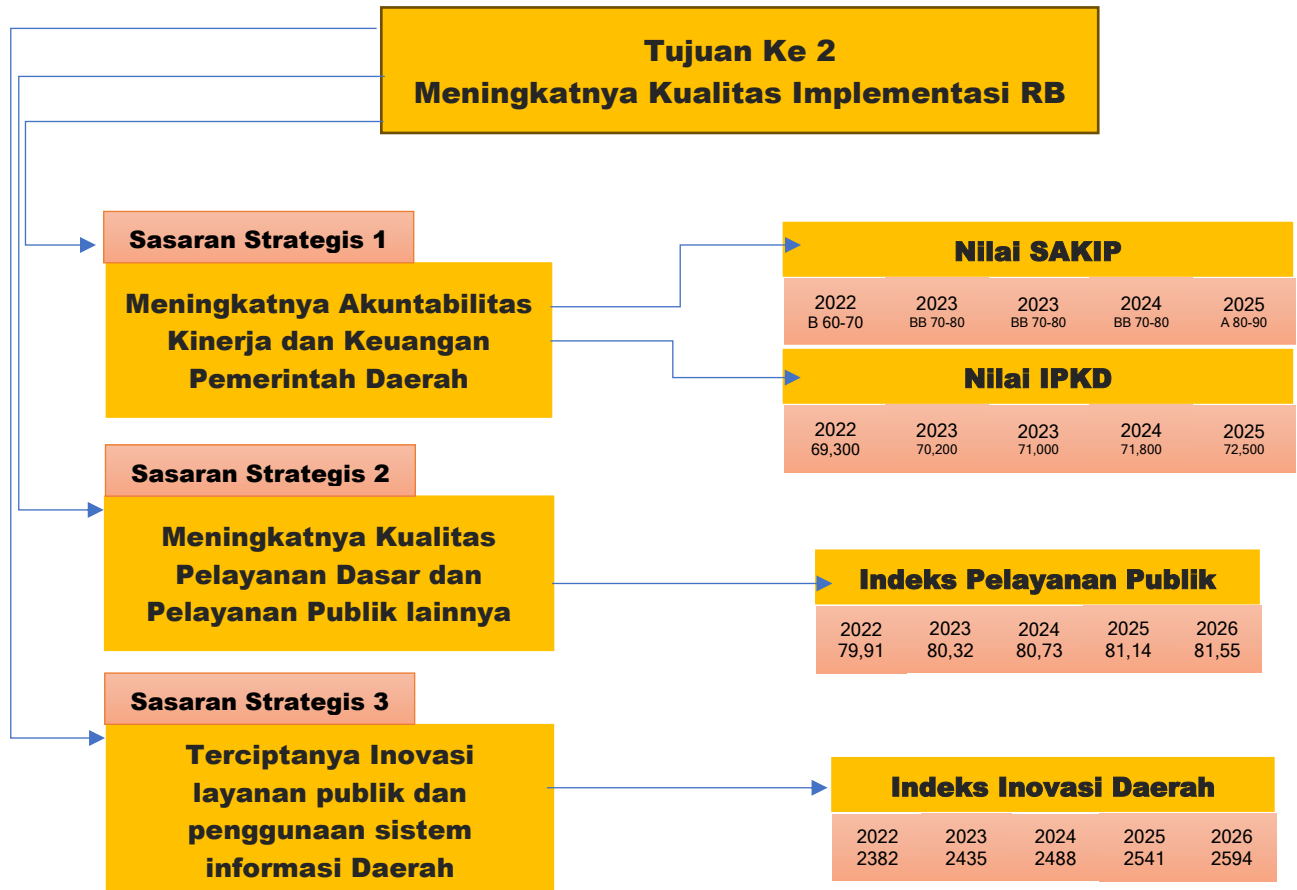
Kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat Desa





Tujuan Ke-2

Meningkatkan Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi





SASARAN STRATEGIS 2

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah

Sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBN/APBD maka setiap Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja.

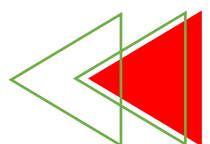
Tabel 12
Capaian Sasaran Strategis 2: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah

No	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Tahun 2024			Target Akhir RPJMD (2026)	Capaian 2023 Terhadap Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)		
1	Nilai SAKIP	63,53	75,00	64,03	85,37 %	A (85)	75,33 %
2	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	77,7000	71,0000	83,6261	117,78 %	72,5000	115,34 %

1. Indikator Kinerja : Nilai SAKIP

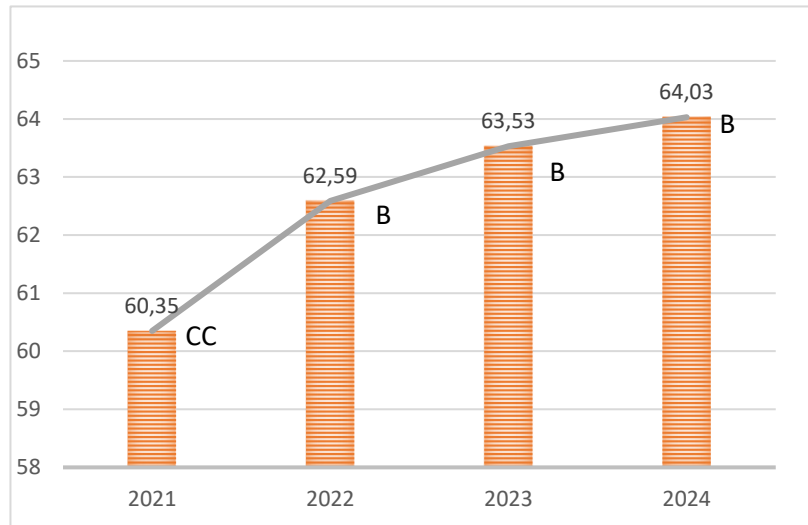
SAKIP atau Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Landasan hukum implementasi SAKIP adalah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten yang dikenal dengan Nilai SAKIP merupakan nilai yang diperoleh dari Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Angka hasil evaluasi ini menggambarkan tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya instansi pemerintah daerah yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*).





Grafik 6
Capaian Nilai SAKIP 5 (Lima) Tahun Terakhir.



Rincian penilaian akuntabilitas kinerja terdiri dari 4 (empat) komponen penilaian, yaitu: (1). perencanaan kinerja, (2). pengukuran kinerja, (3). pelaporan, dan (4). evaluasi internal. Hasil penilaiannya pada tabel berikut.

Tabel 13
Penilaian Komponen SAKIP Tahun 2024

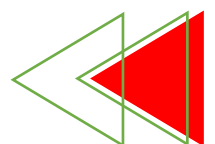
No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai Diperoleh
1	Perencanaan Kinerja	30	22,65
2	Pengukuran Kinerja	30	17,41
3	Pelaporan Kinerja	15	10,94
4	Evaluasi Internal	25	13,03
NILAI HASIL EVALUASI		100	64,03 (B)

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menunjukkan nilai **64,03** dengan predikat **"B"**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **"Baik"**, yaitu implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2023	2024
1. Perencanaan Kinerja	30	22,64	22,65
2. Pengukuran Kinerja	30	17,40	17,41
3. Pelaporan Kinerja	15	10,89	10,94
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	12,60	13,03
Nilai Hasil Evaluasi	100	63,53	64,03
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B





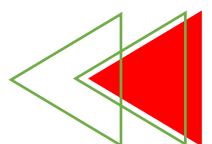
mengalami peningkatan dari tahun 2023 yang sebesar 63,53. Dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2021-2026, maka capaian Nilai SAKIP pada tahun 2024 ini baru mencapai sebesar 75,33 persen.

Nilai SAKIP dengan kategori B (Baik) menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah melaksanakan dengan Baik penerapan tingkat efektivitas dan efisiensi pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil, namun tetap masih memerlukan perbaikan-perbaikan.

Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Para Kepala Perangkat Daerah



Kegiatan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Secara Berkala





2. Indikator Kinerja : Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.

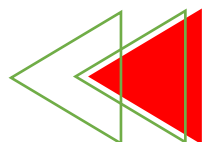
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 900.1.15.3-372 TAHUN 2024

TENTANG

HASIL PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA
SELURUH INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2023.

6.	ACEH UTARA	14,918	20	15	15	5,72	15	85,638	Baik	A
7.	KUDUS	13,974	20	15	15	6,552	15	85,526	Baik	A
8.	MAROS	13,868	20	15	15	5,728	15	84,596	Baik	A
9.	PESAWARAN	13,358	18,448	14,224	20	3,094	15	84,125	Baik	A
10.	TASIKMALAYA	12,824	19,828	12,414	20	3,941	15	84,007	Baik	A
11.	PURWOREJO	14,271	20	14,483	15	5,085	15	83,839	Baik	A
12.	BANJAR	13,703	20	15	15	5,086	15	83,789	Baik	A
13.	SEMARANG	8,888	20	13,966	20	5,903	15	83,756	Baik	A
14.	PANGKAJENE KEPULAUAN	10,943	20	14,224	20	3,459	15	83,626	Baik	A
15.	BELITUNG TIMUR	13,543	19,655	14,741	15	5,513	15	83,453	Baik	A





SASARAN STRATEGIS 3

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dasar dan Pelayanan Publik

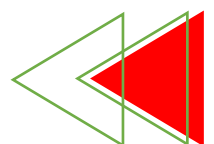
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa negara berkewajiban meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan.

Untuk mengoptimalkan pelayanan publik maka diterbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan. Sedangkan untuk menjamin peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan maka dilakukan evaluasi melalui kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Survei ini akan menghasilkan angka Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Angka Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh oleh masing-masing Unit Penyelenggara Pelayanan kemudian diakumulasi menjadi angka untuk Indeks Pelayanan Publik (IPP).

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Ada 9 (Sembilan) unsur yang dinilai dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat yaitu:

1. Persyaratan,
2. Prosedur,
3. Waktu penyelesaian,
4. Biaya/tarif,
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan,
6. Kompetensi pelaksana pelayanan,
7. Perilaku pelaksana.
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan.
9. Kondisi sarana dan prasarana pelayanan.





Untuk mendapatkan angka Indeks Pelayanan Publik, Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Survei ini dilakukan oleh 3 (tiga) Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP) Utama yaitu: (1). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, (2). Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan (3). Rumah Sakit Umum Daerah Batara Siang.

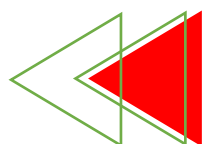
Hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada 3 (tiga) Unit Penyelenggara Pelayanan tersebut menghasilkan Indeks Kepuasan Masyarakat sebagaimana pada table berikut ini.

Tabel 14
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pada 5 (lima) Unit Pelayanan Publik

No	Unit Layanan	Nilai IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Pelayanan
1	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	87,87	B	Baik
2	Dinas Penanaman Modal & PTSP	91,31	B	Baik
3	RSUD Batara Siang	78,44	B	Baik
4	Dinas Pendidikan	84,37	B	Baik
5	Dinas Sosial	91,28	B	Baik
	Nilai Rata-Rata	83,06	B	Baik

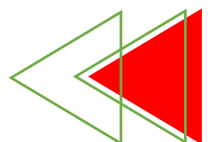
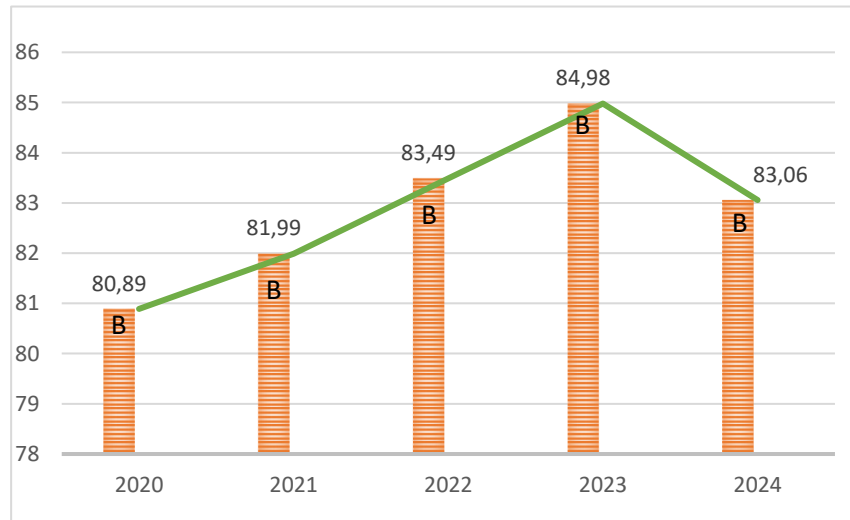
Tabel 15
Pencapaian Sasaran Strategis: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar dan Pelayanan Publik Lainnya

Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Tahun 2024			Target Akhir RPJMD (2026)	Capaian 2024 Terhadap Target Akhir RPJMD (%)
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)		
Indeks Pelayanan Publik	84,98	80,73	83,06	102,88 %	81,55	102,95 %





Grafik 7
Capaian Indeks Pelayanan Publik s/d Tahun 2024





SASARAN STRATEGIS 4

Terciptanya Inovasi Layanan Publik dan Penggunaan Sistem Informasi Daerah

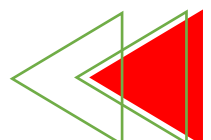
Sasaran strategis ini merupakan upaya untuk mencapai misi : “Memperluas inovasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi”. Indikator kinerja sasaran strategis ini adalah Indeks Inovasi Daerah.

Inovasi Daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Penilaian Inovasi Daerah Kabupaten dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi. Penilaiannya didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.

Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mempertegas komitmen terkait perluasan pelaksanaan inovasi dengan menerbitkan regulasi tentang Inovasi melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Inovasi.

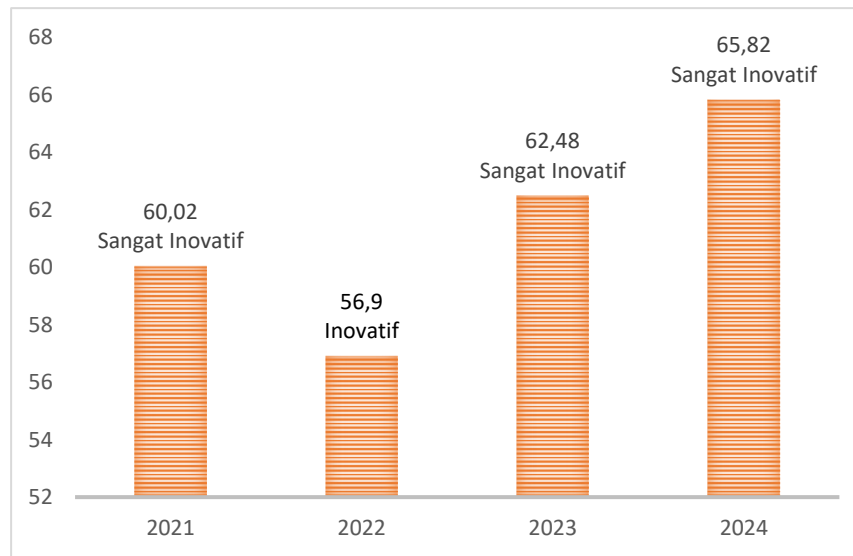
Tabel 16
Pencapaian Sasaran Strategis: Terciptanya Inovasi Layanan Publik dan Penggunaan Sistem Informasi Daerah

Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Tahun 2024			Target Akhir RPJMD (2026)	Capaian 2024 Terhadap Target Akhir RPJMD (%)
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)		
Indeks Inovasi Daerah	62,48 (Sangat Inovatif)	63,09	65,82 (Sangat Inovatif)	104,33	2594	

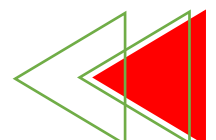


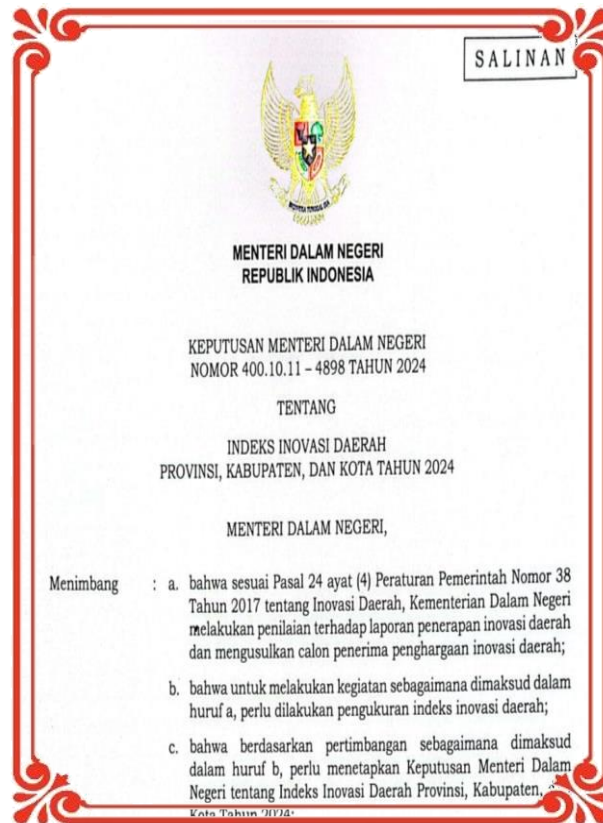


Grafik 8
Perembangan Capaian Inovasi Daerah



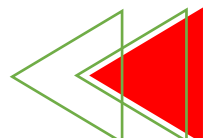
Penganugerahan Innovative Government Award (IGA) 2024





-3-

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Predikat
38	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	67,41	Sangat Inovatif
39	Kabupaten Malang	67,20	Sangat Inovatif
40	Kabupaten Aceh Jaya	67,14	Sangat Inovatif
41	Kabupaten Bangka Tengah	66,54	Sangat Inovatif
42	Kabupaten Pesawaran	66,51	Sangat Inovatif
43	Kabupaten Bandung	65,89	Sangat Inovatif
44	Kabupaten Sumba Timur	65,84	Sangat Inovatif
45	Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan	65,82	Sangat Inovatif
46	Kabupaten Pelalawan	65,70	Sangat Inovatif
47	Kabupaten Grobogan	65,48	Sangat Inovatif
48	Kabupaten Sukabumi	64,82	Sangat Inovatif





Tujuan Ke-3

Meningkatkan produktivitas perekonomian yang merata dan berkeadilan

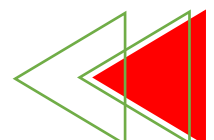
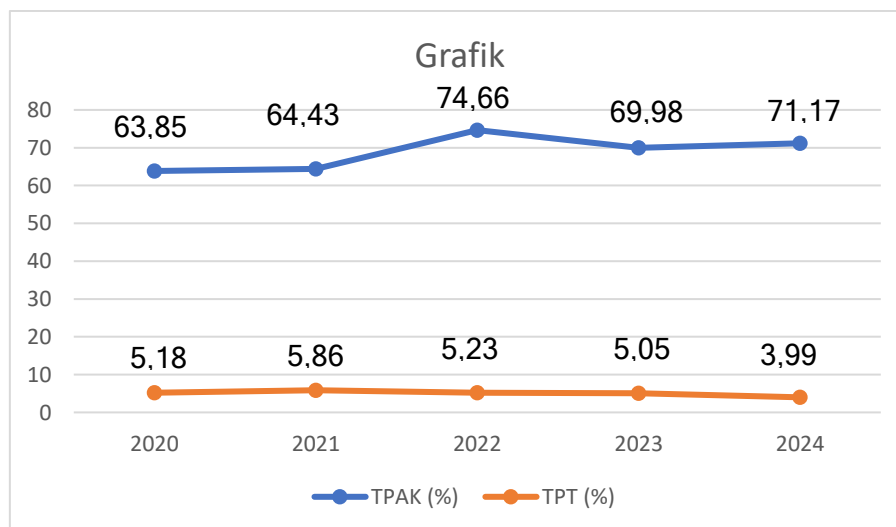
SASARAN STRATEGIS 5

Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja

Tabel 17
Capaian Sasaran Strategis 5: Meningkatnya penyerapan tenaga kerja.

Indikator Kinerja Utama	Capaian 2023	2024			Target Akhir RPJMD (2026)	Capaian s/d 2024 terhadap 2026 (%)
		Target	Realisasi	% Realiasi		
Tingkat Pengangguran Terbuka	5,05	4,75	3,99	116,00 %	4,37	91,30%

Grafik 9
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kab. Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024





Tabel 18
Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu
di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan , 2020 – 2024

Kegiatan Utama (1)	Tahun				
	2020 (2)	2021 (3)	2022 (4)	2023 (5)	2024 (6)
Angkatan Kerja	161.910	165.108	193.279	188.189	194.139
Bekerja	153.521	155.435	183.176	178.680	186.391
Tidak Bekerja	8.389	9.673	10.103	9.509	7.748
Bukan Angkatan Kerja	91.649	91.135	65.608	80.711	78.634
Jumlah	253.559	256.243	258.887	268.900	272.773
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	63,85	64,43	74,66	69,98	71,17
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	5,18	5,86	5,23	5,05	3,99

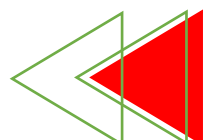
Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus, 2020-2024

Diagram
Kontribusi Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2022-2024



Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pangkep 2024 menurun drastis dari angka 5,05 persen pada 2023 lalu menjadi 3,99 persen. Penurunan angka hingga 1,06 persen sesuai data BPS per Agustus 2024 ini melampaui daerah tetangga seperti Maros yang bertengger di angka 4,34 persen dan Kabupaten Barru di angka 6,42 persen.

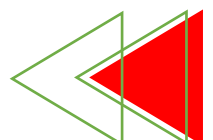
pencapaian itu tak lepas dari keberadaan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Pangkep yang mendukung Program Rumah Siap Kerja. Program ini bukan hanya menyasar masyarakat di kota tetapi juga di wilayah kepulauan dan pegunungan. Program lain adalah melalui Job Fair yang bertujuan mempertemukan





antara pencari kerja dan penyedia lapangan kerja. Hasil Job Fair ini dilakukan penelusuran antara jumlah pencari kerja dengan yang terserap. "Sehingga kita telah memiliki data base ketenagakerjaan.

program pemberian bantuan peralatan UMKM melalui Dinas Koperasi, UMKM dan Perindag yang setiap tahun anggarannya mencapai Rp2 miliar sudah berbasis rumah siap kerja. Didasarkan pada masyarakat yang telah mendapatkan pelatihan dan memiliki NIB yang difasilitasi DPMPTSP secara gratis, sehingga penyaluran peralatan UMKM tepat sasaran dan tepat manfaat.





SASARAN STRATEGIS 6

Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat

Tabel 19
Capaian Sasaran Strategis 6: Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat.

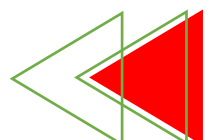
Indikator Kinerja Utama	Capaian 2023	2024			Target Akhir RPJMD (2026)	Capaian s/d 2024 terhadap 2026 (%)
		Target	Realisasi	% Realiasi		
Tingkat Kemiskinan	13,4	11,13	12,41	88,50	9,83	73,75
PDRB/kapita	86,74	76,82	91,86	119,57	77,45	111,99
Rasio Gini	0,334	0,325	0,334	97,30	0,300	89,82
Capaian Kinerja sasaran Strategis					104,23	

1) Angka Kemiskinan

Capaian angka kemiskinan sebesar **88,50** persen, sehingga dapat dikategorikan Sangat Berhasil. Pada tahun 2024 persentase angka kemiskinan ditargetkan sebesar 11,13 persen terealisasi sebesar 12,41 persen. Jumlah ini menurun 0,99 % dari tahun 2023 (sebesar 13,40 persen). Indeks kedalaman Kemiskinan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2024 berada pada angka 1,78, meningkat dari tahun 2023. Artinya jarak antara pengeluaran masyarakat miskin makin besar dari garis kemiskinan. Selain itu, indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tahun 2024 berada pada angka 0,38 meningkat dari tahun 2023.

2) PDRB Per Kapita

PDRB per kapita adalah cerminan berjalannya aktivitas perekonomian di suatu wilayah. Capaian PDRB Per Kapita Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebesar 119,57 persen, sehingga dapat dikategorikan Sangat Berhasil. Pada tahun 2023 nilai PDRB Perkapita Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ditargetkan sebesar 76,82 juta dan terealisasi sebesar 91,86 juta. Hal tersebut menunjukkan bahwa aktifitas ekonomi Masyarakat kabupaten Pangkep berjalan. Berjalannya kegiatan ekonomi meningkatkan kemakmuran masyarakatnya dan ini tercermin dari Pendapatan Domestik Regional Bruto per Kapita. PDRB per kapita yang semakin meningkat mengindikasikan kesejahteraan di wilayah tersebut.



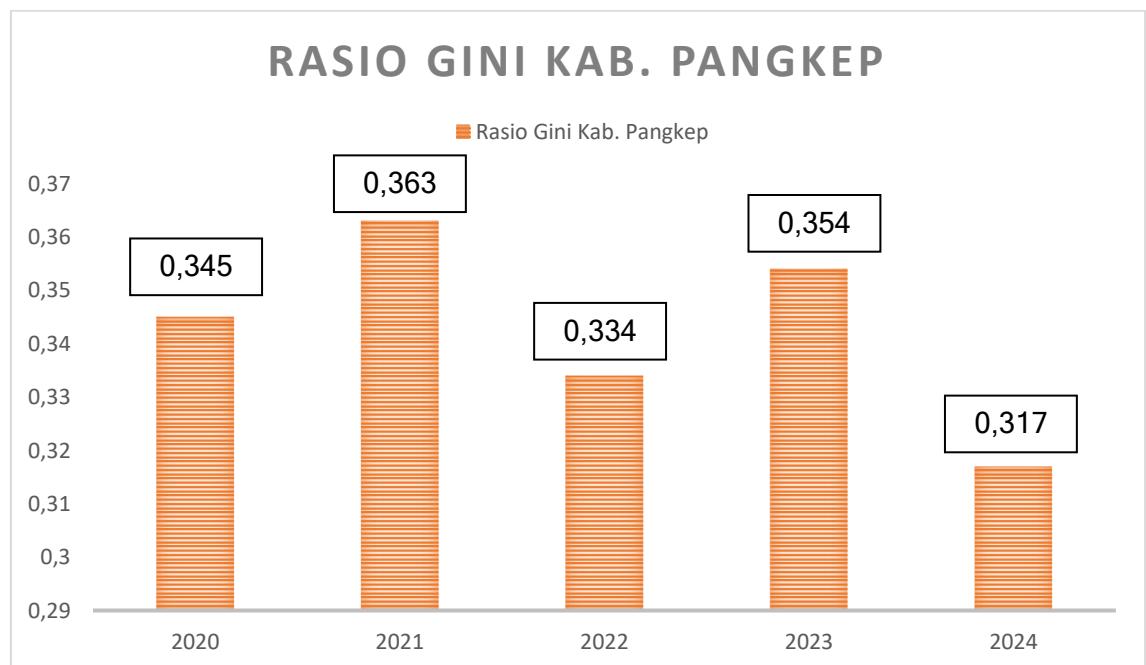


3) Rasio Gini

Rasio gini atau Gini ratio adalah ukuran tingkat ketimpangan pembagian pendapatan antar penduduk suatu wilayah. Nilai rasio gini berkisar antara 0 sampai 1. Semakin mendekati 1, maka tingkat ketimpangan pendapatan semakin tinggi. Semakin mendekati 0 maka tingkat ketimpangan pendapatan semakin rendah.

Rasio gini Kabupaten Pangkep tahun 2024 sebesar 0,317. Menurun dibandingkan tahun 2023 yaitu 0,354. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan terhadap kondisi ketimpangan pendapatan penduduk di Kabupaten Pangkep.

Grafik 10
Perbandingan Rasio Gini Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan,
Tahun 2020-2024

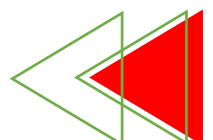


Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

1. Kemiskinan

a. Jumlah Penduduk Miskin

Garis kemiskinan menggambarkan batas minimum pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan, yang memisahkan seseorang tergolong miskin atau tidak. Dengan kata lain, kemiskinan merupakan keadaan ketidakmampuan untuk memenuhi

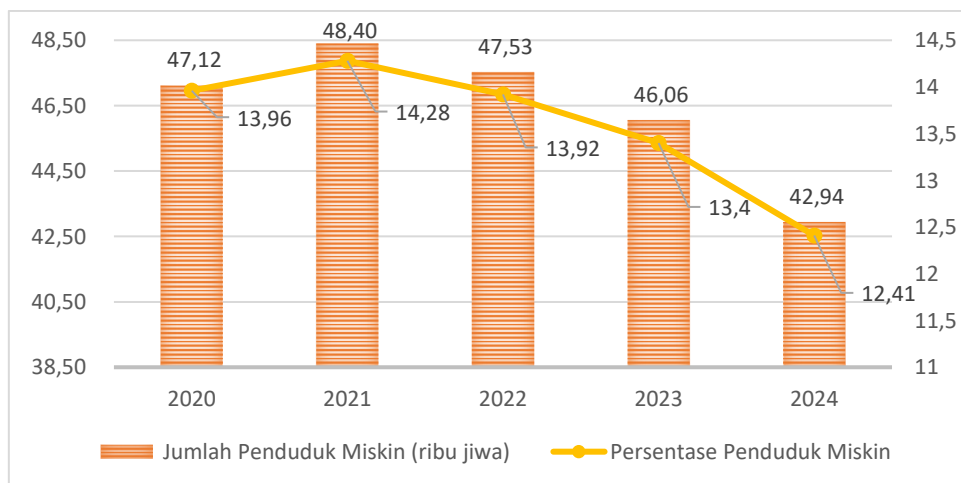




kebutuhan dasar yaitu makanan, pakaian, rumah tinggal, pendidikan dan kesehatan. Angka Kemiskinan merupakan Indikator Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, mendukung Tujuan ke-1 yaitu “mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun”.

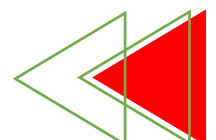
Selama periode tahun 2024, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berkurang sebanyak 3,124 ribu jiwa, dari 46,06 ribu jiwa pada tahun 2023 menjadi 42,94 ribu jiwa pada tahun 2024. Berdasarkan persentase penduduk miskin di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam rentang waktu satu tahun, jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 0,99 persen poin, dari 13,4 persen pada tahun 2023 menjadi 12,41 persen pada tahun 2024. Perkembangan penduduk miskin di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terlihat sebagaimana grafik sebagai berikut :

Grafik 11
Perkembangan Penduduk Miskin Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2020-2024



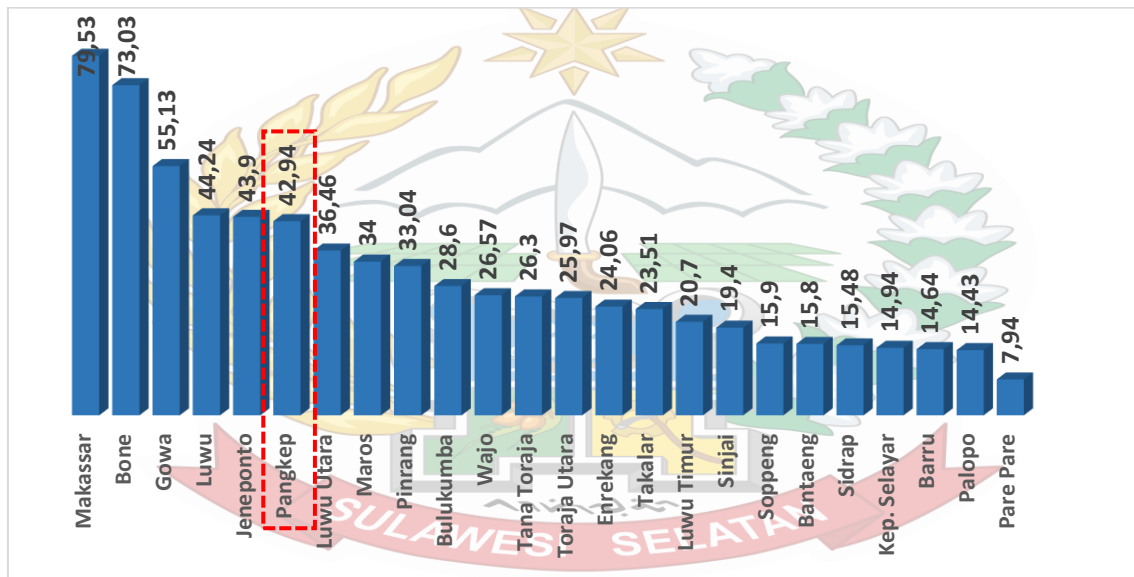
Sumber : BPS Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2025.

Berdasarkan kemiskinan absolutnya atau jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berada di peringkat ke enam untuk jumlah penduduk miskin. Peringkat kemiskinan absolut Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tetap sama dengan tahun 2024.





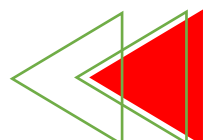
Grafik 12
Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa) Menurut Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan Tahun 2024



Sumber: BPS Sulawesi Selatan, 2025

Beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan selama periode tahun 2024 antara lain adalah:

- Intervensi Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam Mengurangi Beban Pengeluaran:** Perlengkapan peserta didik gratis, Pelayanan Kesehatan perorangan dan Masyarakat, Program bantuan sosial, Beasiswa bagi Masyarakat kurang mampu.
- Intervensi Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada dalam Meningkatkan Pendapatan:** Bantuan pengembangan ekonomi masyarakat, pelatihan tenaga kerja, Job Fair, penguatan sektor pengembangan UMKM serta sektor perikanan dan pertanian berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan.
- Intervensi Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada Peningkatan Infrastruktur:** Peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

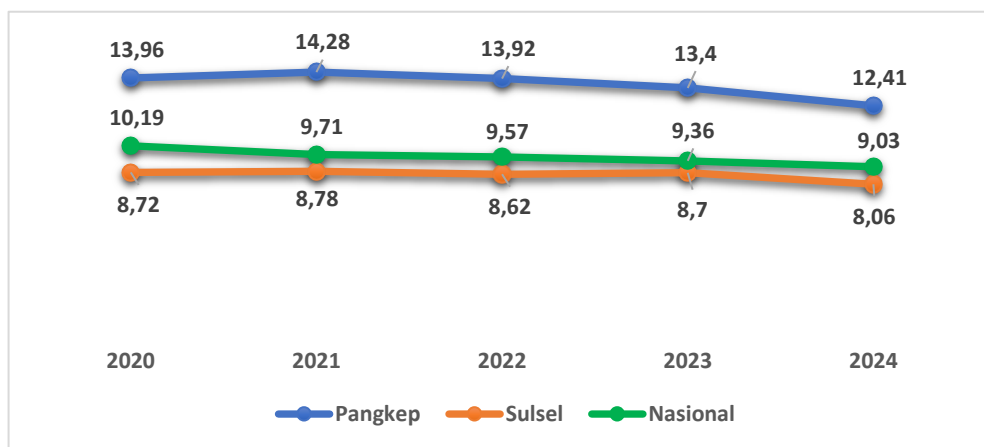




b. Presentase Penduduk Miskin (P0)

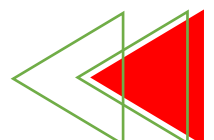
Persentase penduduk miskin di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan selama lima tahun terakhir (2020-2024) menunjukkan angka yang fluktuatif. Pada tahun 2020 persentase penduduk miskin sebesar 13,96%. Sedangkan pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 14,28% dan kembali terjadi penurunan di tahun 2023 sebesar 13,40%, hingga di tahun 2024 sebesar 12,41% sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 13
Persentase Penduduk Miskin (P0) Pangkep, Sulsel dan Nasional
Tahun 2020-2024



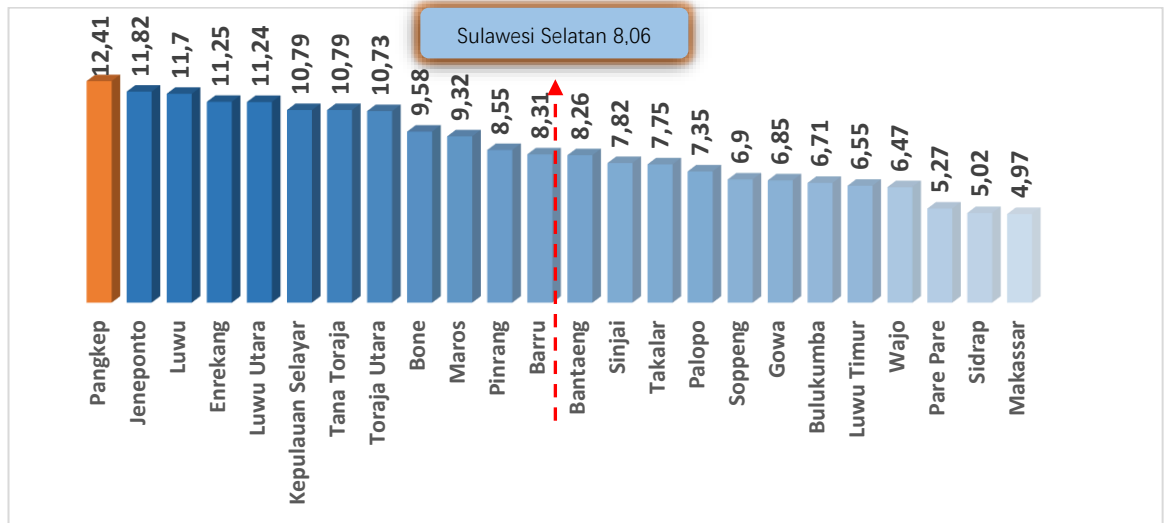
Sumber: BPS Sulawesi Selatan, 2025

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan merupakan salah satu daerah di Sulawesi Selatan dengan angka kemiskinan diatas 10 persen. Jika dibandingkan persentase penduduk miskin Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan Kabupaten/Kota lain di Propinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2024, maka persentase penduduk miskin masih berada pada urutan pertama, sebagaimana terlihat pada grafik di bawah.





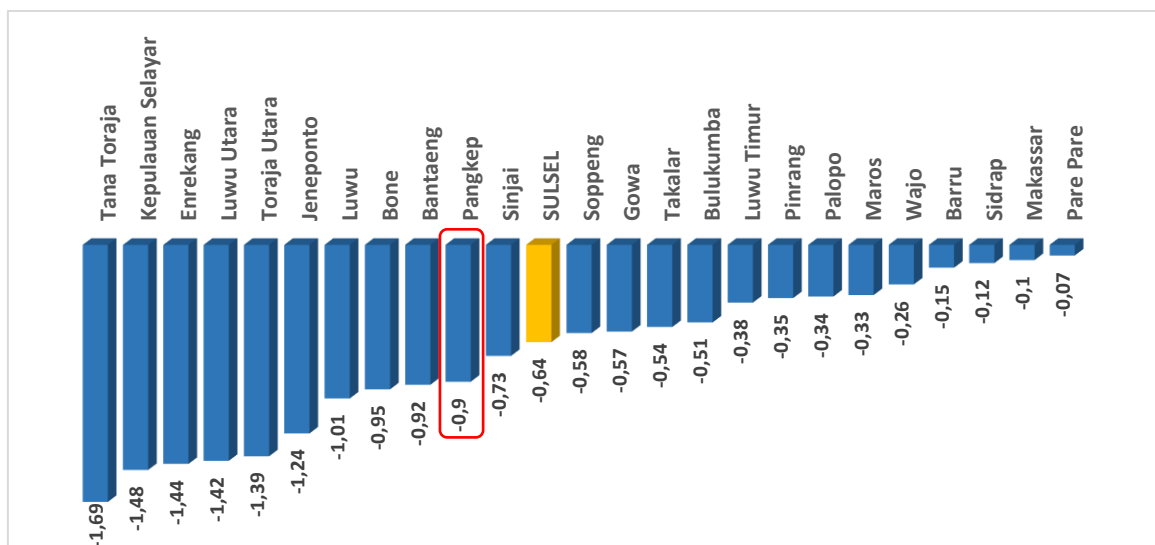
Grafik 14
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan Tahun 2024



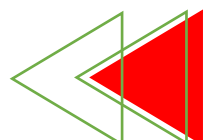
Sumber: BPS Sulawesi Selatan, 2025

Berikut disajikan perubahan persentase penduduk miskin Kabupaten/Kota dan perubahannya dapat dilihat pada grafik di bawah ini yang mana Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan merupakan salah satu Kabupaten/Kota yang memiliki perubahan persentase penduduk miskin yang lebih baik dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan.

Grafik 15
Perubahan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan Tahun 2024



Sumber: BPS Sulawesi Selatan, 2025



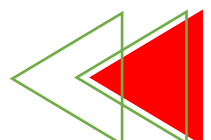


c. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Penanggulangan kemiskinan bukan hanya menargetkan penurunan tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin tetapi lebih dari itu yang terpenting adalah bagaimana mengatasi kedalaman kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) adalah indikator yang menunjukkan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan.

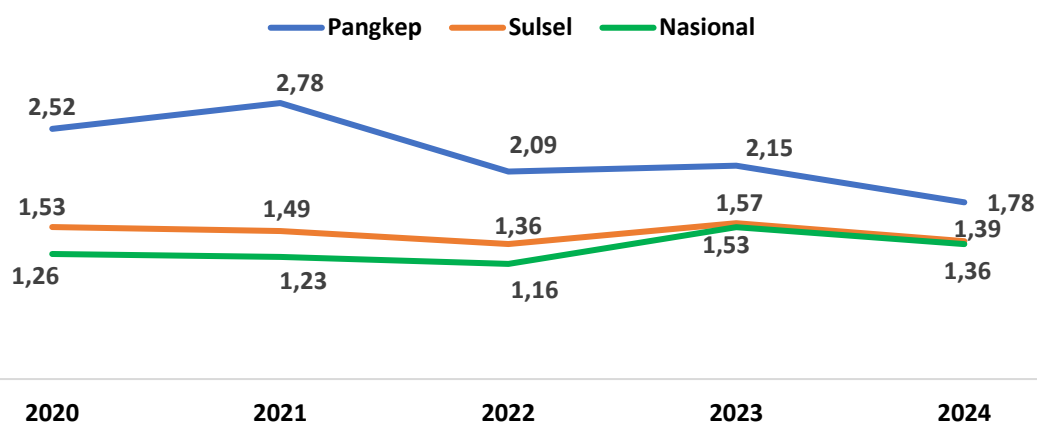
Kondisi Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan selama kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024 menunjukkan tren berfluktuatif yang cenderung menurun. Pada tahun 2020 nilai P1 sebesar 2,52 kemudian meningkat sebesar 2,78 pada tahun 2021 dan menurun sebesar 2,09 pada tahun 2022. Selanjutnya pada tahun 2023 terjadi kenaikan menjadi sebesar 2,15 dan kembali turun dengan nilai P1 sebesar 1,78 pada tahun 2024.

Walaupun Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berfluktuatif namun masih bisa dikatakan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk jauh dari kemiskinan. Secara umum, nilai P1 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan masih lebih tinggi dibandingkan dengan nilai P1 Propinsi Sulawesi Selatan dengan nilai sebesar 1,38 dan P1 Nasional sebesar 1,36. Dengan demikian dapat diketahui bahwa rata-rata pengeluaran penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan masih lebih baik dibandingkan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional.





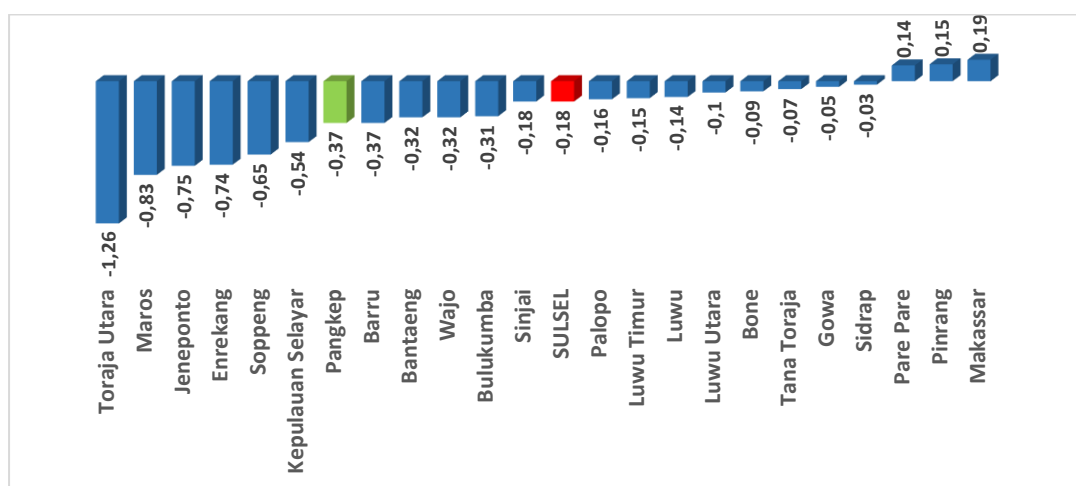
Grafik 16
Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1) Pangkep, Sulawesi Selatan dan Nasional
Tahun 2020-2024



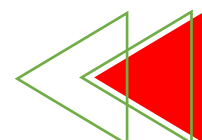
Sumber: BPS Sulawesi Selatan, 2025

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan merupakan salah satu Kabupaten/Kota yang memiliki perubahan tingkat kedalaman kemiskinan di Sulawesi Selatan sebagaimana pada grafik di bawah ini.

Grafik 17
Perubahan Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2024



Sumber: BPS Sulawesi Selatan, 2025



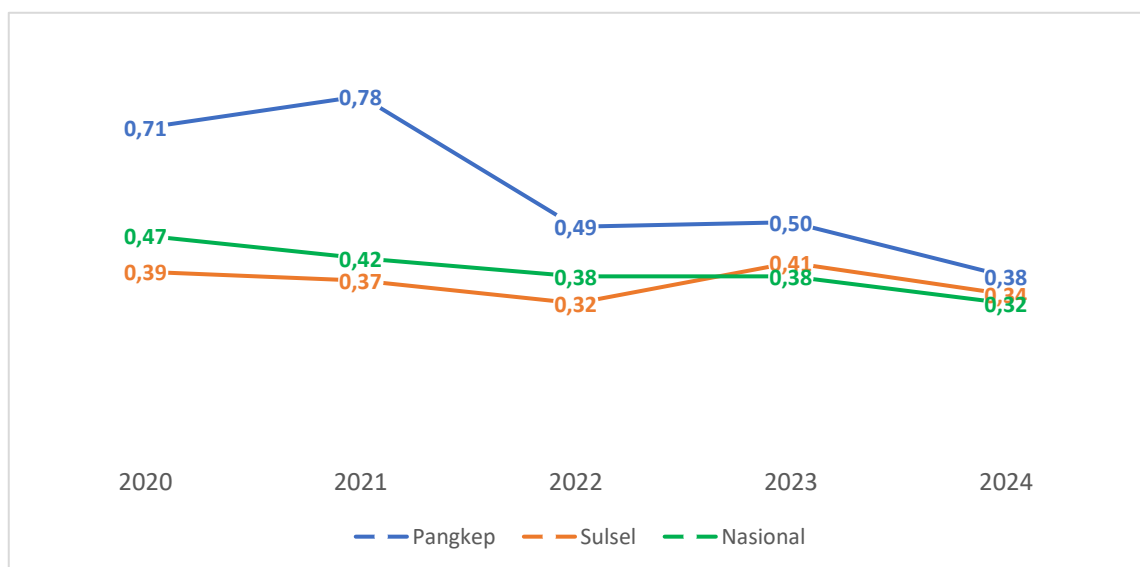


d. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) adalah indikator yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

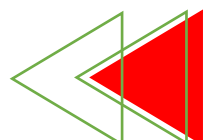
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami perkembangan yang fluktuatif yaitu pada tahun 2020 sebesar 0,71 dan mengalami kenaikan di tahun 2021 sebesar 0,78 dan menurun di tahun 2022 menjadi 0,50. Di tahun 2023 naik menjadi 0,50 dan di tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 0,38. Masih di bawah Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 0,34 dan Nasional sebesar 0,38.

Grafik 18
Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2) Pangkep, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024



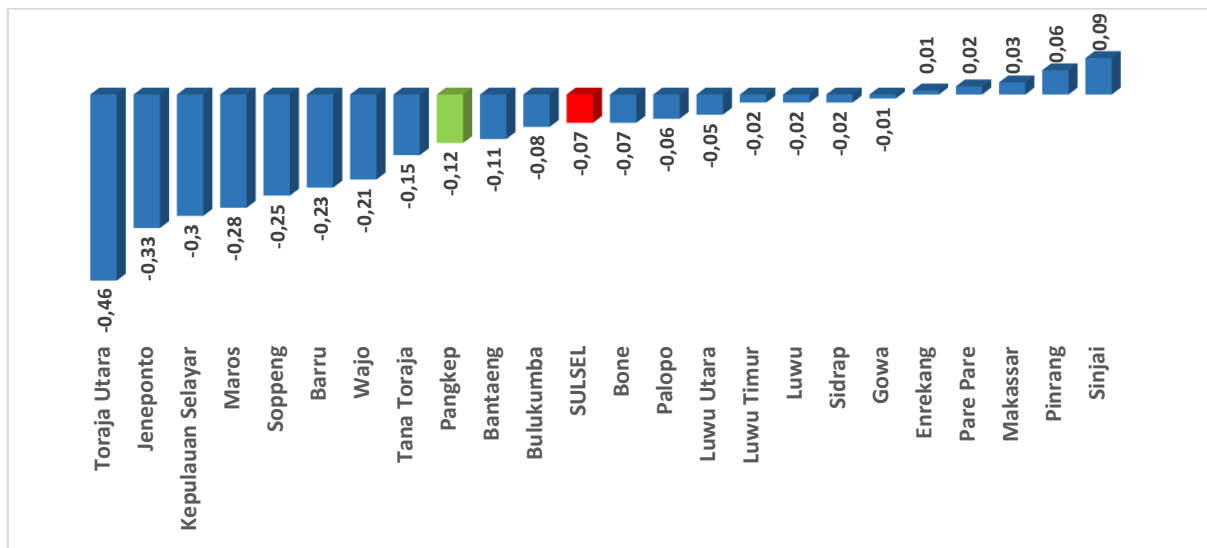
Sumber: BPS Sulawesi Selatan, 2025

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan merupakan salah satu Kabupaten/Kota yang memiliki perubahan tingkat keparahan kemiskinan di Sulawesi Selatan sebagaimana pada grafik di bawah ini.





Grafik 19
Perubahan Tingkat Keparahatan Kemiskinan (P2) Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2024

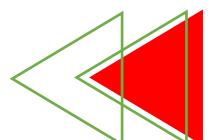


Sumber: BPS Sulawesi Selatan, 2025

e. Garis Kemiskinan

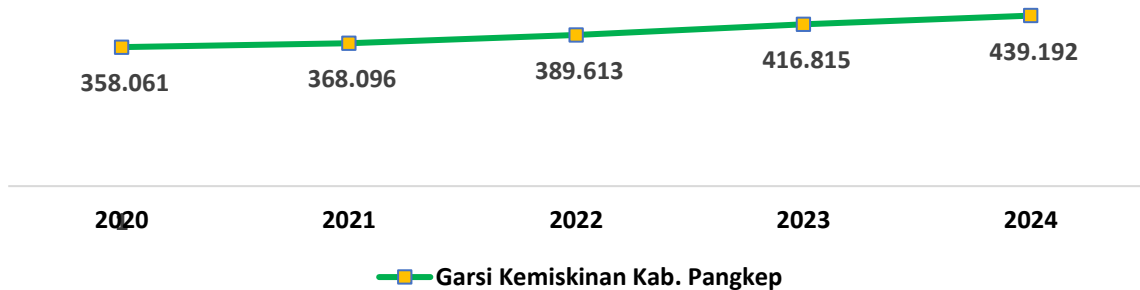
Garis kemiskinan atau batas kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu daerah atau wilayah. Garis kemiskinan berguna sebagai perangkat ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur rakyat miskin dan mempertimbangkan pembaharuan sosial-ekonomi.

Perkembangan garis kemiskinan selama kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024 meningkat sangat pesat. Pada tahun 2020 garis kemiskinan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebesar Rp 358.061 perkapita/bulan kemudian meningkat menjadi Rp 439.192 perkapita/bulan pada tahun 2024. Dengan demikian dapat diketahui bahwa terdapat 42.940 jiwa penduduk yang memiliki pendapatan dibawah Rp 439.192 perkapita/bulan (penduduk miskin). Artinya, angka tersebut merupakan batas minimum yang harus dipenuhi seseorang untuk mendapatkan kebutuhan dasarnya sebulan baik kebutuhan makanan maupun non makanan.





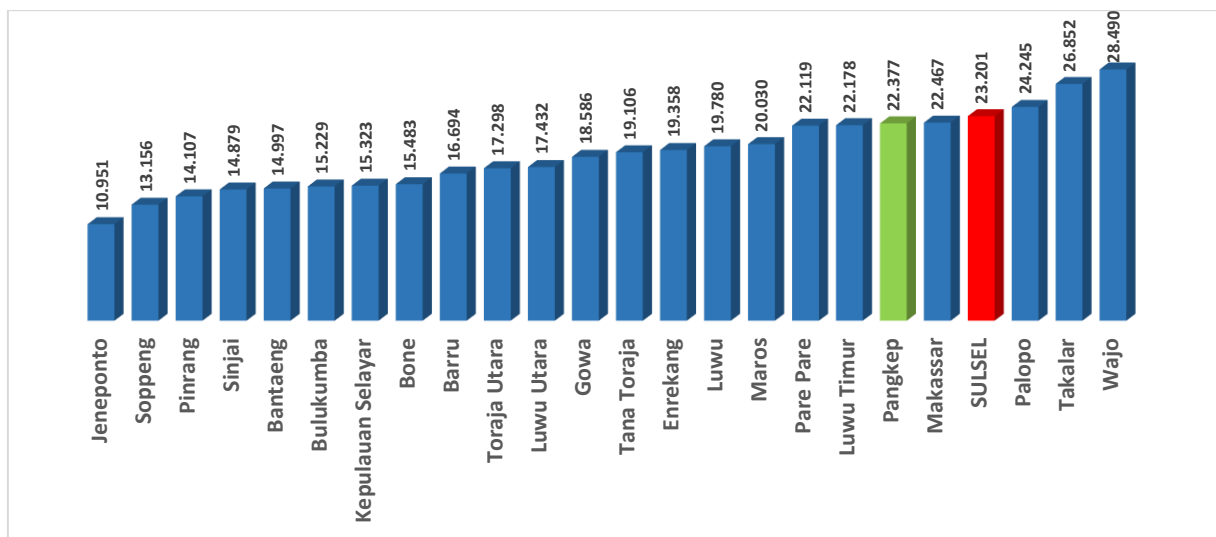
Grafik 20
Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan) Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2024



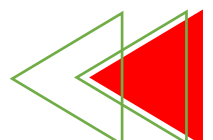
Sumber: BPS Sulawesi Selatan, 2025

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan merupakan salah satu Kabupaten/Kota yang memiliki perubahan Garis Kemiskinan lebih kecil dibandingkan Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana pada grafik di bawah ini.

Grafik 21
Perubahan Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan) Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2024



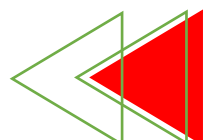
Sumber: BPS Sulawesi Selatan, 2025





Penurunan angka kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menunjukkan bahwa Upaya pemerintah telah sesuai dengan arah kebijakan pengentasan kemiskinan yang didukung melalui 3 (tiga) strategi utama :

1. **Menurunkan beban pengeluaran:** intervensi yang bertujuan untuk mengurangi biaya hidup yang harus ditanggung oleh individu atau keluarga. Intervensi tersebut dicapai melalui program:
 - a. Program Pengelolaan Pendidikan oleh Dinas Pendidikan
 - b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat oleh Dinas Kesehatan
 - c. Program Penanggulangan Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - d. Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Program Penanganan Bencana oleh Dinas Sosial
 - e. Program Hubungan Industrial oleh Dinas Ketenagakerjaan
 - f. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat oleh Dinas Ketahanan Pangan
 - g. Program Pendaftaran Penduduk, Program Pencatatan Sipil, Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Program Pengelolaan Profil Kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - h. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera oleh **Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.**
 - i. Program Pembinaan Perpustakaan oleh Dinas Perpustakaan
 - j. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah





Bantuan Seragam Sekolah Gratis



Program " Si Jagai"



Program Rehabilitasi Sosial



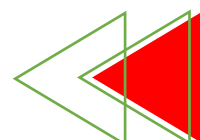
**Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Sistem
Perlindungan Sosial Tenaga Kerja**



Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting



SPP gratis untuk Mahasiswa kurang mampu





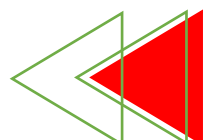
2. **Meningkatkan Pendapatan:** intervensi yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah pendapatan individu atau keluarga. Intervensi tersebut dicapai melalui program:
- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial oleh Dinas Sosial
 - Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga kerja dan Program Penempatan Tenaga Kerja oleh Dinas Ketenagakerjaan
 - Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat oleh Dinas Ketahanan Pangan
 - Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat oleh Dinas Pemberayaan Masyarakat Desa
 - Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro, Program Pengembangan UMKM dan Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, , dan Usaha Mikro (UMKM) oleh Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian
 - Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dan Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan oleh Dinas Perikanan
 - Program Pengedalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian oleh Dinas Pertanian.



Job Fair 2024



Bantuan Ketahanan Pangan



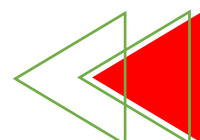


Peningkatan Kapasitas UMKM pada Pengolahan Hasil Perikanan



Penyerahan Bantuan Pemberdayaan UMKM

3. Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan: Intervensi yang mengacu pada usaha atau kebijakan untuk mengurangi dan mengatasi daerah-daerah yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi, yang sering kali disebut sebagai "kantong kemiskinan". Dalam konteks ini, "kantong kemiskinan" merujuk pada wilayah atau area geografis yang memiliki konsentrasi kemiskinan yang sangat tinggi, dengan penduduk yang kurang memiliki akses terhadap sumber daya dan kesempatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka:
 - a. Program pengelolaan Pendidikan (Pembangunan/rehabilitasi Sarana, Prasarana dan utilitas sekolah) oleh Dinas Pendidikan
 - b. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
 - c. Program Penanganan Kerawanan Pangan oleh Dinas Ketapang
 - d. Program Penataan Desa, Program Peningkatan Kerjasama Desa dan Program Administrasi Pemerintahan Desa dan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - e. Program Pengelolaan Pelayaran oleh Dinas Perhubungan
 - f. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian oleh Dinas Pertanian
 - g. Program Pengembangan Perumahan, Program Kawasan Permukiman, Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh, Program Peningkatan





Prasarana dan Sarana dan Utilitas Umum (PSU) oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan

- h. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan oleh Kecamatan



Pembangunan Ruang Kelas Baru



Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Peluang Usaha di Kelurahan



Optimalisasi SPAM



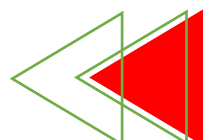
Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni



Rehabilitasi Rumah Korban Bencana



Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal

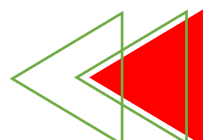




Rehabilitasi Bendungan Irigasi



Pembangunan Jaringan Irigasi





SASARAN STRATEGIS 7

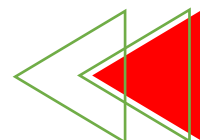
Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah

Dalam pemanfaatan potensi sumberdaya ekonomi perlu didukung dengan ketersediaan infrastruktur penunjang ekonomi diantaranya jalan, jaringan irigasi, ketersediaan air minum secara merata di semua wilayah agar seluruh potensi sumberdaya ekonomi khususnya sektor unggulan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Percepatan pembangunan infrastruktur terutama penunjang ekonomi dan penunjang sektor unggulan lokal seperti pertanian, perikanan dan pariwisata sebagai penopang utama perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur di 2021-2026 akan berfokus pada tiga kerangka utama, yaitu Infrastruktur Pelayanan Dasar, Infrastruktur Ekonomi, dan Infrastruktur Perkotaan, yang juga ditopang dengan pembangunan energi dan ketenagalistrikan, serta pelaksanaan transformasi digital.

Dalam memacu pertumbuhan ekonomi, kebijaksanaan ekonomi harus menganut paradigma baru dimana pemberdayaan ekonomi rakyat harus menjadi perhatian utama. Karena sebagian besar di daerah pedesaan rakyat hidup pada sektor pertanian, perikanan dan unggulan lokal kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan sektor ini masih memberikan kontribusi yang besar pada perekonomian daerah, maka pemberdayaan ekonomi rakyat juga berarti membangun ekonomi pedesaan dengan lebih baik. Pembangunan industri harus memperhatikan keterkaitan kebelakang (backward linkage) dengan sektor pertanian atau sektor primer sedangkan keterkaitan kedepan (forward linkage) harus memperhatikan pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah dan pemasaran yang baik sehingga produk yang dihasilkan tidak sia-sia yaitu dengan membuka akses pada daerah terisolir dan daerah-daerah yang memiliki potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan serta mengembangkan konektivitas antara daerah tersebut dengan pusat pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan sarana dan prasarana transportasi darat dan laut.

Pembangunan infrastruktur akan berhasil optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat kelompok terendah dan



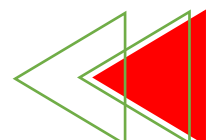


mempersempit kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin, manakala pemerintah mampu memetakan kebutuhan masyarakat dalam menjalankan roda kegiatan ekonomi, terutama di daerah. Hal ini disebabkan setiap daerah memiliki keunggulan masing-masing, baik dari sisi kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kapasitas institusi. Pemetaan kebutuhan di tiap daerah itu perlu dilakukan guna menentukan jenis infrastruktur yang diperlukan, seperti kebutuhan jalan, jembatan, pasar, perbankan, pelabuhan, irigasi, dan listrik.

Penyediaan jenis infrastruktur yang tepat tidak hanya akan mengurangi ketimpangan, tapi juga dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan usaha serta kesempatan kerja. Sejatinya, pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan lingkaran kemakmuran.

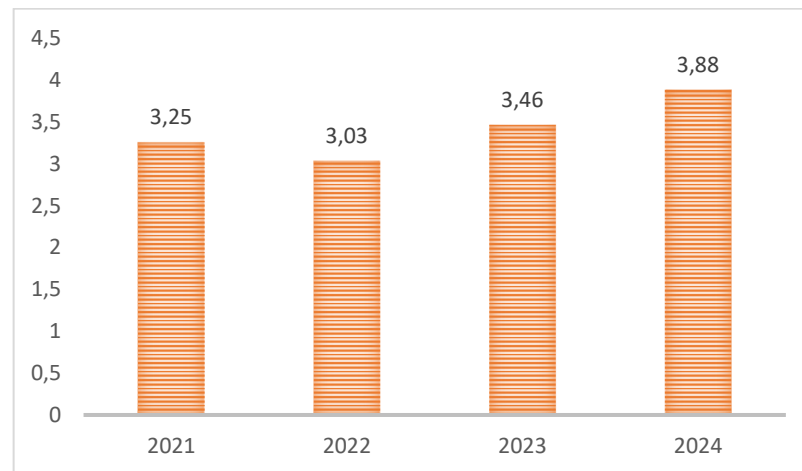
Penyediaan infrastruktur yang memadai dengan melakukan pembangunan baru maupun rehabilitasi guna mendukung aktifitas perekonomian, pariwisata, dan pengembangan wilayah terpencil maupun wilayah perbatasan merupakan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan daya saing daerah. Dimana kualitas pembangunan daerah salah satunya didorong oleh pembangunan infrastruktur, karena kondisi infrastruktur yang baik merupakan faktor utama/penggerak dalam pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, pembangunan infrastruktur diorientasikan untuk pemenuhan infrastruktur dasar yang berkualitas guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan kelancaran aktivitas masyarakat untuk meningkatkan daya ekonomi dan kelancaran aktivitas masyarakat untuk meningkatkan daya saing daerah. Tujuan dari pembangunan infrastruktur ini adalah agar seluruh wilayah kabupaten dapat terakses secara baik sehingga sumber-sumber ekonomi dan modal sosial lainnya dapat berjalan dengan baik dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing daerah. Dalam meningkatkan kualitas pembangunan maka seluruh kegiatan yang akan dilakukan selama lima tahun mendatang dituangkan dalam dokumen RPJMD dimana pembangunan di tahun 2024 ini merupakan realisasi perencanaan ditahun ke empat yang seyogyanya sudah mendekati tahap akhir pembangunan di periode RPJMD tahun 2021 -2026.

Grafik peningkatan Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah selama 4 (Empat) Tahun terakhir dapat dilihat di bawah ini:





Grafik 22
Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah selama 4 (Empat) Tahun terakhir



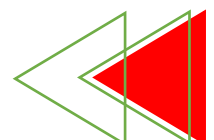
Pencapaian indikator kinerja pada sasaran strategis 7 *Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah*, dengan beberapa indikator diantaranya :

Tabel 20
Hasil Perhitungan Indeks Infrastruktur Untuk Setiap Aspek, Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2024	REALISASI 2024
1	Persentase jalan kabupaten kondisi mantap	76%	57%
2	Persentase Saluran irigasi dan drainase dalam kondisi baik	63%	55%
3	Persentase sarana dasar permukiman	48%	60%
4	Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	19%	19%
5	Persentase fasilitas pendidikan dalam kondisi baik	86%	94%
6	Persentase fasilitas kesehatan dalam kondisi baik	100%	84%
Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah		3,32	3,88

Sumber Data : Laporan Hasil Pengukuran Indeks Infrastruktur

Berdasarkan tabel diatas pencapaian kinerja sasaran strategis 7 *Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah* ada 5 (lima) Perangkat Daerah yang mendukung sasaran strategis tersebut dalam RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2024, yaitu :



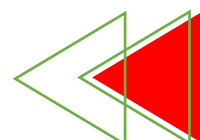


Tabel 21
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 7 pada Perangkat Daerah Terkait

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	DINAS YANG BERTANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Publik, Sarana dan Prasarana yang Berkualitas	Persentase jalan kabupaten kondisi mantap Persentase Saluran irigasi dan drainase dalam kondisi baik	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2.	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman beserta Infrastruktur Pendukungnya	Persentase sarana dasar permukiman	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
3	Meningkatnya Kualitas Prasarana, Sarana dan Fasilitas Perhubungan yang representatif dan menunjang keamanan dan keselamatan lalu lintas	Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	Dinas Perhubungan
4.	Meningkatnya Sarana , Prasarana dan Utilitas Sekolah	Persentase fasilitas pendidikan dalam kondisi baik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kesehatan beserta pendukungnya	Persentase fasilitas kesehatan dalam kondisi baik	Dinas Kesehatan

Indeks pengukuran infrastruktur mengukur secara agregat dari beberapa jenis infrastruktur yang antara lain meliputi jalan dan jembatan, bendungan, pasar, rusunawa dan jalan kereta api. Manfaat dari pengukuran indeks infrastruktur ini adalah untuk mengetahui tingkat ketersediaan, kelayakan, dan pelayanan dari pembangunan infrastruktur yang ada di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Indeks Infrastruktur Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tahun 2024 mencapai 3,88 dari target 3,32 atau capaian 116,87%. Apabila dibanding dengan capaian tahun 2023 yaitu 3,46 maka terdapat peningkatan 0,42 poin. Berikut perkembangan Indeks Infrastruktur di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan:

Berdasarkan tabel Nilai Pencapaian *sasaran strategis* 7, dapat diketahui bahwa mutu pelayanan infrastruktur gabungan dari 5 (lima) Perangkat Daerah di Kabupaten Pangkajene dan kepulauan secara umum berada pada kategori “B”. Adapun keberhasilan Kabupaten dari segi infrastruktur dapat dijelaskan sebagai berikut :





Tabel 22
Analisa Capaian Indikator
"Persentase Panjang Jalan dengan Kondisi Mantap"

No.	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Persentase panjang jalan dengan kondisi mantap	76,65	57,31	74,77

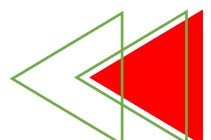
Sumber Data : Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pangkajene

1. Capaian kinerja dari indikator "persentase panjang jalan dalam kondisi mantap" pada tahun 2023 sebesar **545,08 km** sedangkan capaian pada tahun 2023 sebesar **500,54 km**. Artinya terjadi penurunan capaian sebesar **44,54 km**. Pada tahun 2024, target panjang jalan dalam kondisi mantap sebesar **76,65%** dengan realisasi **57,31%** atau capaian sebesar **74,77%**.



Adapun faktor penghambat terjadinya penurunan capaian kinerja antara lain :

- a. Bertambahnya jumlah ruas jalan sehingga Panjang jalan ikut bertambah. Dimana nilai pembagi yang merupakan jumlah keseluruhan jalan bertambah mengakibatkan berkurangnya capaian kinerja kondisi jalan mantap. Perlu diketahui tahun 2022 SK Jalan Nomor 695 Tahun 2017 *Panjang Jalan Kabupaten hanya 818,512 km* dan tahun 2023 ini *Panjang Jalan Kabupaten* bertambah menjadi **873,394 km** sesuai dengan revisi SK JALAN Nomor 448 Tahun 2023 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut statusnya sebagai jalan kabupaten di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
- b. Masih rendahnya biaya pemeliharaan rutin jalan yang dianggarkan tiap tahunnya,
- c. Adanya beberapa pekerjaan ruas jalan yang membutuhkan penangan skala





- prioritas yang mana ruas jalan tersebut adalah ruas jalan desa dan jalan non status yang juga mempengaruhi capaian kinerja dari indikator tersebut,
- d. Dampak Pembangunan Rel Kereta yang ada di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Dimana dalam pembangunannya banyak ruas jalan yang rusak akibat tonase yang berlebih serta intensitas transportasi material yang cukup tinggi melalui beberapa ruas jalan Kabupaten,
 - e. Menurunnya kondisi jalan dari tahun sebelumnya dimana sebagian jalan kabupaten yang rusak akibat umur kondisi jalan yang telah mencapai usia,
 - f. Faktor alam juga menjadi salah satu penyebab kerusakan di beberapa ruas jalan seperti banjir dan tanah longsor.

Tabel 23
Perbandingan Capaian Berdasarkan Jenis Pekerjaan Jalan
Antara Tahun 2023 dan Tahun 2024

PERBANDINGAN CAPAIAN		
Jenis Pekerjaan Jalan	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024
A S P A L	21,63 Km	21,63 Km
B E T O N	16,07 Km	16,07 Km
PERKERASAN	5,24 Km	5,24 Km

Sumber Data : Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2024

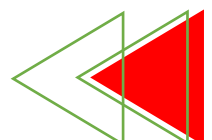
Tabel 24
Analisa Capaian Indikator
"Persentase Saluran Irigasi dan Drainase Dalam Kondisi Baik"

No.	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Persentase Saluran irigasi dan drainase dalam kondisi baik	63,70	55,95	87,83

Sumber Data : Bidang Pengelola Sumber Daya Air dan Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2024

Pada tahun 2024 target dari *Persentase Saluran irigasi dan drainase dalam kondisi baik* sebesar 63,70%, realisasi 55,95% dengan capaian sebesar 87,83%. Pada indikator ini tidak mencapai target dikarenakan program yang mendukung indikator tersebut ada 2 diantaranya :

1. Program Pengelolaan Sistem Drainase di tahun 2024 ini difokuskan dalam pengendalian dan pengurangan genangan banjir dalam kota dengan melakukan

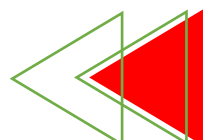




perbaikan drainase perkotaan yang terpusat pada kawasan perkotaan, namun masih adanya beberapa titik rawan genangan banjir dan masih memerlukan anggaran yang cukup besar dalam penanganan drainase pada kawasan - kawasan pusat kota dikarenakan terdapat daerah baru yang mempengaruhi persentase penanganan drainase pada kawasan - kawasan pusat kota yang belum diidentifikasi pada saat rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ini disusun.



2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dimana tahun ini masih memprioritaskan atau difokuskan untuk menangani *penanggulangan bencana abrasi pantai* dan pekerjaan *saluran pembuang* dengan jalur pembuang yang terhubung ke Sungai Pangkajene.





Tabel 25
Analisa Capaian Indikator
“Persentase Sarana Dasar Permukiman”

No.	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Persentase sarana dasar permukiman	48,39	60,34	124,71

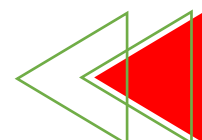
Sumber Data : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Pangkajene dan Kepulauan 2024

Pencapaian pada indikator “Persentase Sarana Dasar Permukiman” dengan didukung oleh beberapa faktor diantaranya :

1. Program Kawasan Permukiman dengan kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha. Formula perhitungan penanganan kumuh dari tahun 2021 sampai pada tahun 2024 sesuai SK Bupati tentang Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2021 luas kawasan kumuh di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah **111,53 Ha** namun yang menjadi kewenangan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan hanya seluas **52,67 Ha** sisanya merupakan kewenangan Provinsi dan Nasional karena luasan mencapai lebih dari **10 Ha** dan yang menjadi kewenangan kabupaten seluas **50,67 Ha**. Ditahun 2024 luas Kawasan permukiman kumuh yang ditangani oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan seluas **14,88 Ha** dan mengalami peningkatan dibandingkan capaian di tahun 2023 seluas **9,01 Ha**. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan aktif melaksanakan baik secara formal maupun non formal pertemuan untuk berkoordinasi dengan berbagai instansi pemerintah dan non pemerintah seperti Baznas, LSM, Perusahaan-perusahaan untuk berkolaborasi dalam penanganan kawasan kumuh.

Adapun faktor pendukung tercapainya indikator kinerja Persentase Luas Kawasan Kumuh dibawah 10 (Sepuluh) Ha yang ditangani adalah :

1. Memaksimalkan kinerja sumber daya manusia yang ada pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan serta tenaga pendukung lainnya di luar dinas.
2. Adanya dukungan dari semua stakeholder dalam fisik di dalam Kawasan Kumuh.
3. Monitoring dan evaluasi setiap saat pada saat pengerjaan fisik di lapangan.
4. Perencanaan teknis sesuai dengan kebutuhan.





5. Membuat dokumentasi laporan pelaksanaan kegiatan yang baik sehingga mampu merekam kejadian/permasalahan yang dihadapi serta penanganannya.
6. Adanya dukungan oleh pemerintah setempat dalam penanganan kawasan kumuh.
7. Adanya kolaborasi dari perangkat daerah yang lain untuk penanganan kawasan kumuh.

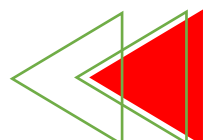
Adapun faktor penghambat dalam pencapaian indikator kinerja adalah :

1. Keterbatasan anggaran untuk menuntaskan kawasan permukiman kumuh.
2. Belum lengkapnya dokumen-dokumen yang mendukung pelaksanaan pengentasan kawasan kumuh.
3. Belum adanya penangan kawasan kumuh diatas 10-15 Ha oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi – Selatan
4. Kurangnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia pada bidang yang menangani.
5. Belum ditetapkannya Perda Kawasan Kumuh di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Dokumentasi Kawasan Kumuh dibawah 10 (Sepuluh) Ha yang ditangani



2. Pada tahun 2024 Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan kepada Pemerintah Daerah, jumlah perumahan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebanyak **36 Unit**. Dari 36 Unit perumahan tersebut ada **19 (sembilan belas)** Unit perumahan yang menyerahkan PSU nya ke Pemerintah Daerah Kabupaten. Perumahan yang ada di Kabupaten Pangkep telah terregistrasi atau terdaftar yaitu sebanyak 36 unit. Sementara jumlah





perumahan yang telah tersertifikasi sebanyak 19 Perumahan dan personel perumahan yang telah mengikuti pelatihan sebanyak 19 perumahan.

Berikut tabel daftar target dan capaian indikator Persentase Perumahan yang Menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan kepada Pemerintah Daerah :

Tabel 26

Data Rincian Capaian indikator Persentase Perumahan yang Menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)

No	Uraian Formula Indikator	Capaian
1	Perumahan Terregistrasi	100%
2	Perumahan Tersertifikasi	50%
3	Perumahan Terlatih	50%
4	Perumahan Menyerahkan PSU	52,78%

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah perumahan yang menyerahkan PSU nya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkepsebanyak 52,78 Persen dari seluruh perumahan yang ada di Kabupaten Pangkep atau sejumlah 19 unit perumahan dari 36 unit. Sedangkan yang perumahan yang terlatih, dan tersertifikasi hanya seperdua dari jumlah perumahan keseluruhan. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan berhasil meregistrasi seluruh perumahan yang ada di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berkat kolaborasi Perangkat Daerah terkait seperti Dinas PUTR dan Dinas PMPTSP Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

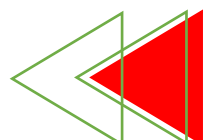
Dokumentasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)



Monitoring Perbaikan PSU Perumahan



Penyerahan PSU kepada PEMDA



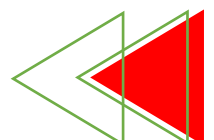


3. Target pada Kegiatan Penerangan jalan umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di tahun 2024 dengan panjang jaringan PJU di jalan poros sebesar **43,5 Km** dengan realisasi sebesar **50 Km**.

Adapun faktor pendukung dari pencapaian kegiatan tersebut diantaranya :

1. Memaksimalkan kinerja sumber daya manusia yang ada pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan serta tenaga pendukung lainnya di luar dinas,
2. Adanya dukungan dari semua stakeholder dalam pembangunan fisik di cesting tengah jalan poros khususnya Balai Besar Jalan Sulawesi,
3. Monitoring dan evaluasi setiap saat pada saat pengerjaan fisik di lapangan,
4. Perencanaan teknis sesuai dengan kebutuhan,
5. Cukupnya fasilitas peralatan penerangan PJU Poros seperti Mobil skylift, Workshop PJU dan peralatan-peralatan listrik lainnya.

Dokumentasi Penerangan Jalan Umum





Tabel 27
Analisa Capaian Indikator
“Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Dalam Kondisi Baik”

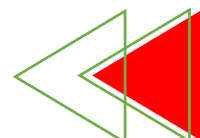
No.	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	19,78	19,78	100

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2024

Pada indikator “Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik” pada tahun 2024 dengan capaian sebesar 100% dari target sebesar **19,30 %**, tercapainya target dari indikator tersebut dengan adanya dukungan dari beberapa faktor sebagai berikut :

- Tersedianya perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
- Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir
- Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor yang berfungsi dengan baik SW dan optimal
- Terlaksananya Penataan dan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dengan tertib dan aman
- Terlaksananya Audit dan inspeksi Keselamatan Lalu Lintas LLAJ di jalan dan sweeping terhadap pemilik Angkutan dalam menunjang keselamatan transportasi

Dokumentasi Sarana dan Prasarana Perhubungan





Tabel 28
Analisa Capaian Indikator
Persentase Fasilitas Pendidikan Dalam Kondisi Baik

No.	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Persentase fasilitas pendidikan dalam kondisi baik	86,76	94,41	108,82

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024

Persentase Sekolah dengan Kondisi Baik adalah persentase jumlah ruangan sekolah yang memiliki kondisi baik (memadai, layak, atau sesuai standar) dari seluruh jumlah kondisi ruang sekolah di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Ruang sekolah yang dimaksud meliputi Ruang Kelas, Ruang Guru, Ruang Kepala Sekolah, Ruang Perpustakaan, dan Ruang Laboratorium.

Capaian yang diperoleh untuk indikator ini sangat baik. Target yang ditentukan sebesar 86,76%, tetapi nilai realisasinya sebesar 94,41%, sehingga capaian kinerja yang diperoleh pada Tahun 2024 adalah sebesar 108,82%. Namun demikian, pencapaian pada Tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan capaian pada Tahun 2023, dimana pada Tabel. 3.3 dan grafik 3.20 terlihat bahwa pada tahun 2023 capaian kinerjanya sebesar 97,36% (mengalami penurunan 2,95%). Terjadinya penurunan persentase sekolah dengan kondisi baik menunjukkan bahwa jumlah ruangan yang mengalami kerusakan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah ruang yang dibangun atau direhabilitasi pada tahun 2024. Selain itu, terjadinya musibah bencana alam seperti pohon tumbang yang menimpa beberapa sekolah juga menjadi penyebab karena bangunan yang rusak tersebut tidak masuk dalam inventarisasi bangunan yang akan direhabilitasi pada Tahun 2024. Meskipun mengalami penurunan, secara umum capaian kinerja untuk indikator ini masih tergolong sangat baik.

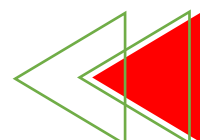
Dokumentasi Fasilitas Pendidikan



Pembangunan Ruang Laboratorium



Pembangunan Ruang Kelas Baru





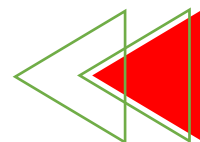
Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung persentase sekolah dengan kondisi baik, yaitu :

Persentase Sekolah Kondisi Baik (%)	=	$\frac{\text{Jumlah Ruang Sekolah (R. Kelas, R. Kepsek, R. Guru, R. Laboratorium, R. UKS, R. Perpustakaan) Kondisi Baik Setiap Jenjang}}{\text{Jumlah Ruang Sekolah Seluruhnya Setiap Jenjang}} \times 100 \%$
	;	$\frac{999 + 3.035 + 1.066}{1.039 + 3.226 + 1.137} \times 100 = \frac{5.100}{5.402} \times 100 = 94,41 \%$

Tabel 29

Data kondisi ruang dalam kondisi baik yang ada di sekolah pada Tahun 2024

No.	Jenjang Pendidikan/ Kondisi Ruang	Jumlah Ruang					Total Ruang
		Kelas	Perpustakaan	Laboratorium	Kepsek	Guru	
A. JENJANG PAUD							
1	Baik	650	15	0	167	167	999
2	Rusak Ringan	30	0	0	5	5	40
3	Rusak Sedang	0	0	0	0	0	0
4	Rusak Berat	0	0	0	0	0	0
	Total Ruang	680	15	0	172	172	1039
	Persentase Kondisi Rusak	4,41	0,00	0,00	2,91	2,91	3,85
	Persentase Kondisi Baik	95,59	100,00	0,00	97,09	97,09	96,15
B. JENJANG SD							
1	Baik	2174	285	24	276	276	3035
2	Rusak Ringan	37	6	0	7	7	57
3	Rusak Sedang	126	8	0	0	0	134
4	Rusak Berat	0	0	0	0	0	0
	Total Ruang	2337	299	24	283	283	3226
	Persentase Kondisi Rusak	6,97	4,68	0,00	2,47	2,47	5,92





No.	Jenjang Pendidikan/ Kondisi Ruang	Jumlah Ruang					Total Ruang
		Kelas	Perpustakaan	Laboratorium	Kepsek	Guru	
	Persentase Kondisi Baik	93,03	95,32	100,00	97,53	97,53	94,08
C. JENJANG SMP							
1	Baik	672	79	177	69	69	1066
2	Rusak Ringan	25	3	6	3	3	40
3	Rusak Sedang	26	2	3	0	0	31
4	Rusak Berat	0	0	0	0	0	0
	Total Ruang	723	84	186	72	72	1137
	Persentase Kondisi Rusak	7,05	5,95	4,84	4,17	4,17	6,24
	Persentase Kondisi Baik	92,95	94,05	95,16	95,83	95,83	93,76

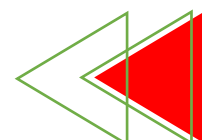
Indikator ini erat kaitannya dengan kegiatan pembangunan fisik untuk meningkatkan kondisi satuan pendidikan agar menjadi lebih baik dan kondisinya lebih nyaman dan kondusif untuk menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar. Adapun kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja, diantaranya yaitu :

- 1) Pembangunan dan rehabilitasi fasilitas fisik sekolah seperti gedung, ruang kelas, ruang perpustakaan, Gedung ibadah, laboratorium dan toilet.
- 2) Pembangunan ruang atau fasilitas pendidikan yang ramah disabilitas untuk memberikan dukungan bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus.
- 3) Monitoring terkait pemeliharaan dan perawatan rutin untuk memastikan fasilitas bangunan tetap dalam kondisi baik demi mewujudkan lingkungan satuan pendidikan yang nyaman dan aman.

Tabel 30
Analisa Capaian Indikator
Persentase Fasilitas Kesehatan Dalam Kondisi Baik

No.	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Persentase fasilitas kesehatan dalam kondisi baik	100	100	100

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2024





Program yang mendukung untuk pencapaian dari indikator Persentase fasilitas kesehatan dalam kondisi baik adalah : **Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat**, dengan beberapa kegiatan antara lain :

a. Kegiatan Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota

1) Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dinas Kesehatan)

Sub Kegiatan ini mencakup Pembangunan Gedung PSC 119 dan pengadaan Ambulance PSC 119. Kegiatan PSC 119 bertujuan untuk memberikan layanan antar jemput terhadap pasien yang membutuhkan. Dengan adanya bangunan PSC 119 sendiri bisa mengoptimalkan kualitas pelayanan antar jemput didukung dengan prasarana ambulance PSC 119 sehingga masyarakat yang membutuhkan pelayanan segera tertangani dengan baik.

2) Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan (Dinas Kesehatan)

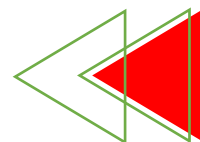
Sub Kegiatan ini mencakup pembangunan rumah dinas tenaga kesehatan sebanyak 8 unit yaitu pembangunan rumah dinas Puskesmas Kota Pangkajene, Sarappo, Sailus, Liukang Tangaya, Bowong Cindea, Taraweang, Balocci dan Sabutung. Rumah dinas tenaga kesehatan direhabilitasi dan dibangun Kembali sesuai prototype Kemenkes sebagai tempat bermukim bagi tenaga medis maupun paramedis Puskesmas demi meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pasien.

3) Pengembangan Puskesmas

Sub Kegiatan ini terdiri dari 3 Paket Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Puskesmas (Puskesmas Kota Pangkajene dan Sarappo, Gedung Perawatan Puskesmas Segeri), ada 6 Paket pekerjaan Pengadaan Listrik solar sell, Instalasi Sarana air bersih, Instalasi Pengolahan Air Limbah serta Ambulance laut untuk Puskesmas Kepulauan. Perbaikan sarana dan prasarana di puskesmas ini diharapkan dapat meningkatkan status Kesehatan masyarakat.

4) Sub kegiatan Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya (RS Batara Siang)

Kegiatan ini meliputi pembangunan empat gedung untuk pelayanan Kanker, jantung, strok, Uronefrologi dan kesehatan ibu dan anak (KJSU-KIA)





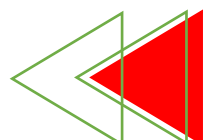
sebagai program Strngthening Indonesia's Health Care Refferal Network (SIHREN Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang di targetkan sampai dengan tahun 2027 sebagai kebijakan pemenuhan alat kesehatan KJSU dan KIA. Program Sihren ini meliputi pelayanan Cathlab, Ct Scan, Cytotokxic dan Nicu untuk pemertaan layanan rujukan melalui optimalisasi jejaring RS untuk 5 penyakit Katastrofik utama dan penyakit kematian tertinggi di Indonesia. Pelayanan pada penyakit yang menjadi Layanan prioritas Kementerian Kesehatan melalui pembangunan gedung Cathlab, Ct Scan, Nicu, Cyotokxic melalui anggaran DAK tahun 2024 dan alat kesehatan melalui mekanisme Hibah Dropping dari Kementrian Kesehatan RI. Pembangunan gedung Cathlab termasuk dalam 10 program prioritas pembangunan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk pembanguan Pangkep Hebat. Sub kegiatan ini juga meliputi pengadaan mobil ambulans untuk menunjang pelayanan pasien rujukan dan pengadaan genset sebagai prasaran untuk menunjang pelayanan pasien sebagai masyarakat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

5) Sub Kegiatan : Rehabilitasi dan pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya (DINAS KESEHATAN)

Pada Sub Kegiatan ini dilakukan rehabilitasi 8 (delapan poskesdes) yaitu : Rehabilitasi Gedung Poskesdes Bonti, Rehabilitasi Gedung Poskesdes dan Pembangunan Pagar Poskesdes Borimasunggu Pundata Baji, Rehabilitasi Gedung Poskesdes Pandang Lau Bonto Perak, Rehabilitasi Gedung Pustu Manggalung Mandalle, Rehabilitasi Gedung Poskesdes Makaranganang Sailus, Rehabilitasi Gedung Poskesdes Mario Desa Lanne Bantimala, Rehabilitasi Gedung Pustu Amung Baring dan Rehabiltasi Gedung Poskesdes Podang - podang Liukang Tupabbiring. Dengan perbaikan yang dilakukan di fasilitas pelayanan Kesehatan ini diharapkan dapat meningkatkan status pelayanan Kesehatan.

6) Sub Kegiatan : Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (DINAS KESEHATAN)

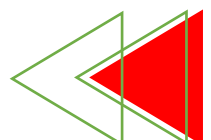
Sub kegiatan ini terdiri atas Pengadaan Alat Kesehatan Cold Storage sebanyak 9 unit untuk Puskesmas Liukang Tangaya, Pammantauang, Kalabbirang, Balocci, Bantimala, Bowong Cindea, Ma'rang, Padang Lampe





dan Mandalle) dan Alat Temperature Logger sebanyak 23 unit untuk semua 23 Puskesmas yang ada di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

- 7) Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (DINAS KESEHATAN)
Pemeliharaan Alat kesehatan yang dilakukan pada sub kegiatan ini berupa kalibrasi alat kesehatan Puskesmas. Kalibrasi alat kesehatan dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun bertujuan menjamin tersedianya alat kesehatan yang sesuai standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, manfaat, keselamatan, dan laik pakai di Fasilitas pelayanan kesehatan. Kegiatan ini melibatkan Tenaga Kalibrasi dari BPFAC (Balai Pengamanan Fasilitas dan Alat Kesehatan) Makassar dan dilaksanakan di Kantor Dinas Kesehatan Kab. Pangkep.
- 8) Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan (Dinas Kesehatan)
Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan menjamin ketersediaan obat esensial di Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS). Untuk menjamin efektifitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi maka proses pengadaan obat dilakukan melalui pemanfaatan katalog elektronik (e-Katalog) yang diatur dalam peraturan Menteri Kesehatan nomor 5 tahun 2019.
- 9) Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan (Dinas Kesehatan)
Pada sub kegiatan ini proses distribusi obat, vaksin dan BMHP dilakukan setiap bulan dimana Puskesmas melakukan permintaan ke Instalasi Farmasi Kabupaten menggunakan Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO). Proses distribusi dilakukan dengan mengantar langsung untuk Puskesmas wilayah daratan dan melalui pihak ketiga untuk wilayah kepulauan.
- 10) Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya (RS Batara Siang)
- 11) Sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit (RS Batara Siang)





Rehabilitasi dan pemeliharaan rumah sakit ini yang meliputi pengecatan gedung kantor dan pembuatan taman rumah sakit.

12) Sub kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RS Batara Siang)

Sub kegiatan ini bersumber dari anggaran DAK dan DAU tahun 2024, Pengadaan alat kesehatan ini di peruntukan untuk unit rawat jalan, rawat inap, laboratorium, ICU, NICU, radiologi untuk menunjang pelayanan di RSUD Batara Siang dan pemenuhan standar pelayanan minimal.

13) Sub kegiatan Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya (RS Batiling)

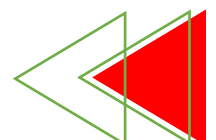
14) Sub kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RS Batiling)

Sub kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan (RS Pratama Sailus

Dokumentasi Fasilitas Kesehatan Pembangunan Puskesmas Kota Pangkajene



Pembangunan Gedung PSC





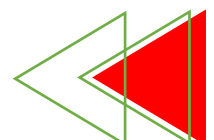
Tujuan Ke-4

Meningkatkan Daya Saing SDM Daerah

Kualitas sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam setiap gerak pembangunan. Tantangan besar pembangunan adalah bagaimana dapat memperbaiki kualitas kehidupan manusia. Upaya perbaikan kualitas manusia, selain upaya peningkatan pendapatan, juga perlu upaya peningkatan kualitas pendidikan melalui pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan serta pelatihan dan upaya peningkatan kesehatan sumber daya manusia karena kesehatan yang baik pada SDM akan mempengaruhi produktivitas dan kinerja dalam berbagai sektor baik ekonomi, pendidikan, dan sosial.

Sebagai alat ukur yang relevan untuk mengetahui peningkatan derajat kualitas SDM ditetapkan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM mengukur pencapaian keseluruhan dari suatu negara atau daerah dengan tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat (a long healthy life), dimensi pengetahuan (knowledge) dan dimensi standar hidup layak (descent standard of living). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengetahui tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, meliputi: Angka Usia Harapan Hidup (UHH) untuk mengukur peluang hidup; rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf untuk mengukur status tingkat pendidikan penduduk; serta pengeluaran rill per kapita untuk mengukur akses terhadap sumberdaya untuk mencapai standar hidup layak.

Indikator pembentuk IPM yang meliputi usia harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, pengeluaran per kapita untuk wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam kurun waktu 2020-2024 terus mengalami peningkatan. Berdasarkan Hasil Publikasi oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, sejak tahun 2022 setelah pelaksanaan Sensus Penduduk Lanjutan (Long Form SP2020) yang dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19, BPS melakukan perubahan pengukuran IPM dengan menggunakan metode Hasil Long Form 2020. Pengukuran dengan metode ini dianggap yang lebih akurat dan komprehensif, lebih presisi dan dapat diandalkan sehingga dapat membantu pemerintah dalam membuat kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Pangkep terutama dalam hal Umur Harapan Hidup, yang merupakan salah satu komponen IPM. Selain itu





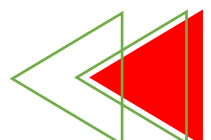
dengan metode Hasil Long Form 2020 juga digunakan untuk memantau perkembangan IPM Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan perbandingan dengan daerah lain.

Perkembangan peningkatan data IPM Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan membandingkan Hasil Sensus Penduduk dan Hasil Long Form 2020 dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 31
Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Pembentuk IPM
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 s/d 2024

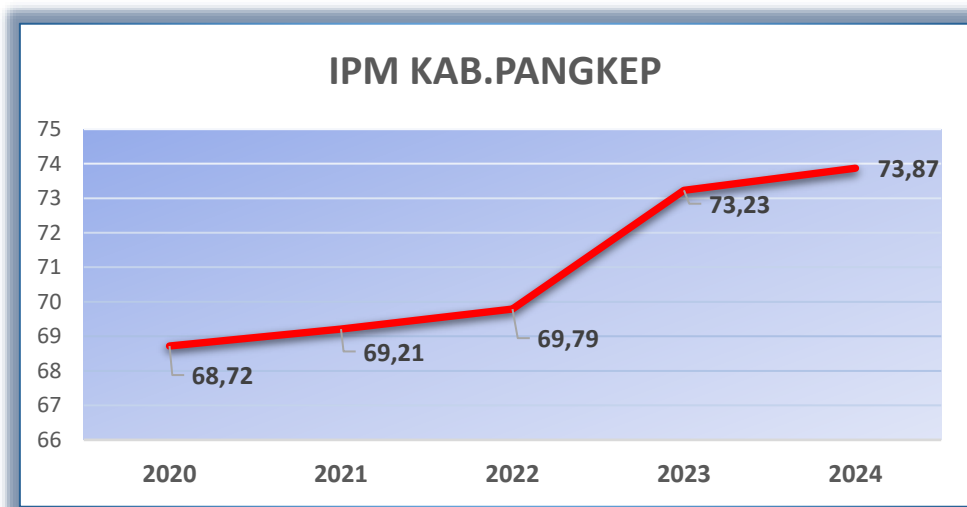
Indek Pembangunan Manusia Kabupaten Pangkep	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
A. Indeks Kesehatan	71,78	71,97	72,49	72,86	73,22
Indeks Kesehatan (UHH Hasil LF SP2020)	80,18	80,38	80,95	81,34	81,71
Umur Harapan Hidup (UHH)	66,66	66,78	67,12	67,36	67,59
Umur Harapan Hidup (UHH Hasil LF SP2020))	72,12	72,25	72,62	72,87	73,11
B. Indeks Pendidikan	60,98	61,87	62,33	63,26	63,82
Harapan Lama Sekolah	12,76	12,77	12,78	12,80	12,81
Rata-rata Lama Sekolah	7,66	7,92	8,05	8,31	8,47
C. Indeks Pengeluaran	74,15	74,46	75,24	76,32	77,3
Paritas Daya Beli (Pengeluaran)	11.405	11.519	11.817	12.241	12,643
IPM Kabupaten Pangkep	68,72	69,21	69,79	70,59	71,22
IPM Kabupaten Pangkep (Hasil Long Form SP2020)	68,72	69,21	69,79	73,23	73,87

Sumber : BPS Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2025





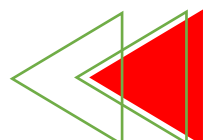
Grafik 23
Perkembangan IPM Kab.Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2024

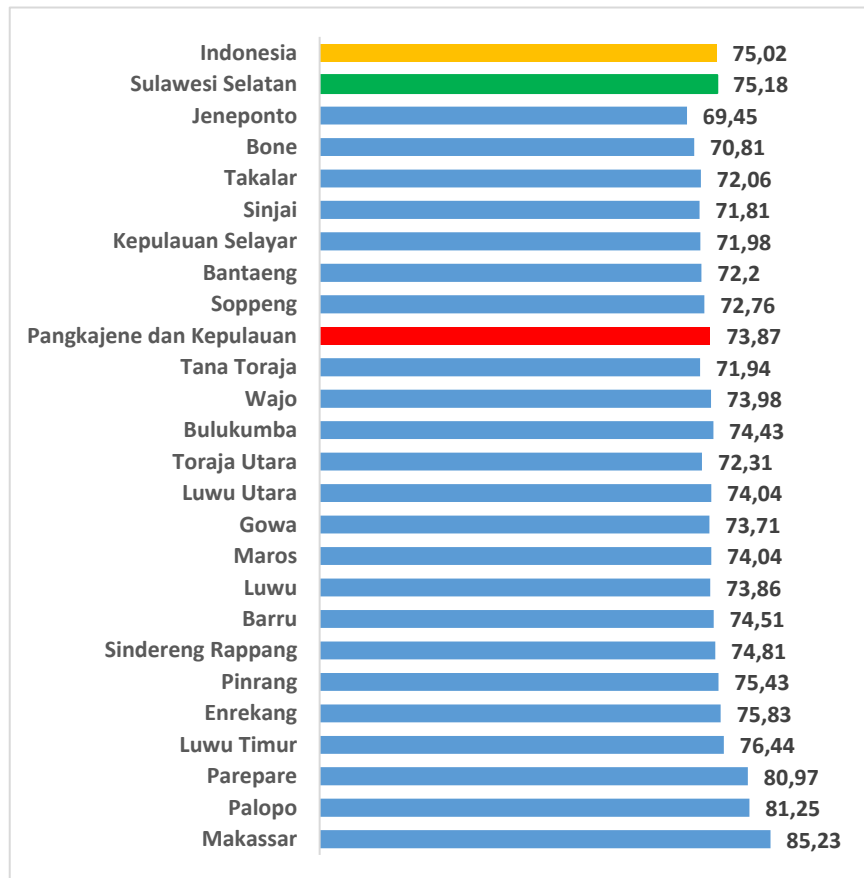
Berdasarkan tabel dan grafik tersebut menggambarkan bahwa perkembangan capaian IPM dengan menggunakan Hasil Long Form 2020 untuk tahun 2024 menunjukkan adanya kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu 73,87. Kenaikan sebesar 0,64 point dari capaian sebelumnya yaitu sebesar 73,23 ditahun 2023 ini menunjukkan perkembangan IPM Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan meningkat namun cenderung melambat dari periode dua tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena peningkatan pada ke-3 Dimensi IPM yaitu Indeks Kesehatan, Indeks Pendidikan dan Indeks Pengeluaran memiliki rata-rata kenaikan hanya sebesar 0,63 point dari tahun sebelumnya. Dimensi Indeks Kesehatan melalui komponen Angka Harapan Hidup (AHH LFSP2020) meningkat hanya sebesar 0,37 point. Selanjutnya dimensi Indeks Pendidikan peningkatan hanya sebesar 0,56 point dan dimensi Indeks Pengeluaran sebesar 0,98 point. Melambatnya peningkatan IPM ini bisa disebabkan karena kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan yang belum memadai serta kesenjangan pembangunan antar wilayah yang masih cukup tinggi di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sehingga mempengaruhi kemampuan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat pada daerah-daerah dengan akses wilayah yang sulit terjangkau

Untuk perbandingan capaian IPM Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2024 digambarkan pada grafik berikut;



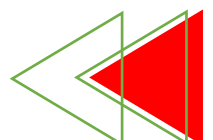


Grafik 24
Perbandingan IPM Kabupaten Pangkep, SulSel dan Nasional Tahun 2024



Sumber : BPS Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2025

Dengan melihat perbandingan capaian IPM baik Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan daerah sekitar, tingkat provinsi dan nasional maka diperlukan upaya dan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusianya dengan mengatasi kemiskinan, peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan, pengembangan ekonomi local melalui peningkatan kegiatan-kegiatan pemberdayaan, peningkatan kualitas layanan public dan pengendalian inflasi untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Untuk menggali lebih jauh perkembangan capaian kinerja ke-3 dimensi IPM Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 akan diulas pada tahapan berikut.





SASARAN STRATEGIS 8

Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan

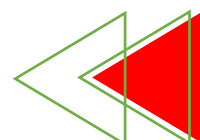
Memperbaiki mutu Pendidikan adalah tugas yang sangat kompleks dan memerlukan kerjasama dari berbagai pihak. Kondisi sosial ekonomi masyarakat ditambah dengan adanya disparitas wilayah merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan peningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan di sebagian wilayah tidak merata sehingga mengakibatkan rendahnya capaian kualitas pendidikan.

Aksesibilitas pendidikan berarti memastikan bahwa semua anak, terlepas dari latar belakang sosial ekonomi atau geografis, memiliki akses yang sama untuk mengikuti pendidikan dasar yang berkualitas. Sementara itu mutu Pendidikan adalah untuk memastikan bahwa setiap anak yang mengikuti pendidikan dasar menerima pendidikan yang berkualitas dan memenuhi standar nasional. Dalam memastikan keterpenuhan pada kedua unsur tersebut maka tolok ukur yang digunakan dalam menilai sektor Pendidikan adalah Nilai Indeks Pendidikan.

Indeks Pendidikan itu sendiri adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat aksesibilitas dan mutu pendidikan disuatu wilayah. Pemerataan terhadap akses pendidikan di suatu wilayah dapat diukur dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS menunjukkan proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk kelompok umur tersebut. Serta digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan. Selain menggunakan APS sebagai indikator untuk mengukur pemerataan akses terhadap pendidikan, Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) juga digunakan untuk melihat seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu, atau menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh.

Adapun factor-faktor yang mempengaruhi indeks pendidikan antara lain:

1. Tingkat pendidikan formal menunjukkan seberapa banyak orang yang mengikuti pendidikan formal di sekolah.





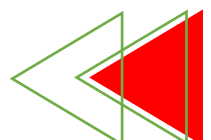
2. Partisipasi sekolah menunjukkan seberapa banyak anak yang bersekolah dan seberapa lama mereka mengikuti Pendidikan
3. Kualitas pendidikan menentukan tingkat pemahaman dan keterampilan seseorang setelah mengikuti pendidikan.
4. Literasi menunjukkan tingkat kemampuan membaca dan menulis seseorang.
5. Aksesibilitas menentukan seberapa mudah seseorang mengakses pendidikan.
6. Infrastruktur sekolah menentukan kualitas lingkungan belajar dan fasilitas yang tersedia bagi siswa.
7. Kualitas sumber daya manusia menentukan tingkat keahlian dan kompetensi guru dan staf pendidikan.
8. Budaya dan tradisi mempengaruhi sikap masyarakat terhadap pendidikan dan seberapa penting pendidikan dianggap.
9. Politik dan regulasi mempengaruhi tingkat dukungan pemerintah dan regulasi yang mempengaruhi tersedia dan kualitas Pendidikan

Khusus untuk capaian kinerja Indeks Pendidikan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 yang merupakan salah satu Indikator capaian Kinerja Utama Kepala Daerah dalam mendukung sasaran strategis Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan tersaji pada tabel berikut :

Tabel 32
Pencapaian Sasaran Strategis 8 Meningkatnya Aksebilitas dan Mutu Pendidikan

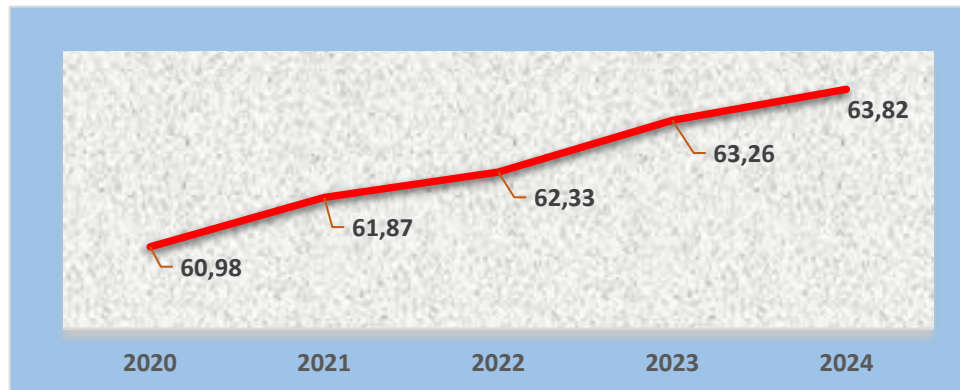
Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir RPJMD (2026)	Capaian 2024 Terhadap Akhir RPJMD (%)
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
Indeks Pendidikan	63,26	63,28	63,82	100,85	64,63	98,74

Pada tabel tersebut menunjukkan capaian indeks Pendidikan mencapai 100,85% dengan realisasi 63,82 dari 63,28 yang ditargetkan ditahun 2024. Secara umumnya Indeks Pendidikan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam kurun lima tahun terakhir dari tahun 2020-2024 mengalami peningkatan. Hal ini digambarkan dalam grafik berikut;



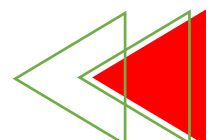


Grafik 25
Perkembangan Indeks Pendidikan
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024



Berdasarkan trend penilaian Indeks Pendidikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menunjukkan kenaikan setiap tahunnya. Tentunya hal ini memberikan gambaran bahwa pemerintah daerah terus berupaya melakukan perbaikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Upaya yang dilakukan adalah memastikan bahwa setiap peserta didik menerima pendidikan terbaik yang memungkinkan mereka untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Melalui pengukuran Indeks Pendidikan yang juga adalah salah satu dimensi dalam mengukur Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada suatu wilayah selain dari dua dimensi lainnya yaitu Indeks Kesehatan dan Indeks Pengeluaran. Komponen pengukuran Indeks Pendidikan terdiri atas Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal dan Harapan Lama Sekolah (HLS) yaitu angka yang menggambarkan lamanya (tahun) masa sekolah yang dirasakan pada masa tertentu dimasa mendatang. Tingginya angka rata-rata lama sekolah menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka RLS maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang telah ditamatkan. Sedangkan HLS digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan system Pendidikan diberbagai jenjang. Selain itu HLS juga merupakan salah satu dari 73 indikator dalam mengukur Tingkat Pendidikan dan Kualitas SDM suatu daerah. Semakin tinggi HLS maka semakin tinggi pula tingkat pendidikan dan kualitas sumber daya manusia suatu daerah.

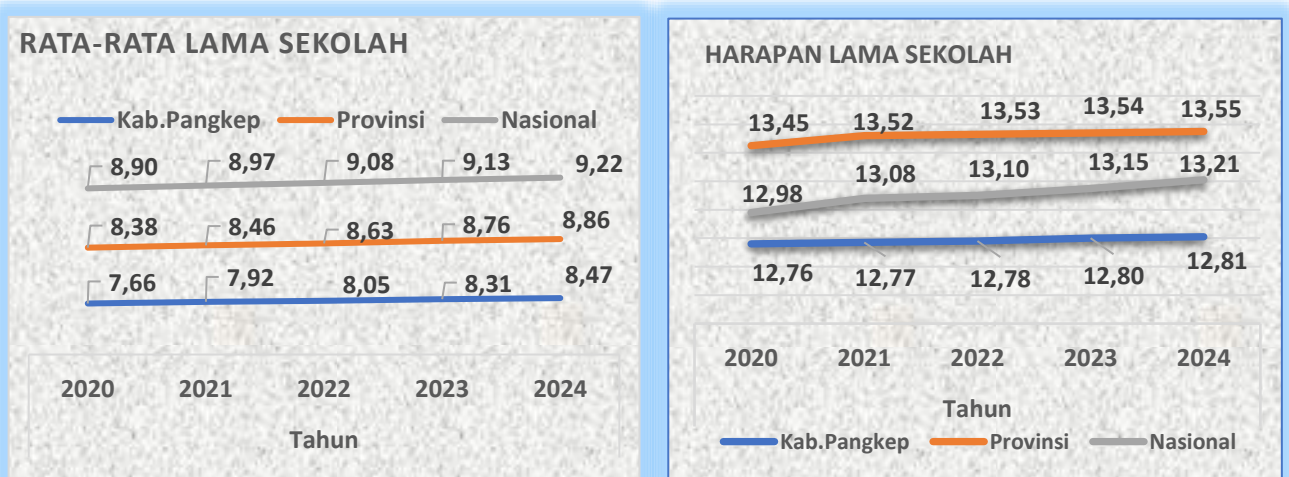




Berikut grafik perkembangan Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah pada Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024;

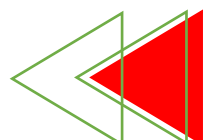
Grafik 26

Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan & Kabupaten Pangkep Tahun 2020-2024



Meskipun terjadi peningkatan berkelanjutan terhadap Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah selama kurun waktu lima tahun, namun capaian Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Sulawesi Selatan yang sebesar 8,86 dan Nasional sebesar 9,22, dan Harapan Lama Sekolah Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 13,55 tahun dan Nasional mencapai 13,21 tahun. Untuk itu dibutuhkan upaya yang lebih keras untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan agar dapat menyamai atau bahkan melebihi rata-rata capaian Provinsi dan Nasional.

Guna mendukung pencapaian dari Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai organisasi pemerintah daerah yang bertanggungjawab dalam pengelolaan Pendidikan menetapkan strategi 15 indikator sebagai tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja sasaran pada Kualitas Layanan Pendidikan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

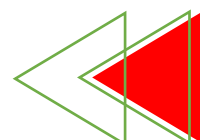




Tabel 33
Capain Kinerja Sasaran Kualitas Layanan Pendidikan Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Persen	86,37	87,57	101,39
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	Persen	109,57	98,04	89,48
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	Persen	81,09	97,46	120,19
4	Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD	Persen	57,46	76,6	133,31
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Persen	99,58	87,84	88,21
6	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Persen	74,17	76,07	102,56
7	Angka Melanjutkan (AM) dari SD ke SMP/MTs	Persen	97,1	99,93	102,91
8	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK/MA	Persen	95,29	95,83	100,57
9	Persentase sekolah dengan kondisi Baik	Persen	86,76	94,41	108,82
10	Angka Melek Huruf	Persen	97,14	95,59	98,40
11	Angka Putus Sekolah (APTs) SD/MI	Persen	0,08	0,25	32,00
12	Angka Putus Sekolah (APTs) SMP/MTs	Persen	0,55	0,9	61,11
13	Persentase Sekolah Terakreditasi A	Persen	16,46	8,71	52,92
14	Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekurang-kurangnya DIV/S1	Persen	82,33	89,08	108,20
15	Persentase Pendidik Bersertifikasi sesuai Jenjang Pendidikan	Persen	46,95	60,12	128,05

Berdasarkan tabel tersebut menggambarkan realisasi capaian kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan Pendidikan dengan rata-rata 95,20%. Namun ada beberapa indikator yang masih sangat rendah dan membutuhkan perhatian yang serius yaitu pada Angka Putus Sekolah (APTs) SD/MI dan Angka Putus Sekolah (APTs) SMP/ MTs dengan capaian masing-masing hanya sebesar 32% dan 61,11% serta Persentase Sekolah Terakreditasi A dengan capaian hanya





52,92%. Selain adanya capaian yang rendah tentunya indikator kinerja yang berkontribusi positif terhadap peningkatan layanan kualitas Pendidikan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan perlu diapresiasi. Salah satunya adalah Pada Tingkat APK dan APM PAUD yang mampu melampaui target yang ditetapkan. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa kesadaran masyarakat, khususnya orang tua untuk menyekolahkan anaknya pada jenjang PAUD semakin baik. Demikian juga pada Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs dengan realisasi capaian yang mampu melampaui target yang ditetapkan, sehingga kondisi ini memberikan gambaran bahwa angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs pada tahun 2024 sudah sangat baik.

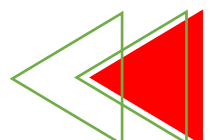
Salah satu langkah yang ditempuh untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah dengan meningkatkan ketersediaan sumber daya pendidikan. Sumberdaya Pendidikan antara lain: gedung sekolah yang memadai, tenaga pengajar yang berkualitas, dan materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah melakukan berbagai program lanjutan dari tahun sebelumnya untuk membantu keluarga yang kurang mampu dari segi ekonomi agar dapat menempuh pendidikan seperti program bantuan SPP gratis, bantuan seragam gratis, serta bantuan beasiswa untuk peserta didik dari keluarga miskin.

Program yang dilakukan dalam rangka pendukung pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan” yaitu :

1. Program Pengelolaan Pendidikan.

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan meliputi;

- a. Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan untuk meningkatkan layanan pendidikan baik melalui pembangunan ruang/kelas baru, ruang guru/kepala sekolah/TU sebanyak 19 ruang, Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah sebanyak 27 ruang, Pembangunan Perpustakaan Sekolah sebanyak 4 unit, Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah sebanyak 24 unit,
- b. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- c. Pengadaan Mebel Sekolah,
- d. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa sebanyak 38 Paket
- e. Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar

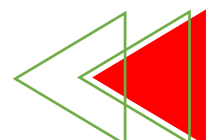




- f. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD,
- g. Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD,
- h. Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional sekolah dan meringankan beban biaya sekolah untuk peserta didik
- i. Bantuan perlengkapan siswa berupa pemberian seragam gratis kepada peserta didik baru jenjang Pendidikan dasar dan Jenjang Sekolah Menengah Pertama sebanyak 1.544 anak
- j. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa melalui kegiatan FLS2N, OSN dan Gebyar PAUD
- k. Pemberian bantuan sarana pembelajaran (TIK)
- l. IPembangunan ruang pusat sumber Pendidikan inklusif menyesuaikan fasilitas yang ramah disabilitas.
- m. Monitoring terkait pemeliharaan dan perawatan rutin untuk memastikan fasilitas tetap dalam kondisi baik.

Akselerasi pelaksanaan program pengelolaan Pendidikan digambarkan sebagai berikut;

Gambar
Pemberian Bantuan “Alat Permainan Edukasi (APE)”
Penyediaan Sarana Bermain yang Ramah Anak pada Lembaga
PAUD





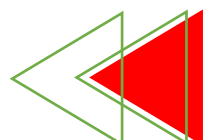
Gambar
Pelaksanaan Kegiatan Perlombaan dalam bentuk Lomba
Kreatifitas Anak



Gambar
Bimtek Inovasi untuk Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah



Gambar
Penggunaan RKB





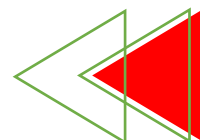
Gambar
Bantuan Mobiler dan Bantuan Seragam Sekolah



Gambar
Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung dan Bantuan
Sarana Pembelajaran (TIK)



Gambar
Sosialisasi Manfaat Pendidikan Lanjutan (Bimtek Verval ATS)





Gambar
Penyuluhan Pendidikan



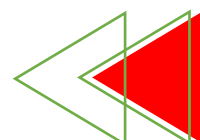
2. Program Pengembangan Kurikulum

- a. Pengembangan kurikulum sesuai standar nasional dan memenuhi kebutuhan peserta didik seperti Pelatihan Guru Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM).
- b. Pembinaan guru dan staf sekolah melalui pelatihan rutin, seminar dan pelatihan pengembangan profesional.



3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan, melalui;

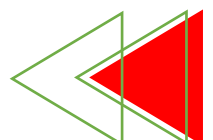
- a. Pemberian akses bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang S1/DIV melalui pemberian izin belajar atau tugas belajar.
- b. Menyediakan beasiswa pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang berprestasi dan belum S1/DIV. Pemberian insentif bagi penyelenggara





- dan tutor program pendidikan anak usia dini
- Pelatihan Calon Guru Penggerak, guna meningkatkan kompetensi Guru Penggerak diantaranya memiliki cara komunikasi yang baik, kreatif dalam membuat metode pengajaran yang menarik dan tidak monoton sehingga murid akan menjadi lebih nyaman dalam proses belajar, Memiliki rasa kepercayaan diri yang baik dan memiliki kesabaran yang baik.
 - Pembinaan KKG Guru Kelas sebagai wadah untuk melakukan berbagai kegiatan penunjang kegiatan belajar mengajar, antara lain merencanakan strategi belajar mengajar, membuat alat pelajaran, membuat lembar kerja, lembar tugas, dan mendiskusikan masalah-masalah yang dijumpai di kelas
 - Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik jenjang Sekolah Menengah Pertama
 - Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah pendidik jenjang Sekolah Menengah Pertama
 - Sosialisasi Pembinaan MGMP
 - Pelaksanaan kegiatan inovasi dan replikasi inovasi lainnya (Kelas Perahu, Sekolah Musim, Bagang Cerdas, Pasti Cerdas)

*Gambar
Pelatihan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan*





4. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

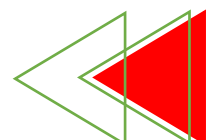
Pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat melalui pemberian bantuan sumbangan penyelenggaraan pendidikan bagi mahasiswa perguruan tinggi dan swasta yang berasal dari Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan kepada 4.918 orang melalui jalur prestasi sebanyak 4.222 orang dan jalur kurang mampu sebanyak 696 orang.

Beberapa permasalahan terkait peningkatan aksesibilitas dan mutu pendidikan:

1. Aksesibilitas dan Infrastruktur terutama di daerah terpencil dan kepulauan Jarak yang jauh antara rumah dan sekolah, serta kurangnya sarana transportasi yang memadai khususnya daerah kepulauan bisa membuat anak-anak sulit untuk mengakses pendidikan.
2. Tingkat kemiskinan yang tinggi mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi masyarakat untuk bisa menggapai Pendidikan yang lebih tinggi
3. Pengetahuan orang tua calon peserta didik mengenai pentingnya pendidikan pra sekolah untuk mengoptimalkan potensi anak masih belum optimal
4. Kualitas sumber daya manusia, kualitas guru dan staf pendidikan belum memadai dan kurangnya program peningkatan kualitas sumber daya manusia membuat kualitas pendidikan masih belum optimal
5. Kurangnya teknologi dan media pembelajaran yang modern terutama di daerah kepulauan dan daerah terpencil dapat mempengaruhi mutu pendidikan dan mengurangi aksesibilitas bagi siswa.
6. Cakupan wilayah untuk pelaksanaan kegiatan inovasi seperti “Kelas Perahu” dan replikasi inovasi lainnya masih terbatas.

Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah kolaborasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan dan stakeholder lainnya untuk mengambil tindakan strategis, seperti:

1. Melakukan kerjasama dengan pihak Desa/Kelurahan untuk menyediakan media/fasilitas yang dapat dimanfaatkan dalam mempermudah akses ke sekolah serta pemanfaatan fasilitas atau dukungan yang bersumber dari pemerintah Kabupaten lain/Provinsi/Pusat/pihak Swasta dalam menurunkan angka anak putus sekolah dan tidak lanjut sekolah.

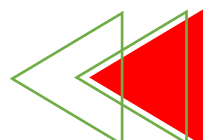




2. Mengembangkan dan menyediakan program dan kurikulum pendidikan yang relevan dan berkualitas serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan dari jenjang tingkat dasar, menengah dan atas hingga perguruan tinggi dan bekerjasama dengan lembaga-lembaga masyarakat dan pemerhati Pendidikan dalam melakukan kampanye sosialisasi tentang akses layanan pendidikan
3. Menyediakan fasilitas dan peralatan pendidikan yang baik dan memadai.
4. Menyediakan sumber daya manusia pendidikan yang berkualitas, melalui pelatihan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.
5. Membuat analisa kebutuhan jumlah guru sesuai peraturan dan mengusulkan distribusi guru dari sekolah yang memiliki kelebihan guru ke sekolah yang kekurangan guru.
6. Melaksanakan kegiatan sosialisasi penanganan ATS dengan memanfaatkan data aplikasi dashboard ATS untuk memudahkan proses verifikasi dan validasi anak yang terindikasi ATS
7. Meningkatkan implementasi inovasi dan replikasi program/kegiatan menurunkan untuk angka putus sekolah dan tindak lanjut sekolah secara efektif (Kelas Perahu, Sekolah Musim, Bagang Cerdas, Pasti Cerdas dan inovasi lainnya) serta berkomitmen untuk bekerja sama dengan guru, kepala sekolah, dan pengawas untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan inovasi.

Dengan meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan, diharapkan generasi muda akan memiliki akses yang sama untuk memperoleh pendidikan berkualitas dan siap untuk menghadapi tantangan di masa depan.

Untuk alokasi penganggaran serta realisasi program yang mendukung peningkatan indeks Pendidikan digambarkan pada tabel berikut:





Tabel 34
Program dan Anggaran Pada Sasaran 8 Tahun 2024 (Indeks Pendidikan)

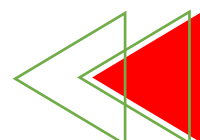
No	Program	Anggaran Tahun 2024			Sisa Anggaran
		Pagu	Realisasi	%	
1	Program Pengelolaan Pendidikan	100.941.462.901	100.021.167.602	99,09	920.295.299
2	Program Pengembangan Kurikulum	25.000.000	21.850.000	87,40	3.150.000
3	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	6.072.000.000	5.969.500.000	98,31	102.500.000

Analisis Tingkat Efisiensi

Analisa efisiensi dilakukan dengan cara membandingkan antara capaian kinerja (%) dan capaian keuangan pada sasaran strategis. Adapun hasil perhitungan analisa efisiensi pada Indeks Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 35
Tingkat Efisiensi Pada Sarana Strategis Indeks Pendidikan

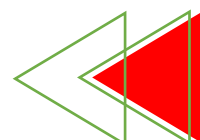
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR CAPAIAN KINERJA	Kinerja (%)	Keuangan (%)	Nilai
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	101,39	99,09	1,02
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	89,48	99,09	0,9
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	120,19	99,09	1,21
		Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD	133,31	99,09	1,35
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	88,21	99,09	0,89
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs/ Paket B	102,56	99,09	1,04
		Angka Melanjutkan (AM) dari SD ke SMP/MTs	102,91	99,09	1,04





	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/ SMK/ MA	100,57	99,09	1,01
	Persentase Sekolah dengan Kondisi Baik	108,82	99,09	1,1
	Angka Melek Huruf	98,62	99,09	0,99
	Angka Putus Sekolah (APTs) SD	-112,5	87,4	-1,29
	Angka Putus Sekolah (APTs) SMP	36,36	87,4	0,42
	Persentase Sekolah Terakreditasi A	52,92	100	0,53
	Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekurang-kurangnya DIV/S1	108,2	98	1,1
	Persentase Pendidik Bersertifikasi sesuai Jenjang Pendidikan	128,05	98	1,31
Rata-rata Tingkat Efisien		83,94	97,45	0,86

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa capaian kinerja dari 15 indikator sasaran strategis, meningkatnya kualitas Pendidikan terdapat 9 (sembilan) indikator dengan kategori sangat efisien (nilai > 1), tidak ada yang masuk dalam kategori efisien (nilai = 1), sementara 6 (enam) indikator dengan kategori kurang efisien (nilai < 1). Secara keseluruhan, nilai rata-rata tingkat efisiensi pada sasaran strategis meningkatnya kualitas Pendidikan untuk Tahun 2024 adalah 0,86. Angka ini menunjukkan bahwa pemanfaatan anggaran dalam mendukung kinerja pencapaian Indeks Pendidikan untuk tahun 2024 tergolong kurang efisien. Hal ini disebabkan kurang efisiennya pemanfaatan anggaran dalam penanganan Anak Tidak Sekolah pada indikator anak putus sekolah yang capainnya sangat jauh dari target yang ditentukan.





SASARAN STRATEGIS 9

Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Jangkauan Pelayanan Masyarakat

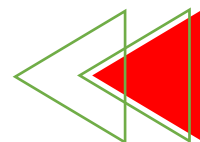
Pada capaian indikator makro pembangunan daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021-2026 untuk aspek Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui Pengukuran Indeks Kesehatan di Tahun 2023 yang digambarkan pada tabel berikut ini.

Tabel 36
Capaian sasaran strategis 9: Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2021	TARGET 2022	REALISASI 2022	REALISASI 2023	REALISASI 2024
Indeks Kesehatan	Angka	71,97	72,31	72,49	72,86	73,22

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa capaian realisasi Indeks Kesehatan mengalami trend kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2024 sebesar 81,71 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 81,34. Capaian Indeks Kesehatan ini ikut mempengaruhi meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia dari sebesar 73,87 Tahun 2024 yang mengalami pertumbuhan sebesar 0,64 dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 73,23 pada tahun 2023. Meningkatnya IPM sebagai salah satu alat ukur bagi Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam meningkatkan Pencapaian Misi ke-4 RPJMD yaitu Pencapaian Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Cerdas Dan Produktif.

Pada hasil capaian Indeks Kesehatan maka melalui inidikator ini menunjukkan bagaimana keseriusan pemerintah dalam mengoptimalkan kinerja khususnya dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pemenuhan kualitas Kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan Kesehatan. Terkait hal tersebut upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagai Instansi Pemerintah yang menangani sektor Kesehatan dalam meningkatkan kepuasan dan derajat Kesehatan masyarakat Kpabupaten Pangkajene dan Kepulauan, melalui upaya meningkatkan status Kesehatan masyarakat dan meningkatkan kepuasan masyarakat di bidang Kesehatan.





Pada beberapa tahun sebelumnya trend perkembangan sektor Kesehatan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2024 melalui Capaian Indeks Kesehatan cenderung mengalami peningkatan dan ini menjadi tolok ukur yang berkontribusi positif bagi Perkembangan IPM di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan selain dari Indeks Pendidikan dan Daya Jual Beli. Adapun grafik gambaran trend peningkatan Indeks Kesehatan Kabupaten Pangkep Tahun 2018 – 2024 berikut ini.

Grafik 27
Perkembangan Indeks Kesehatan Kab.Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2018 - 2024

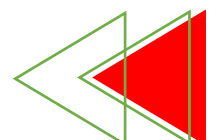


Dari trend peningkatan Indeks Kesehatan tersebut, sasaran strategis yang telah diupayakan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada sektor Kesehatan digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 37
Capaian Kinerja Indeks Kesehatan Tahun 2024

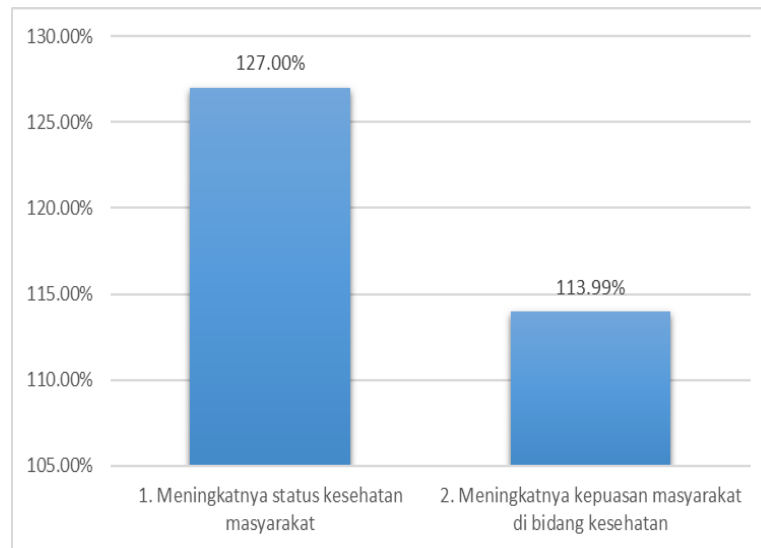
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	satuan	2024		Capaian (%)	Kriteria
			Target	Realisasi		
1. Meningkatkan status kesehatan masyarakat	1. Angka Kematian Ibu (per 100.000 Kelahiran hidup)	per 100.000 kelahiran hidup	103.00	94.77	108.00	Sangat Tinggi (ST)
	2. Angka Kematian Bayi (per 1.000 Kelahiran hidup)	per 1.000 Kelahiran hidup	3.05	0.75	175.40	Sangat Tinggi (ST)
	3. Prevalensi Stunting	%	9.10	9.32	97.60	Sangat Tinggi (ST)
2. Meningkatkan kepuasan masyarakat di bidang kesehatan	4. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Nilai	78.50	89.48	113.99	Sangat Tinggi (ST)

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkep 2024





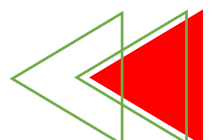
Grafik 28
Rata-rata Realisasi Capaian Sasaran Strategis Indeks Kesehatan
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024



Dari 4 (empat) Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada sektor kesehatan, semua indikator yaitu 4 (empat) indikator menunjukkan hasil capaian Sangat Tinggi yaitu masing - masing pada Angka Kematian Ibu mengalami kenaikan capaian di tahun 2024 karena adanya penurunan kasus kematian ibu dari tahun sebelumnya, begitu juga dengan Angka Kematian Bayi mengalami kenaikan capaian di tahun 2024 karena adanya penurunan kasus kematian bayi dari tahun sebelumnya, namun prevalensi stunting sedikit mengalami penurunan capaian di tahun 2024 karena belum mencapai target yang telah ditetapkan dan pada Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan capaian kinerja sangat tinggi yang mengindikasikan bahwa pelayanan Kesehatan semakin baik

1. Analisis Capaian Kinerja Sektor Kesehatan

Analisis capaian kinerja pada Sektor Kesehatan berdasarkan masing-masing Sasaran Strategis digambarkan sebagai berikut;





SASARAN 1

Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat

Tabel berikut menjelaskan mengenai gambaran target dan realisasi pada sasaran Meningkatkan status kesehatan masyarakat;

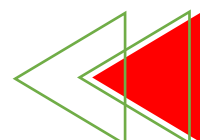
Tabel 38
Capaian Kinerja Sasaran “Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat” Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Angka Kematian Ibu (per 100.000 Kelahiran hidup)	per 100.000 kelahiran hidup	103.00	94.77	108.00
2	Angka Kematian Bayi (per 1.000 Kelahiran hidup)	per 1.000 Kelahiran hidup	3.05	0.75	175.40
3	Prevalensi Stunting	%	9.10	9.32	97.60
					127.00

a. Angka Kematian Ibu (maternal mortality rate)

Untuk capaian indikator pertama “Angka Kematian Ibu” dari target 103 per 100.000 KLH realisasinya yaitu 94,77/100.000 KLH dengan presentasi capaian yaitu 108%. Hal ini merupakan hal positif dimana terjadi penurunan kasus kematian ibu di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024. Capaian tahun 2024 ini merupakan capaian yang tertinggi dibandingkan dengan tahun 2023 dan 2022, dimana tahun 2023 realisasi AKI adalah 109/100.000 KLH dengan capaian 95,41% dan tahun 2022 realisasi AKI adalah 148/100.000 KLH dengan capaian 70,95%.

Pada tahun 2022 jumlah kematian ibu sebanyak 8 kasus dengan 5.399 kelahiran hidup sehingga Angka Kematian Ibu (AKI) yaitu 148/100.000 KLH. Pada tahun 2023 Angka Kematian Ibu mengalami penurunan dengan jumlah kematian ibu yaitu 6 kasus dengan 5.481 kelahiran hidup sehingga didapatkan AKI 2023 yaitu 109/100.000 KLH. Pada tahun 2024 Angka Kematian Ibu mengalami penurunan dengan jumlah kematian ibu yaitu 5 kasus dengan 5.276 kelahiran hidup sehingga didapatkan AKI 2024 yaitu 94,77/100.000 KLH. Pada tahun 2024,

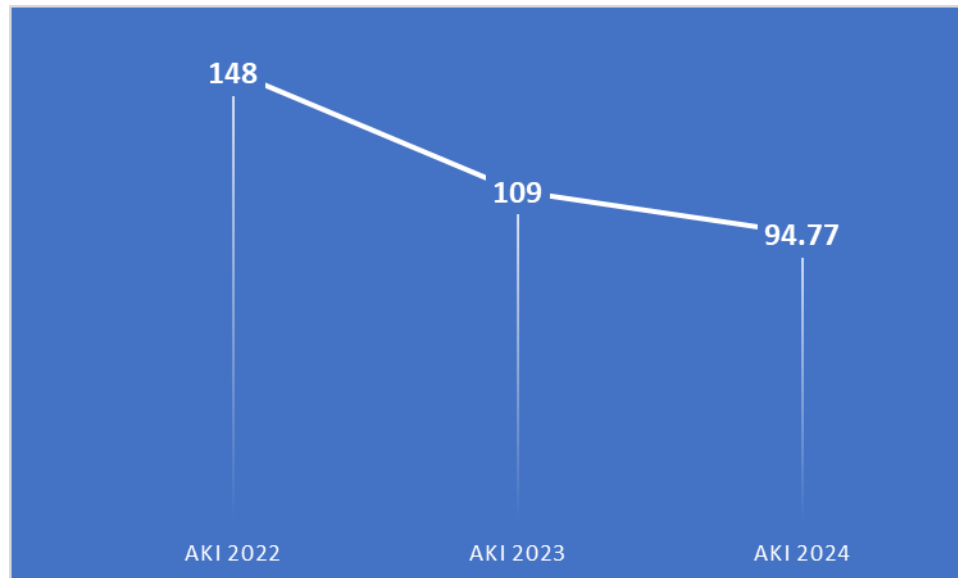




Indikator Angka Kematian Ibu (AKI) telah melebihi target yang telah direncanakan yaitu 103/100.000 KLH.

Adapun perbandingan Angka Kematian Ibu (per 100.000 KLH) dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

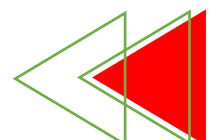
Grafik 29
Perbandingan Angka Kematian Ibu (per 100.000 KLH)
Tahun 2022, 2023 dan 2024



Dari grafik diatas, dapat dilihat bahwa Angka Kematian Ibu Per 100.000 KLH semakin menurun dari tahun 2022 sampai tahun 2024. Trend ini menunjukkan hal positif. Angka kematian ibu (maternal mortality rate) merupakan indikator sensitif untuk mengukur keberhasilan pencapaian pembangunan kesehatan, dan juga sekaligus mengukur pencapaian indeks modal manusia.

Angka Kematian Ibu adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan dan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. Masih adanya kasus kematian ibu menunjukkan bahwa masih diperlukan adanya program-program yang berkaitan dengan kesehatan ibu hamil seperti gerakan sayang ibu, pemberian makanan tambahan ibu hamil, pelayanan kesehatan setelah melahirkan, desa siaga, dan deteksi dini ibu hamil resiko tinggi.

Pada indikator ini kasus kematian ibu mengalami penurunan dari 8 kasus di

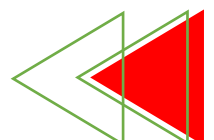




2022 menurun menjadi 6 kasus pada 2023 dan tahun 2024 turun menjadi 5 kasus. Penurunan jumlah kasus kematian ibu di Kabupaten di Pangkajene dan Kepulauan merupakan hal positif dan kerja keras dari seluruh tenaga Kesehatan. Untuk menekan Angka Kematian Ibu telah dilaksanakan kegiatan – kegiatan sebagai berikut:

1. Pendampingan Tim Ahli (Dokter Spesialis Kandungan dan Dokter Spesialis Anak) ke puskesmas daratan (puskesmas kepulauan mengikut ke puskesmas daratan) dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak, kegawatdaruratan, dan sistem rujukan maternal dan neonatal;
2. Pengkajian kasus kematian ibu dan anak bersama tim AMPSR (Audit Maternal dan Perinatal-Surveilans Respons) Kabupaten Pangkep untuk menghasilkan suatu rekomendasi agar kasus kematian yang sama tersebut tidak berulang nantinya. Hasil rekomendasi tersebut dipublikasikan dalam bentuk diseminasi yang menghadirkan lintas sektor dan lintas program yang masing-masing berperan dalam menurunkan Angka Kematian Ibu dan Anak; dan
3. Pertemuan evaluasi dan monitoring pelayanan kesehatan calon pengantin, dengan menghadirkan lintas sektor dan lintas program, LSM/NGO.serta PKK Kab. Pangkep dalam memaksimalkan pelayanan kesehatan calon pengantin agar siap menjadi calon ibu yang sehat dan melahirkan anak yang sehat. Kegiatan tersebut sebagai salah satu upaya menurunkan AKI dan AKB.

Namun, masih terdapat 5 kasus kematian ibu, penyebab utama kematian ibu adalah perdarahan, kemudian pre eclampsia/eklampsia. Masih ada nya kasus ini terjadi menunjukkan masih lemahnya proses skrining kesehatan pada ibu hamil sehingga komplikasi terdeteksi setelah menjadi berat dan mengancam nyawa ibu. Selain itu, Belum semua faskes, baik FKTP maupun FKRTL mempunyai sarana prasarana untuk penanganan kasus kegawatdaruratan maternal, belum semua tenaga kesehatan terlatih untuk penanganan kasus kegawatdaruratan maternal, tingkat pengetahuan masyarakat dan hambatan budaya sehingga keluarga dan ibu hamil terlambat mengambil keputusan yang menyebabkan terlambat mendapatkan penanganan, Adanya kasus rujukan tidak terencana, Masih ada 4 Terlalu diantaranya terlalu Muda melahirkan, terlalu sering melahirkan dan terlalu banyak anak, Menolak pengobatan sehingga tidak mau dirujuk dan masih ada persalinan non fasilitas kesehatan.



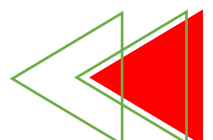


Dalam pencapaian target “**Angka Kematian Ibu**” terdapat **Penyebab yang menghambat** yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Tempat kematian terbanyak adalah pada faskes rujukan/rumah sakit dengan penyebab perdarahan dan preeklampsia/eklampsia;
2. Dari segi pelayanan bahwa tindakan pencegahan, deteksi dini komplikasi dan tata laksana tidak adekuat oleh karena sarana dan prasarana yang belum memadai dan keterampilan petugas yang belum optimal dalam penanganan kegawatdaruratan maternal;
3. Kondisi pengetahuan dan budaya masyarakat, dimana masih ada penolakan pengobatan/perawatan serta tidak mengikuti anjuran pengobatan/perawatan yang diberikan. Kondisi ini mengakibatkan keterlambatan dalam pemberian pertolongan sehingga mengakibatkan kematian Ibu; serta
4. Kondisi geografis di kepulauan ditambah kondisi cuaca membuat rujukan menjadi sulit dilakukan.

Adapun **Alternatif Pemecahan Masalah** Pencapaian Target Sasaran “**Angka Kematian Ibu**” adalah sebagai berikut:

1. Perlunya Meningkatkan kerjasama lintas OPD dalam proses rujukan, diantaranya Dinas Sosial atau pihak Desa / Kelurahan serta Camat dalam kepentingannya memperhatikan keluarga ibu hamil yang ditinggalkan ketika ibu hamil harus tinggal di Rumah Tunggu Kelahiran terutama kepada anak – anaknya yang tidak mempunyai sanak saudara yang lain dan memberikan bantuan sosial bagi masyarakat miskin.
2. Kerjasama lintas sektor juga semakin ditingkatkan dalam hal edukasi kepada masyarakat tentang tanda – tanda bahaya kehamilan atau sosialisasi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) sehingga masyarakat sadar dan segera ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan jika ada tanda-tanda bahaya tersebut, sehingga mau merujuk keluarga nya.
3. Fasilitas pelayanan kesehatan rujukan harus lebih memaksimalkan pelayanan ibu melahirkan, bayi sakit, sehingga kematian bayi dapat ditekan. Hal ini dapat dilakukan dengan peningkatan jumlah dan mutu tenaga kesehatan yang menangani persalinan.
4. Upaya penurunan Kasus Kematian Ibu dapat dilakukan dengan pendampingan/pemantauan ibu hamil di setiap wilayah Puskesmas oleh masing - masing bidan, kalau perlu dengan memakai aplikasi Bidan eKohort,





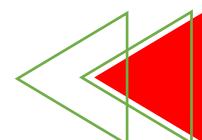
yang dihubungkan dengan Tele - CTG sehingga bisa mendeteksi dengan cepat factor - faktor resiko dan bisa melakukan penanganan dengan segera termasuk rujukan. Selain itu perlu diaktifkan lagi kelas ibu hamil dan kunjungan dari rumah ke rumah (door to door).

5. Upaya menekan kematian ibu dan bayi untuk ibu hamil dari daerah terpencil dan sulit baik wilayah kepulauan maupun wilayah pegunungan dapat menggunakan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) di beberapa puskesmas daratan termasuk RTK kabupaten, pegunungan dan kepulauan yang telah disediakan di dekat Rumah Sakit Rujukan.
6. Perlunya pelatihan penanganan kegawatdaruratan maternal, yang paling utama pelatihan manual placenta khususnya di daerah kepulauan yang sulit akses untuk rujukan segera.

Adapun persebaran kematian ibu sesuai dengan wilayah kerja puskesmas di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdapat pada tabel berikut:

Tabel 39
Jumlah Kematian Ibu Per Puskesmas Wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2024

NO	PUSKESMAS	LAHIR HIDUP	JUMLAH KEMATIAN IBU
1	Kota Pangkajene	454	0
2	Bonto Perak	272	1
3	Minasate'ne	439	0
4	Kalabbirang	149	0
5	Bungoro	453	0
6	Bowong Cindea	218	0
7	Labakkang	253	0
8	Taraweang	306	0
9	Pundata Baji	248	0
10	Ma'rang	341	1
11	Padang Lampe	120	0
12	Segeri	203	1
13	Baring	113	0
14	Mandalle	186	1
15	Balocci	188	0
16	Bantimala	148	0
17	Lk. Tupabbiring	120	0
18	Sabutung	214	0
19	Sarappo	190	0
20	Lk. Kalmas	177	0
21	Pamantauang	136	0
22	Lk. Tangaya	204	0
23	Sailus	144	1
KABUPATEN		5,276	5
ANGKA KEMATIAN IBU		94.7/100000 Kelahiran Hidup	



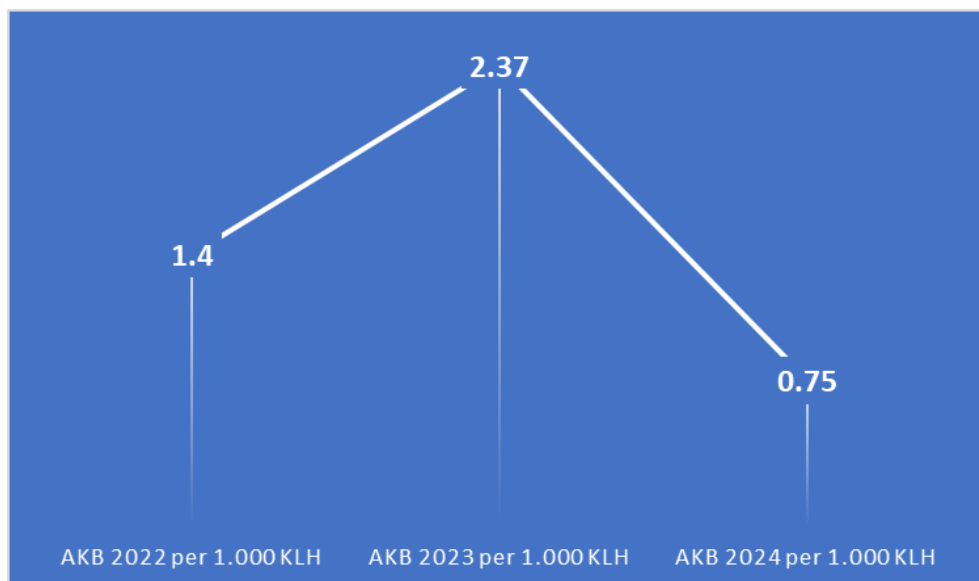


b. Angka Kematian Bayi

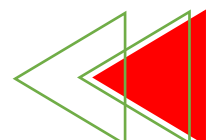
Untuk capaian indikator kedua “Angka Kematian Bayi” dari target 3,05 per 1.000 KLH realisasinya yaitu 4 kasus per 5.276 Kelahiran Hidup atau 0,75/100.000 KLH dengan presentasi capaian yaitu 175,40%. Hal ini merupakan hal yang sangat positif dimana terjadi penurunan kasus kematian bayi di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024. Capaian tahun 2024 ini merupakan capaian yang tertinggi dibandingkan dengan tahun 2023 dan 2022, dimana tahun 2023 jumlah kasus kematian bayi sebanyak 13 kasus kematian diantara 5.481 kelahiran hidup atau 2,37/1.000 KLH dengan capaian 130,80%. Tahun 2022 jumlah kematian bayi sebanyak 8 kasus kematian diantara 5.399 kelahiran hidup atau 1,40/1.000 KLH dengan capaian 222,14%. Dengan demikian dapat disimpulkan pada tahun 2024 telah melebihi target kinerja yang telah ditetapkan yaitu target 3,05/1.000 KLH dan capaian 0,75/1.000 KLH.

Adapun perbandingan Angka Kematian Bayi tahun 2022 – 2024 (per 1000 KLH) dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 30
Perbandingan Angka Kematian Bayi (per 1000 KLH) Tahun 2022,
2023 dan 2024



Perhitungan Angka Kematian Bayi di Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dihitung berdasarkan rumus indikator IKU di Rensta Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 – 2026.



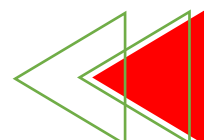


Angka Kematian Bayi dihitung berdasarkan jumlah kematian yang terjadi pada bayi usia > 28 hari – 11 bulan (tanpa kematian neonatal)

Tabel 40
Jumlah Kematian Bayi Per Puskesmas Wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2024

NO	PUSKESMAS	LAHIR HIDUP	JUMLAH KEMATIAN POST NEONATUS (>28 HARI - 11 BULAN)
1	Kota Pangkajene	454	0
2	Bonto Perak	272	1
3	Minasate'ne	439	0
4	Kalabbirang	149	0
5	Bungoro	453	1
6	Bowong Cindea	218	0
7	Labakkang	253	1
8	Taraweang	306	0
9	Pundata Baji	248	0
10	Ma'rang	341	0
11	Padang Lampe	120	0
12	Segeri	203	0
13	Baring	113	0
14	Mandalle	186	0
15	Balocci	188	1
16	Bantimala	148	0
17	Lk. Tupabbiring	120	0
18	Sabutung	214	0
19	Sarappo	190	0
20	Lk. Kalmas	177	0
21	Pamantauang	136	0
22	Lk. Tangaya	204	0
23	Sailus	144	0
KABUPATEN		5,276	4
ANGKA KEMATIAN BAYI		0,75/1000 Kelahiran Hidup	

Selain dihitung berdasarkan IKU Dinas Kesehatan Tahun 2023, AKB juga dihitung berdasarkan definisi operasional pada Dokumen Indikator Program Kesehatan Masyarakat dalam RPJMN dan Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020 – 2024 maka Kematian bayi adalah bayi usia 0 -11



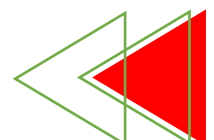


bulan (termasuk neonatal) yang meninggal di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu.

Untuk itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tetap menghitung indikator AKB sesuai dengan definisi operasional ini. Jika dihitung kematian bayi usia 0 – 11 bulan (termasuk neonatal) maka jumlah kasus kematian bayi mengalami penurunan pada tahun 2024. Pada Tahun 2022 jumlah kematian bayi 50 kasus kematian 5.399 kelahiran hidup sehingga didapatkan AKB 9,3/1.000 KLH. Pada tahun 2023 juga terdapat 61 kasus kematian bayi dengan 5.481 kelahiran hidup sehingga didapatkan AKB 11,13/1.000 KLH. Sedangkan pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 42 kasus kematian bayi diantara 5.276 kelahiran hidup sehingga didapatkan AKB 7,9/1.000 KLH. Hal ini menunjukkan bahwa program - program untuk mengurangi angka kematian bayi sudah dijalankan dengan baik, mulai dari program pelayanan kesehatan ibu hamil, program imunisasi, pencegahan penyakit menular pada anak - anak, program ASI Eksklusif, program gizi masyarakat serta pemberian makanan sehat untuk ibu hamil.

Dalam pencapaian target **“Angka Kematian Bayi”** terdapat **Faktor Penghambat** yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Tempat kematian terbanyak adalah pada faskes rujukan/rumah sakit, dengan penyebab kematian seperti gangguan pernapasan, BBLR, kelahiran prematur, kejang demam/febris, diare dan infeksi;
2. Dari segi pelayanan bahwa tindakan pencegahan, deteksi dini komplikasi dan tata laksana tidak adekuat terutama kasus kegawat darurat neonatal oleh karena sarana dan prasarana yang belum memadai dan keterampilan petugas yang belum optimal;
3. Kondisi pengetahuan dan budaya masyarakat, dimana masih ada penolakan pengobatan/perawatan serta tidak mengikuti anjuran pengobatan/perawatan yang diberikan. Kondisi ini mengakibatkan keterlambatan dalam pemberian pertolongan sehingga mengakibatkan kematian bayi; serta
4. Kondisi geografis di kepulauan ditambah kondisi cuaca membuat rujukan menjadi sulit di lakukan.

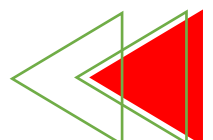




Adapun **Alternatif Pemecahan Masalah** Pencapaian Target Sasaran ” **Angka Kematian Bayi**” adalah sebagai berikut:

1. Perlunya Meningkatkan kerjasama lintas OPD dalam proses rujukan, diantaranya Dinas Sosial atau pihak Desa / Kelurahan serta Camat dalam kepentingannya memperhatikan keluarga ibu hamil yang ditinggalkan ketika ibu hamil harus tinggal di Rumah Tunggu Kelahiran terutama kepada anak – anaknya yang tidak mempunyai sanak saudara yang lain dan memberikan bantuan sosial bagi masyarakat miskin.
2. Kerjasama lintas sektor juga semakin ditingkatkan dalam hal edukasi kepada masyarakat tentang tanda – tanda bahaya kehamilan atau sosialisasi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) sehingga masyarakat sadar dan segera ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan jika ada tanda – tanda bahaya tersebut, sehingga mau merujuk keluarganya.
3. Fasilitas pelayanan kesehatan rujukan harus lebih memaksimalkan pelayanan ibu melahirkan, bayi sakit, sehingga kematian bayi dapat ditekan. Hal ini dapat dilakukan dengan peningkatan jumlah dan mutu tenaga kesehatan yang menangani persalinan.
4. Upaya penurunan Kasus Kematian Ibu dapat dilakukan dengan pendampingan/pemantauan ibu hamil di setiap wilayah Puskesmas oleh masing - masing bidan, kalau perlu dengan memakai aplikasi Bidan eKohor, yang dihubungkan dengan Tele - CTG sehingga bisa mendeteksi dengan cepat factor - faktor resiko dan bisa melakukan penanganan dengan segera termasuk rujukan. Selain itu perlu diaktifkan lagi kelas ibu hamil dan kunjungan dari rumah ke rumah (door to door).
5. Upaya menekan kematian ibu dan bayi untuk ibu hamil dari daerah terpencil dan sulit baik wilayah kepulauan maupun wilayah pegunungan dapat menggunakan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) di beberapa puskesmas daratan termasuk RTK kabupaten, pegunungan dan kepulauan yang telah disediakan di dekat Rumah Sakit Rujukan.

Adapun persebaran kematian bayi (0 – 11 bulan) sesuai dengan wilayah kerja puskesmas di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdapat pada tabel berikut:





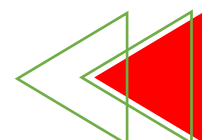
Tabel 41
Jumlah Kematian Bayi Per Puskesmas Wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024

NO	PUSKESMAS	LAHIR HIDUP	JUMLAH KEMATIAN BAYI (NEONATAL + POST NEONATAL)
1	Kota Pangkajene	454	0
2	Bonto Perak	272	2
3	Minasate'ne	439	3
4	Kalabbirang	149	1
5	Bungoro	453	6
6	Bowong Cindea	218	1
7	Labakkang	253	1
8	Taraweang	306	1
9	Pundata Baji	248	4
10	Ma'rang	341	5
11	Padang Lampe	120	1
12	Segeri	203	2
13	Baring	113	0
14	Mandalle	186	3
15	Balocci	188	2
16	Bantimala	148	1
17	Lk. Tupabbiring	120	3
18	Sabutung	214	2
19	Sarappo	190	2
20	Lk. Kalmas	177	0
21	Pamantauang	136	0
22	Lk. Tangaya	204	1
23	Sailus	144	1
KABUPATEN		5,276	42
ANGKA KEMATIAN BAYI		7,9/1000 Kelahiran Hidup	

c. Prevalensi Stunting

Untuk capaian indikator ketiga “Prevalensi Stunting” dengan target 9,10% telah dicapai tahun 2024 dengan realisasi 9,32%. Dengan demikian maka capaian untuk indikator ini pada tahun 2024 adalah 97,6%.

Capaian tahun 2024 ini, menurun dibandingkan tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 senilai 111% dan tahun 2022 yaitu 123,49%. Namun jika dilihat dari





penurunan prevalensi stunting, dari tahun 2022 sampai tahun 2024 selalu mengalami penurunan yaitu dari tahun 2022 yaitu 10,60%, tahun 2023 yaitu 10% dan tahun 2024 yaitu 9,32%. Meskipun menurun, capaian pada tahun 2024 ini tidak mencapai target karena naiknya target kinerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2024. Penurunan prevalensi stunting ini belum mencapai target yang telah ditentukan sesuai dengan versi ePPGBM.

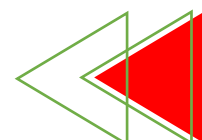
Adapun persebaran prevalensi stunting sesuai dengan wilayah kerja puskesmas di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdapat pada tabel berikut:

Tabel 42
Prevalensi stunting Per Puskesmas Wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2024

NO	PUSKESMAS	Jumlah Anak Diukur	Stunting	Prevalensi Stunting (%)
1	KOTA PANGKAJENE	1686	96	5.69
2	BONTO PERAK	1012	129	12.75
3	MINASA TE'NE	1894	119	6.28
4	KALABBIRANG	659	39	5.92
5	BUNGORO	1901	183	9.63
6	BOWONG CINDEA	878	160	18.22
7	LABAKKANG	994	126	12.68
8	TARAWEANG	975	186	19.08
9	PUNDATA BAJI	842	45	5.34
10	MA'RANG	1705	280	16.42
11	PADANG LAMPE	594	28	4.71
12	SEGERI	876	93	10.62
13	BARING	511	22	4.31
14	MANDALLE	669	74	11.06
15	BALOCCI	933	79	8.47
16	BANTIMALA	522	67	12.84
17	LIUKANG TUPABBIRING	500	68	13.60
18	SARAPPO	1076	43	4.00
19	SABUTUNG	1203	81	6.73
20	LIUKANG KALMAS	904	27	2.99
21	PAMANTAUANG	436	32	7.34
22	LIUKANG TANGAYA	1271	82	6.45
23	SAILUS	653	55	8.42
	KABUPATEN	22694	2114	9.32

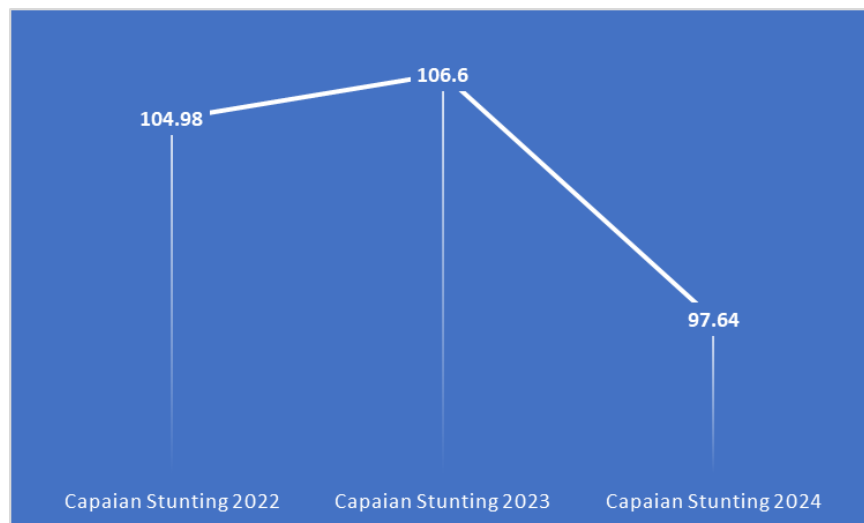
Adapun perbandingan Capaian Dinas Kesehatan untuk Indikator Prevalensi Stunting tahun 2022 – 2024, berdasarkan target pada Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 31



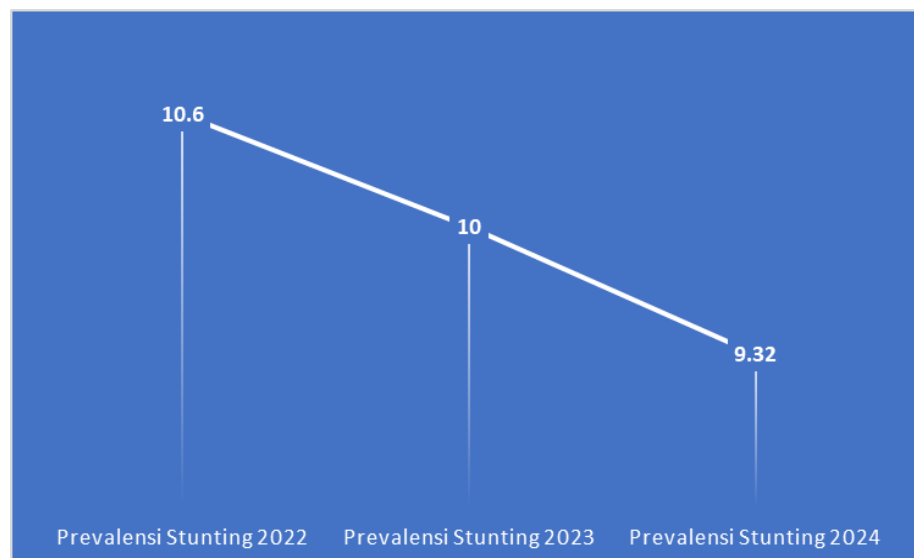


Perbandingan Capaian Dinas Kesehatan Indikator Prevalensi Stunting Tahun 2022 – 2024

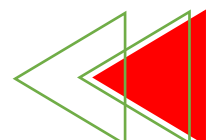


Adapun perbandingan Realisasi Dinas Kesehatan untuk Indikator Prevalensi Stunting tahun 2022 – 2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 32 Perbandingan Realisasi Dinas Kesehatan Indikator Prevalensi Stunting Tahun 2022 – 2024



Berdasarkan hasil kumpulan data antropometri balita yang dihimpun dalam Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (ePPGBM), prevalensi stunting Kabupaten Pangkep pada tahun 2024 telah mengalami penurunan sebesar 0,68% dibanding tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh penguatan pencegahan stunting dan surveilans gizi dengan melakukan pemantauan



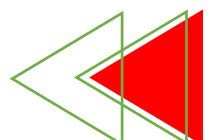


tumbuh kembang balita secara rutin oleh tenaga kesehatan bersama kader kesehatan di posyandu serta lintas sektor terkait. Dinas Kesehatan telah memberikan pelatihan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita bagi kader Posyandu/PAUD/TK/RA untuk meningkatkan keterampilan kader dalam melakukan pemantauan kembang balita mulai dari penimbangan berat badan dan pengukuran panjang badan/tinggi badan bayi dan balita serta deteksi dini tumbuh kembang balita dengan menggunakan buku KIA (Kesehatan Ibu dan Anak). Kegiatan pemantauan tumbuh kembang yang dilakukan secara rutin sebagai deteksi dan intervensi dini terhadap permasalahan gizi balita di wilayah kerja puskesmas, termasuk masalah stunting.

Dinas Kesehatan juga telah melaksanakan Pelatihan Konseling Menyusui dan Pelatihan Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) kepada petugas gizi dan bidan di puskesmas. Tujuan pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan petugas gizi dan bidan dalam memberikan konseling pemberian ASI Eksklusif dan Makanan Pendamping ASI kepada orang tua balita di wilayah kerja puskesmasnya agar dapat mempertahankan/meningkatkan status gizi balita sehingga kejadian stunting dapat dicegah.

Adanya Program Pemberian Makanan Tambahan Lokal (PMT Lokal) kepada ibu hamil KEK (Kurang Energi Kronik) dan balita bermasalah gizi di puskesmas serta adanya dukungan Program Inovasi PAPPADACENG GIZI dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berupa penguatan program intervensi penanganan stunting memberikan dampak positif dalam meningkatkan status gizi ibu hamil dan balita sehingga dapat mencegah terjadinya stunting.

Selain intervensi dalam rangka pencegahan stunting, ada juga intervensi yang dilaksanakan pada sasaran balita yang mengalami stunting yaitu pemberian Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus (PKMK). PKMK ini terlaksana atas kerja sama dengan Pemprov Sulsel dalam hal ini adalah RSUD Haji Makassar beserta RSUD Batara Siang Pangkep dan Dinas Kesehatan. Balita stunting yang telah diaring oleh puskesmas selanjutnya dirujuk ke RSUD Batara Siang untuk dilakukan skrining lanjutan oleh Dokter Ahli Anak. Setelah mendapatkan persetujuan dari Dokter Ahli Anak maka seorang balita stunting bisa mendapatkan bantuan PKMK dari RSUD Haji Makassar. Tujuan PKMK ini adalah mengatasi gagal tumbuh pada anak, mengurangi kegagalan pertumbuhan pada anak sakit serta mengejar pertumbuhan anak.

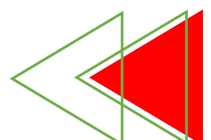




Selain itu penguatan koordinasi dan kerja sama Dinas Kesehatan dengan lintas sektor terkait dalam pencegahan stunting berupa upaya intervensi stunting terintegrasi melalui kegiatan konvergensi intervensi spesifik dan sensitif. Upaya yang melibatkan berbagai sektor terkait sampai pada level desa/kelurahan ini memberikan kontribusi terhadap penurunan prevalensi stunting. Faktor pendukung dari lintas sektor ini kepada dinas kesehatan dan puskesmas diharapkan dapat terus terlaksana demi percepatan penurunan stunting.

Dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan” dari ketiga indikator tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berupaya meningkatkan upaya pelayanan Kesehatan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

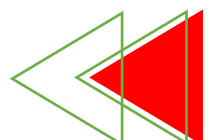
1. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat:
 - a. Kegiatan Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota
 - 1) Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dinas Kesehatan)
 - 2) Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan (Dinas Kesehatan)
 - 3) Pengembangan Puskesmas (Dinas Kesehatan)
 - 4) Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya (RS Batara Siang)
 - 5) Rehabilitasi dan pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya (DINAS KESEHATAN)
 - 6) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (DINAS KESEHATAN)
 - 7) Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (DINAS KESEHATAN)
 - 8) Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan (Dinas Kesehatan)
 - 9) Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan (Dinas Kesehatan)
 - 10) Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya (RS Batara Siang)





- 11) Sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit (RS Batara Siang)
 - 12) Sub kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RS Batara Siang)
 - 13) Sub kegiatan Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya (RS Batiling)
 - 14) Sub kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RS Batiling)
 - 15) Sub kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan (RS Pratama Sailus)
- b. Kegiatan Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota
- 1) Sub Kegiatan Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak (Puskesmas)
 - 2) Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil.
 - 3) Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin.
 - 4) Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir.
 - 5) Pengelolaan pelayanan kesehatan balita.
 - 6) Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat.
 - 7) Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat (Dinas Kesehatan dan puskesmas)

Berikut ini tabel hasil Analisa efesiensi penggunaan sumberdaya dalam **Sasaran Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat :**





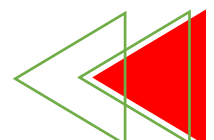
Tabel 43
Sasaran Meningkatnya Status Kesehatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Capaian Keuangan (%)	Tingkat Efisiensi	Kategori
1	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		127.00	85.97	1.43	Sangat Efisiensi
		Angka Kematian Ibu (per 100.000 Kelahiran Hidup)	108			
		Angka Kematian Ibu (per 1.000 Kelahiran Hidup)	175.4			
		Prevalensi Stunting	97.5			

Gambar
Pembangunan Puskesmas Kota Pangkajene



Gambar
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil





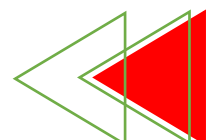
**Gambar
Pembangunan Gedung PSC**



**Gambar
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin**

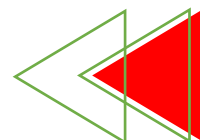


**Gambar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita**





Gambar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir





SASARAN 2

Meningkatnya Kepuasan Bidang Kesehatan

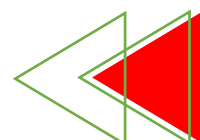
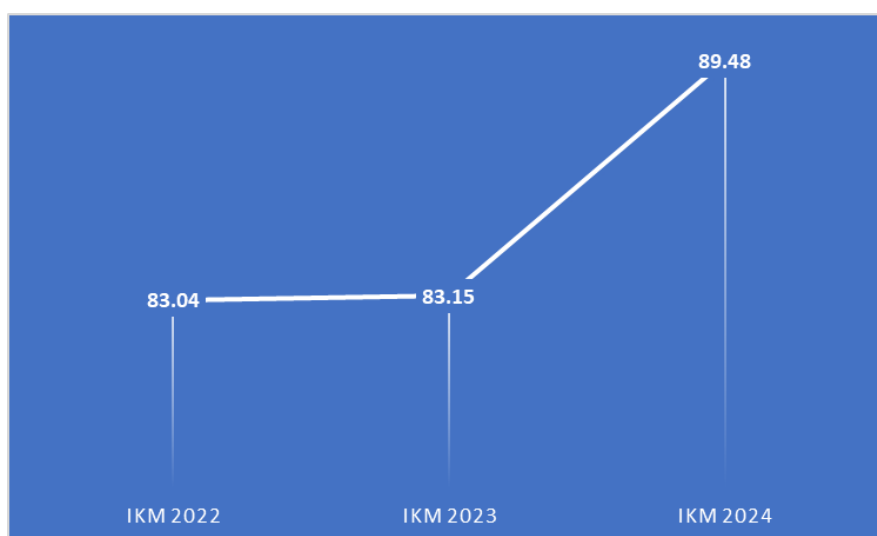
Tabel berikut menjelaskan mengenai gambaran target dan realisasi pada sasaran Meningkatkan Kepuasan Bidang Masyarakat;

Tabel 44
Capaian Kinerja Sasaran “Meningkatnya Kepuasan Bidang Kesehatan” Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	satuan	2023		Capaian (%)
			Target	Realisasi	
1	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Nilai	78.50	89.48	113.99
Rata - Rata Capaian Sasaran					113.99

Untuk tahun 2024, capaian kinerja indikator pada sasaran 2 menunjukkan kinerja yang *Sangat Tinggi* yaitu 113,99%, dengan target Indeks Kepuasan Masyarakat 78,50% dan realisasi 89,48%. Untuk Realisasi IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2022 yaitu 83,04%, tahun 2023 yaitu 83,15% dan tahun 2024 yaitu 89,48%.

Grafik 33
Perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Tahun 2022 – 2024





Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan. Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jejaring sosial.

Tentunya keluhan tersebut, jika tidak ditangani memberikan dampak buruk terhadap pemerintah. Lebih jauh lagi adalah dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan.

Mengingat unit layanan publik sangat beragam, untuk memperoleh Indeks Pelayanan Publik secara nasional maka dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat diperlukan metode survei yang seragam sebagaimana diatur didalam pedoman PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2017.

Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan jajarannya sebagai salah satu Perangkat Daerah melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan. Survey ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Adapun tahapan Survey Kepuasan Masyarakat sebagai berikut:

A. Persiapan

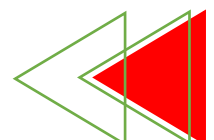
1. Pelaksana Survei

Pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri oleh Tim Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di RSUD Batara Siang Kabupaten Pangkep.

2. Penetapan Waktu Pelaksanaan Survey

Survey dilakukan setiap bulan sekali dan dibuat dalam bentuk laporan Survei Kepuasan Masyarakat Per Semester di tahun 2023

- a. Rawat Jalan dan Unit Penunjang dilaksanakan secara Random per bulan sampai mencukupi sampel berdasar Rumus Kreiji Morgan.





- b. Rawat Inap dilaksanakan survei kepada setiap pasien rawat inap yang telah dirawat 2 x 24 jam atau sudah akan dipulangkan sampai memenuhi sampel berdasar Rumus Kreiji Morgan.
3. Persiapan Pelaksanaan
 - a. Penyusunan Kuesioner.
 Untuk menyusun IKM ini digunakan kuesioner yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
 Kuesioner secara umum, hanya 1 lembar yang berisi :
 - 1) Judul kuesioner, tanggal dilakukan survey dan unit pelayanan yang disurvei.
 - 2) Identitas responden
 - 3) Daftar pertanyaan/ Pernyataan yang terstruktur dengan jawaban pilihan ganda.
 - 4) Pilihan jawaban terdiri dari 4 kategori sebagai contoh :
 - a) Tidak baik, diberi nilai persepsi 1
 - b) Kurang baik diberi nilai persepsi 2
 - c) Baik diberi nilai persepsi 3
 - d) Sangat baik diberi nilai persepsi 4
 - b. Langkah Pengolahan Data

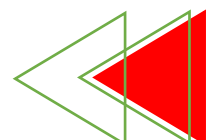
Berikut ini merupakan interpretasi terhadap persepsi penilaian IKM :

Tabel 45
Persepsi Penilaian IKM MUTU PELAYANAN

MUTU PELAYANAN		
A	SANGAT BAIK	88,31 – 100,0
B	BAIK	76,61 – 88,30
C	KURANG BAIK	65,00 – 76,60
D	TIDAK BAIK	25,00 – 64,99

B. Penetapan Responden dan Lokasi

1. Responden ditetapkan berdasarkan Rumus Kreiji Morgan,
2. Lokasi dilaksanakannya survey yaitu di ruang pelayanan langsung, dimana pasien dan keluarga pasien mendapatkan pelayanan, seperti di Ruang





Rawat Jalan, Rawat Inap, IGD, IGD PONEK, ICU, Laboratorium, Farmasi, Radiologi.

A. Cara Pengumpulan Data

Data dikumpulkan per minggu dan dilakukan analisa laporan survey kepuasan masyarakat per tiga bulan atau per Semester sebagai Laporan.

B. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul selanjutnya dilakukan pengolahan yang dilakukan secara kuantitatif dengan mempergunakan aplikasi Excel.

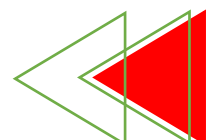
C. Penyusunan Laporan

Hasil survey disusun dalam bentuk laporan yang menyajikan informasi tentang kualitas pelayanan yang diberikan oleh instansi. Hasil ini juga dapat dijadikan sebagai bahan dasar pengusulan peningkatan pelayanan publik atau sebagai upaya perbaikan mutu pelayanan yang berfokus pada keselamatan pasien.

Realisasi indikator Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kesehatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 46
Realisasi IKM Lingkup Dinas Kesehatan Kab, Pangkep Tahun 2024

No	Nama Instansi	Nilai IKM
1	RS BATARA SIANG	78.59
2	RS PRATAMA BATILING	84.75
3	KOTA PANGKAJENE	92
4	BONTO PERAK	92.3
5	MINASATE'NE	93
6	KALABBIRANG	95.13
7	BUNGORO	76.6
8	BOWONG CINDEA	94
9	LABAKKANG	92.41
10	PUNDATA BAJI	88.84
11	TARAWANG	90.9
12	MA'RANG	86.49
13	PADANG LAMPE	89.67
14	SEGERI	97.5
15	BARING	78
16	MANDALLE	85
17	BALOCCI	90
18	BANTIMALA	85.64
19	LK.TUPABBIRING	83.52
20	SARAPPO	95.74
21	SABUTUNG	95.74
22	LK.TANGAYA	95.13
23	SAILUS	90.2
24	LK.KALMAS	89.34
25	PAMANTAUANG	96.5
TOTAL		2236.99
CAPAIAN IKM DINAS KESEHATAN		89.48

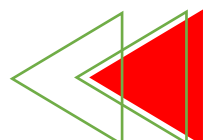




Dari tabel diatas, dapat dijelaskan upaya yang dilakuakn oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam mendukung Sasaran Strategis Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan melalui Program, kegiatan dan sub kgiatan sebagai berikut:

1. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT:

- a. Kegiatan Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota
 - 1) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
 - 2) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
 - 3) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
 - 4) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (Dinas Kesehatan)
 - 5) Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif
 - 6) Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (dinas kesehatan)
 - 7) Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan (dinas Kesehatan)
 - 8) Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
 - 9) Pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya
 - 10) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
 - 11) Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular
 - 12) Penyelenggaraan kabupaten/kota sehat
 - 13) Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
 - 14) Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
 - 15) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis
 - 16) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV
 - 17) Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan (puskesmas)
 - 18) Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat
 - 19) Pengelolaan surveilans Kesehatan
 - 20) Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular
 - 21) Operasional pelayanan puskesmas
 - 22) Operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya (Labkesmas)
 - 23) Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (Kejadian ikutan pasca





imunisasi dan pemberian obat massal)

24) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)

25) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi

26) Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (RS Batiling)

27) Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (RS Pratama Sailus)

b. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi

1) Pengelolaan data dan informasi kesehatan (Dinas Kesehatan), terdiri dari :

c. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1) Peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan (Labkesmas) terdiri dari :

2. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

a. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota

1) Pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia Kesehatan

b. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

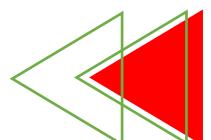
3. PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN

a. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

1) Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

b. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan dan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

1) Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman





Industri Rumah Tangga

- 2) Pemeriksaan post market pada produk makanan - minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan

4. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

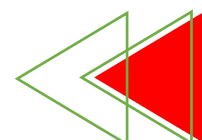
- a. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

Beberapa dokumentasi kegiatan pada Sasaran Strategis **Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Bidang Kesehatan** sebagai berikut:

Gambar
Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar



Gambar
Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut





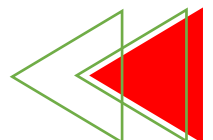
**Gambar
Kalibrasi Alat Kesehatan**



**Gambar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif**

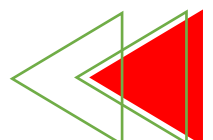


**Gambar
Pelatihan Integrasi Layanan Primer**





Gambar
Rapat Koordinasi Sistem Informasi Sumber Daya Kesehatan





SASARAN STRATEGIS 10

Meningkatnya Daya Beli Masyarakat

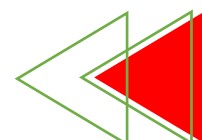
Daya beli masyarakat adalah kemampuan konsumen untuk membeli barang dan jasa dengan pendapatan yang mereka miliki. Ini mencerminkan seberapa besar pendapatan yang tersedia bagi masyarakat untuk dibelanjakan setelah memenuhi kebutuhan dasar. Daya beli masyarakat merupakan salah satu indikator kondisi perekonomian suatu daerah.

Daya beli masyarakat dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain: (a) pendapatan masyarakat, semakin tinggi pendapatan semakin besar daya beli; (b) harga barang dan jasa (inflasi), kenaikan harga dapat menurunkan daya beli; (c) ketersediaan barang dan jasa, kelangkaan barang dapat membatasi daya beli; (d) distribusi pendapatan, jika pendapatan terkonsentrasi pada sekelompok kecil masyarakat, maka daya beli mayoritas masyarakat akan rendah; (e) kebijakan pemerintah, kebijakan pemerintah seperti pajak dan subsidi dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Daya beli yang tinggi menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang baik dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan konsumsi. Namun sebaliknya daya beli yang rendah dapat mengindikasikan masalah ekonomi seperti resesi atau inflasi tinggi.

Tabel 47
Pencapaian Sasaran Strategis 10 Meningkatnya Daya Beli Masyarakat

Indeks Kinerja Utama	Capaian 2023	2024			Target Akhir RPJMD (2026)	Capaian s.d. 2023 terhadap 2026 (%)
		Target	Realisasi	% Realisasi		
Indeks pengeluaran per kapita	76.32	75.97	77.3	101.75	76.09	101.59

Pada Tabel diatas diketahui bahwa indikator Sasaran Strategis Meningkatnya Daya Beli Masyarakat yang diukur dengan Indeks Pengeluaran Perkapita Disesuaikan pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 101,75% atau kategori sangat baik dengan realisasi capaian sebesar 75,97 dari target sebesar 74,10.





Pengeluaran per kapita merupakan penyesuaian indeks harga konsumen dan penurunan utilitas marginal, dari kedua hal ini pengeluaran perkapita dapat digambarkan dari tingkat daya beli masyarakat dan melihat progres pembangunan manusia di suatu wilayah. Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli.

Data pengeluaran dapat mengungkap tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat kesejahteraan.

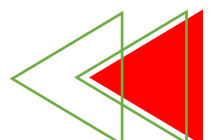
Tabel 48
Perkembangan Indeks Daya Beli Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2019 s.d. 2024

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pangkep	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pengeluaran	74,12	74,15	74,46	75,24	76,32	77,30
Paritas Daya Beli (Pengeluaran)	11.392	11.405	11.519	11.817	12.241	12.643

Perkembangan indeks daya beli selama tahun 2019 - 2022 menunjukkan perkembangan yang meningkat. Pada tahun 2019 menunjukkan angka indeks daya beli sebesar 74,12 dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 77,30. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan indeks daya beli di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menunjukkan peningkatan yang masih kecil sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkannya.

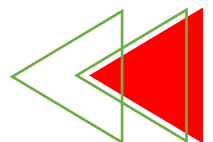
Strategi Peningkatan Daya Beli Masyarakat merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan indeks daya beli tersebut. Potensi-potensi ekonomi yang selanjutnya diakumulasi dalam bentuk perencanaan ekonomi yang dapat meningkatkan indeks daya beli masyarakat. Beberapa program yang dapat dilakukan untuk meningkatkan daya beli adalah :

1. Subsidi bunga bank bagi UMKM melalui alokasi APBD;
2. Peningkatan alokasi APBD untuk bidang ekonomi;
3. Membuka lapangan kerja melalui pengembangan UMKM;
4. Pelatihan ketrampilan dan wira usaha;





5. Fasilitasi usaha dan pembinaan UMKM;
6. Fasilitasi permodalan dengan bunga rendah bagi UMKM;
7. Integrasi kebijakan kependudukan dan kebijakan ekonomi daerah;
8. Bantuan langsung masyarakat dengan pola pemberdayaan masyarakat.





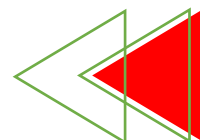
SASARAN STRATEGIS 11

Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan

Perempuan merupakan salah satu asset dalam pembangunan, peranannya sangat penting dalam berbagai aspek pembangunan, baik ekonomi, sosial, maupun budaya.

- | | |
|----------------|--|
| Bidang Ekonomi | : - Berperan sebagai petani, buruh tani dan pengolah hasil pertanian.
- Berperan sebagai pemain utama di industri kreatif, seperti film, sebagai sutradara, script writer, produser, hingga teknik audio video |
| Bidang Sosial | : - Berperan sebagai pendidik, pemimpin, dan inspirator dalam memperjuangkan kemerdekaan
- Berperan aktif dalam berbagai aspek perjuangan kemerdekaan, seperti pendidikan, organisasi sosial, serta dukungan logistik dan moral
- Berperan sebagai garda terdepan dalam mendidik anak-anak |
| Bidang Budaya | : - Secara kodrat, perempuan diciptakan sebagai makhluk Tuhan yang akan menjadi isteri untuk mengurus rumah tangganya berperan sebagai ibu rumah tangga, yang memberikan kasih sayangnya dan menjadi pendidik pertama dan utama bagi anak-anaknya
- Perempuan memiliki potensi besar untuk turut mengangkat nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) karena jumlah perempuan terutama pada usia produktif yang juga signifikan. |

Selain peran tersebut, Pemberdayaan Perempuan pun turut andil dalam bidang politik. Pemberdayaan perempuan merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas perempuan dalam masyarakat, sehingga dapat berpartisipasi lebih banyak dalam pengambilan keputusan dan pembangunan. Pemberdayaan perempuan juga bertujuan





untuk mewujudkan kesetaraan gender.

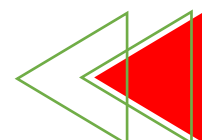
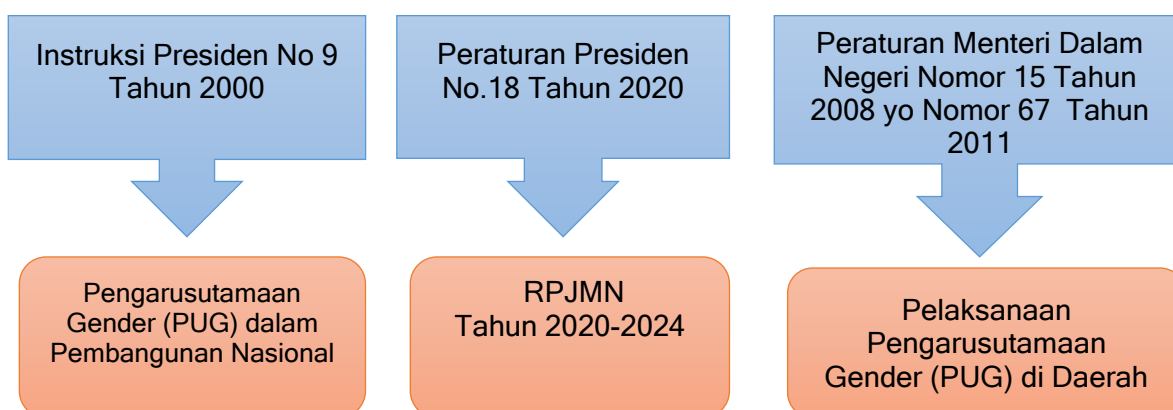
Kesetaraan gender menjadi salah satu tujuan dalam Sustainable Development Goals (SDGs) yang akan dicapai tahun 2030. Salah satu Indikator keberhasilan terwujudnya kesetaraan gender adalah Global Gender Gap Index (GGGI). Berdasarkan GGGI, Indonesia berada pada peringkat 87 dari 146 negara dengan nilai sebesar 0,697, semakin mendekati nilai 1 artinya kesetaraan gender semakin terwujud.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2023–2026 ada 5 (lima) isu prioritas yang menjadi fokus pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu:

1. Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dalam Kewirausahaan
2. Peningkatan peran ibu dalam Pendidikan anak
3. Penurunan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
4. Penurunan Pekerja Anak
5. Pencegahan Perkawinan Anak.

untuk menjawab tantangan tersebut di atas dibutuhkan sinergi dengan seluruh jaringan dan pemangku kepentingan untuk melakukan pendampingan, konsultasi, dan memperkuat komunikasi bagi perempuan. Dukungan penguatan kapasitas bagi perempuan, dan melakukan intervensi untuk memperkuat peran ekonomi perempuan. Pemerintah Terus mengupayakan terciptanya sistem pencegahan hingga penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berperspektif korban, serta memberdayakan peningkatan kepemimpinan perempuan.

Kebijakan pemerintah mengatasi kesenjangan gender dan pemenuhan hak anak di berbagai bidang didasari landasan operasionalnya antara lain:





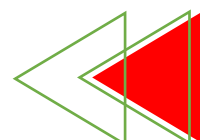
Kebijakan dimaksud bermanfaat dalam memberikan kontribusi besar dalam mengubah mindset individu dan kelompok masyarakat yang semakin sadar pentingnya kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak dalam berbagai bidang pembangunan.

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan.

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 mempunyai Visi Mewujudkan Masyarakat Madani yang Sejahtera, Unggul, Berdaya Saing dan Religius Berbasis Sumber Daya Lokal Berkelanjutan. Sedangkan Misi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan salah satunya adalah “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Produktif.”. dimana salah satu sasaran yang ingin dicapai dari misi ini adalah “Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan.

Misi dalam RPJMD, menunjukkan adanya perhatian dari pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terhadap pemberdayaan perempuan, dimana pemberdayaan perempuan tidak terlepas terhadap keberpihakan bagi perempuan, anak, serta penyandang disabilitas. Untuk mencapai visi dan misi tersebut, telah disusun berbagai strategi untuk peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak. Strategi tersebut diturunkan dalam kebijakan peningkatan pengarusutamaan gender (PUG) dan pemberdayaan perempuan dan anak (PUHA). Tingkat keberhasilan pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender saat ini telah dapat diukur, salah satunya adalah dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG).

Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan lima tahun terakhir mulai tahun 2019- 2023 mengalami kenaikan dan tahun 2024 belum dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Adapun peningkatan Indeks pembangunan Gender, kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dapat di lihat pada tabel berikut.





Tabel 49
Indeks Pembangunan Gender kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan Tahun 2019 – 2023

TAHUN	IPG	IPM
2019	99,16	68,29
2020	89,85	68,72
2021	89,97	69,21
2022	90,61	69,79
2023	90,76	70,59

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah dua indikator yang saling berkaitan dalam mengukur pembangunan suatu wilayah. IPG mengukur kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan, sedangkan IPM mengukur kualitas hidup manusia secara umum.

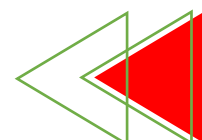
Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa Indeks Pembangunan gender lebih tinggi dari Indeks pembangunan manusia, hal ini menunjukkan bahwa pembangunan antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan semakin merata, di dukung dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2023 (70,59) dan tahun 2024 (71,22).

Adapun komponen-komponen dalam mengukur indeks Pembangunan Gender adalah Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH); Rata-rata lama sekolah (RLS); dan Harapan lama Sekolah (HLS).

Tabel 50
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2023 dan
Komponen Pembentuknya

Komponen	Laki-Laki	Perempuan	IPM Laki-laki	IPM Perempuan	IPG
Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH)	65,43	69,39			
Rata-rata lama Sekolah (RLS)	12,68	13,09			
Harapan Lama Sekolah (HLS)	8,73	8,07			
Nilai IPM dan IPG			75,34	68,38	90,76

Sumber : Badan Pusat Statistik





Pada tabel tersebut di atas nampak bahwa angka harapan hidup perempuan (69,39) lebih tinggi dibanding angka harapan hidup laki-laki (65,43), terjadi perbedaan peluang Rata-rata lama sekolah antara perempuan (13,09) dan laki-laki (12,68) dan terjadi perbedaan peluang harapan lama sekolah yang tidak signifikan antara laki-laki (8,73) dan perempuan (8,07). Sementara untuk Indeks IPM laki-laki sudah berada dalam kelompok tinggi, namun perempuan masih tertinggal capaiannya sehingga kesetaraan gender di kabupaten Pangkajene dan Kepulauan masih berada dalam kesetaraan menengah rendah dengan indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 90,76

Saat ini, IPG merupakan rasio antara IPM Perempuan dengan IPM laki-laki. Dengan demikian, IPG di bawah 100 berarti bahwa capaian pembangunan perempuan lebih rendah dari laki-laki.

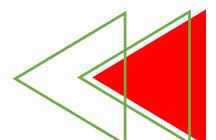
Berdasarkan laporan dari UNDP (2022), status capaian IPG dapat diukur sbb:

- Kesetaraan Gender Tinggi ($|IPG-100| \leq 2,5$)
- Kesetaraan Gender Menengah Tinggi ($2,5 < |IPG-100| \leq 5$)
- Kesetaraan Gender Menengah ($5 < |IPG-100| \leq 7,5$)
- Kesetaraan Gender Menengah Rendah ($7,5 < |IPG-100| \leq 10$)
- Kesetaraan Gender Rendah ($|IPG-100| > 10$)

Kesetaraan gender menjadi salah satu tujuan dari pembangunan berkelanjutan yang dirancang oleh PBB. Tujuan pembangunan berkelanjutan ke 5 (SDGS), yaitu “mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Hal ini bertujuan untuk mengakhiri diskriminasi, kekerasan dan praktik merugikan terhadap perempuan serta memastikan partisipasi penuh dan setara dalam berbagai aspek kehidupan. Kesetaraan gender merupakan kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh hak-hak dan kesempatan sebagai manusia agar mereka mampu berperan dan berpartisipasi dalam segala bidang seperti politik, ekonomi, sosial budaya.

Pemberdayaan gender di tataran nasional diukur dengan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Capaian Kinerja IDG Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 menggunakan angka realisasi tahun 2023, disebabkan data realisasi IDG Tahun 2024 belum rilis dari Badan Pusat Statistik (BPS). Capaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:



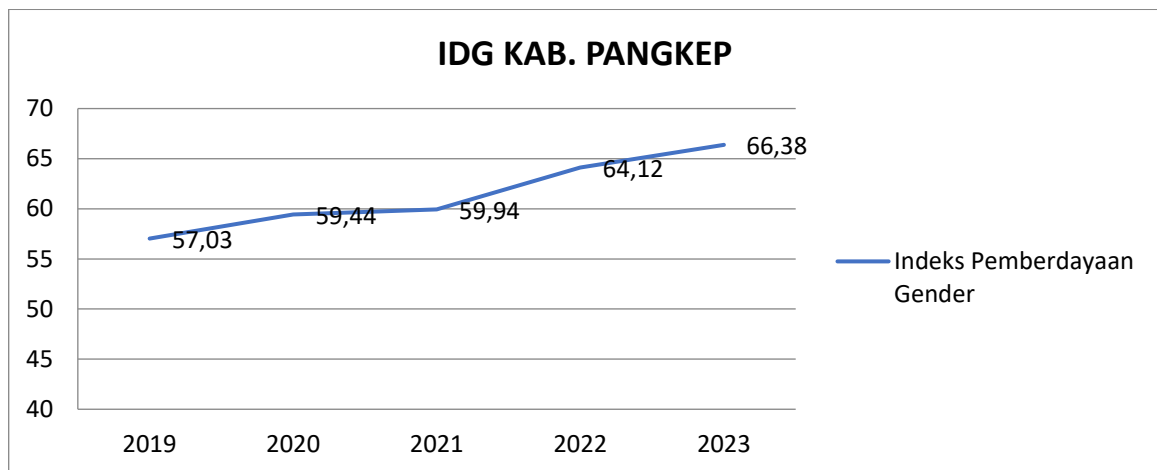


Tabel 51
Capaian Sasaran Strategis ke- 11: Meningkatnya Pemberdayaan
Perempuan dalam Pembangunan

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir RPJMD (2026)	Capaian 2024 terhadap Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	66,38	91,89	66,38	72,24	92,82	71,51

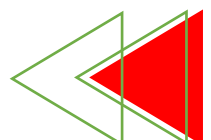
Sumber : Badan Pusat Statistik

Grafik 34
Perkembangan IDG Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2019 2023



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan tabel dan grafik tersebut menggambarkan bahwa capaian IDG Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 71,51% dengan mengacu pada realisasi IDG tahun 2023, demikian pula perkembangan IDG dengan menggunakan Hasil Long Form 2019 untuk tahun 2023 juga menunjukkan kenaikan, hal ini disebabkan oleh kenaikan nilai dari indikator IDG, yakni Keterlibatan perempuan dalam parlemen, Persentase perempuan sebagai tenaga profesional, dan Sumbangan pendapatan perempuan.



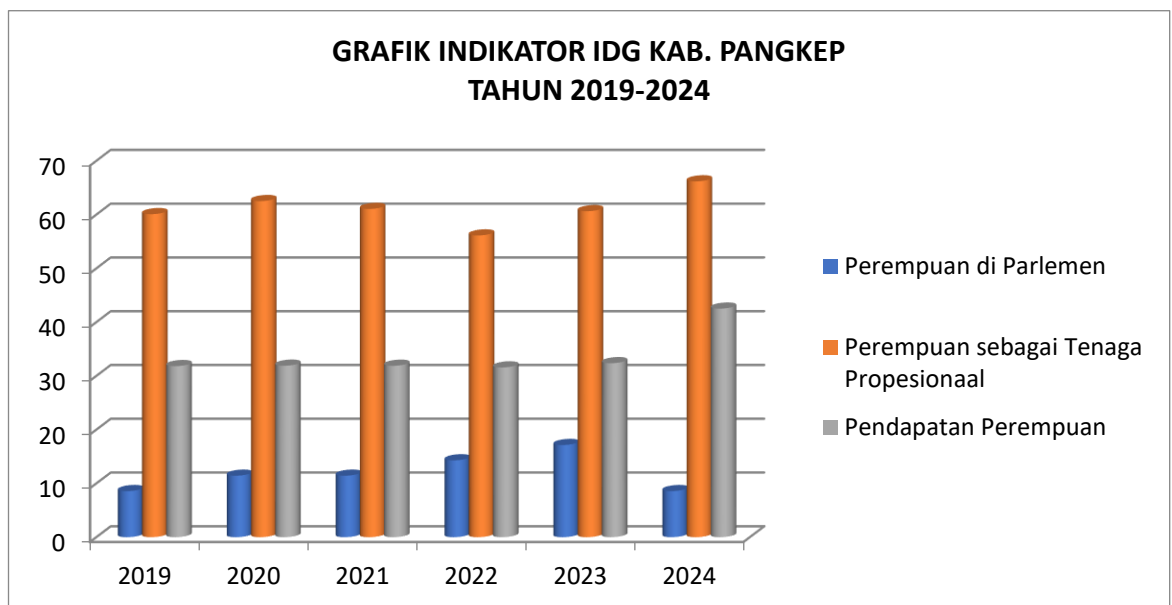


Tabel 52
Indikator Pembentuk IDG Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2019 s/d Tahun 2024

Tahun	Perempuan di Parlemen (%)	Perempuan sebagai Tenaga Profesional (%)	Pendapatan Perempuan (%)	IDG
2019	8,57	60,08	31,82	57,03
2020	11,43	62,51	31,89	59,44
2021	11,43	61,05	31,88	59,44
2022	14,29	56,12	31,57	64,12
2023	17,14	60,63	32,36	66,38
2024	8,57	66,18	42,51	-

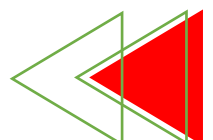
Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Dari tabel tersebut tercermin skord IDG yang diperoleh beberapa tahun ini mengalami peningkatan, kecuali keterwakilan perempuan di tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 8,57% dari 17,14% Tahun 2023 dan 8,57% tahun 2024. sementara dari tenaga profesional dan sumbangan pendapatan dari perempuan mengalami peningkatan yang signifikan.



Sumber : BPS Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024

Keterwakilan perempuan dalam dunia politik masih perlu diperjuangkan dimana. Total angka keterwakilan ini masih jauh dari standar yang telah ditetapkan secara global yakni 30%.





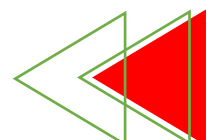
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN FORUM PARTISIPASI PUBLIK UNTUK KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN ANAK (FORUM PUSPA)



SOSIALISASI PEMBENTUKAN DESA/KELURAHAN RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK (D/KRPPA) SERTA PRAKTEK PEMBUATAN OLAHAN MAKANAN BERBAHAN DASAR POTENSI LOKAL



SOSIALISASI PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DHARMA WANITA PERSATUAN (DWP) KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2024

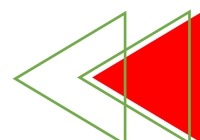




PENINGKATAN KAPASITAS DHARMA WANITA PERSATUAN MELALUI WORKSHOP TABLE MANNER



SOSIALISASI PENYUSUNAN DAN PEMANFAATAN DATA GENDER DAN ANAK DALAM PROSES PERENCANAAN





Tujuan Ke-5

Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Capaian 2024
75,44

SASARAN STRATEGIS 12

Persentase Kepatuhan Terhadap RTRW

Indikator Tujuan :

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

target 2024 : 75,44

Indikator Sasaran :

Persentase Kepatuhan terhadap RTRW target 2024 : 100 %

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup :

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Indikator yang digunakan dalam perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah :

1. Indeks Kualitas / Pencemaran Air (IKA)
2. Indeks Kualitas / Pencemaran Udara (IKU)
3. Indeks Kualitas Lahan (IKL)

Rincian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024

TARGET :

REALISASI :



IKA = 59,05

→ 68,34

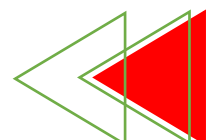
IKU = 78,33

→ 95,51

IKL = 52,69

→ 50,52

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu.





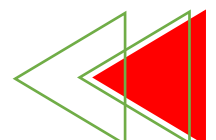
Berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup maka Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 3 (tiga) indikator, yaitu: **Indikator Kualitas Air (IKA)** yang diukur berdasarkan parameter TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli dan Total Coliform; **Indikator Kualitas Udara (IKU)** yang diukur berdasarkan parameter-parameter SO₂ dan NO₂; dan **Indikator Kualitas Lahan (IKL)** yang diukur berdasarkan data Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG).

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indonesia di 2024 tercatat mencapai **73,07 poin** atau naik 0,53 poin dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 72,54 poin dimana data ini diperoleh dari 32 Provinsi dan 220 Kabupaten/Kota. Nilai IKLH Indonesia sejak tahun 2018 hingga tahun 2024 terus meningkat. Berturut-turut nilainya 65,14; 66,55; 70,27; 71,45; 72,42; 72,54 dan tahun ini sebesar 73,07 poin. Nilai IKLH ini didapatkan dengan menghitung rata-rata terboboti dari tiga komponen utama, yaitu :

- Indeks Kualitas Air (IKA) : Mengukur Kualitas air Sungai, air laut dan kualitas air secara umum
- Indeks Kualitas Udara (IKU) : Menilai Kualitas udara di berbagai Lokasi
- Indeks Kualitas Lahan (IKL) : Memantau tutupan lahan dan vegetas

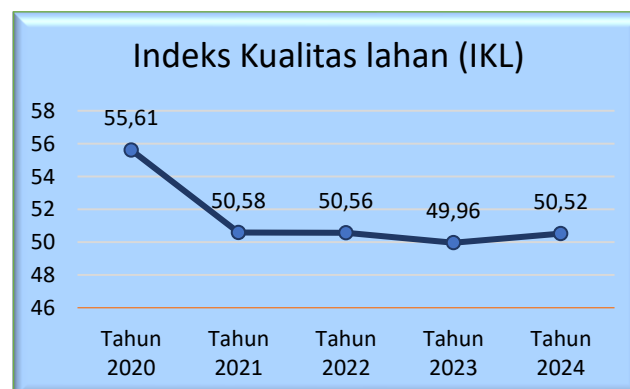
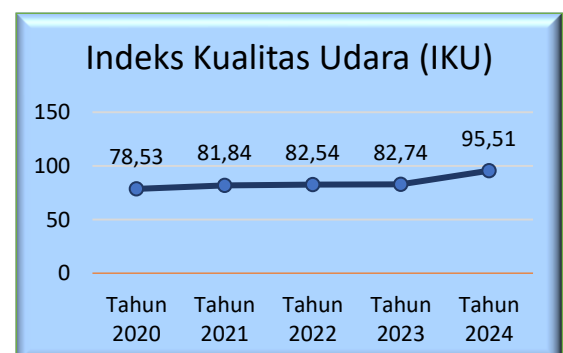
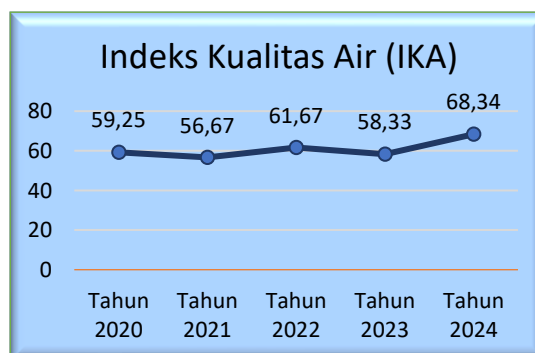
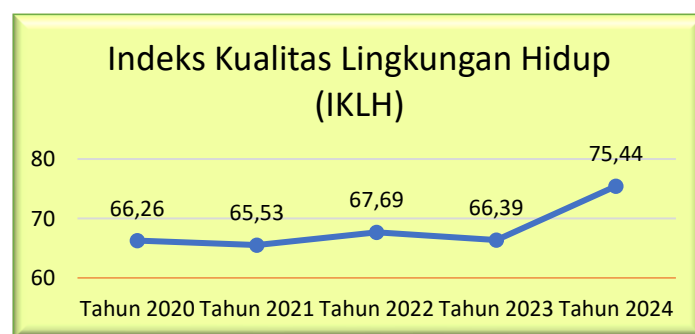
IKLH merupakan alat ukur yang dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mengevaluasi Kondisi lingkungan hidup di Indonesia.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan jika dilihat dari range waktu dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 cenderung mengalami peningkatan yaitu dari nilai 66,26 – 75,44 meskipun pada tahun 2021 sempat mengalami penurunan 65,53.

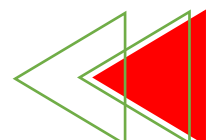




**INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (IKLH)
KABUPATEN PANGKEP
TAHUN 2020 - 2024**



Grafik 36
IKLH Kabupaten Pangkep dari tahun 2020-2024





Dari hasil pemantauan yang dilakukan pada Tahun 2023 baik menggunakan metode observasi/ survei lapangan, metode Grap Sample (sesaat), analisis laboratorium serta Passive. Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Skala Capaian Kinerja :

No.	Interval Nilai Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian	Kode
1.	Diatas 90 %	Sangat Tinggi	
2.	76 - 90 %	Tinggi	
3.	66 - 75 %	Sedang	
4.	51 - 65 %	Rendah	
5.	Dibawah 50 %	Sangat Rendah	

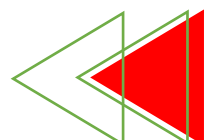
Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

Tabel 53
Analisis Pencapaian Tujuan Ke- 5
“Indeks Kualitas Lingkungan Hidup”

No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022	Tahun 2023			Capaian akhir RPJMD (2026)	Capaian s/d 2026 terhadap target akhir RPJMD
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)		
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	65,53	66,23	66,39	100,24	67,43	98,64



Jika dilihat dari Interval nilai Capaian Kinerja maka Capaian kinerja untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)** sebesar 100,24 % dan berada pada kriteria **Sangat Tinggi** , dimana capaian ini diperoleh dari target yang telah ditetapkan sebesar 66,23 %, dan realisasi tahun 2023 sebesar 66,39 %.





Tabel 54
 Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2023
 dan nilai komponen penyusun
“Indeks Kualitas Lingkungan Hidup”

NO.	INDIKATOR	INDEKS
1.	INDEKS KUALITAS AIR (IKA)	58,33
2.	INDEKS KUALITAS UDARA (IKU)	82,74
3.	INDEKS KUALITAS TUTUPAN LAHAN (IKLT)	49,96
INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP		66,39

Tabel 55
 Target dan Capaian Tahun 2023
“Indeks Kualitas Lingkunga Hidup”
 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

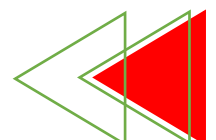
NO.	INDIKATOR	TARGET	CAPAIAN
1.	INDEKS KUALITAS AIR (IKA)	58,95	58,33
2.	INDEKS KUALITAS UDARA (IKU)	78,23	82,74
3.	INDEKS KUALITAS LAHAN (IKL)	51,23	49,96
INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (IKLH)		66,23	66,39

Adapun pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan diperoleh dari Indikator dan Parameter yang digunakan dalam mendapatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yaitu :



1. Indeks Kualitas Air (IKA)

Untuk Pemantauan Kualitas Air Sungai di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2023, metode yang digunakan adalah observasi/ survei lapangan meliputi penentuan titik sampling air, pengukuran parameter lapangan dan pengambilan sampel air. Pengambilan sampel air menggunakan metode Grap Sample (sesaat) serta analisis laboratorium.





Hasil Pengujian kualitas air selanjutnya digunakan untuk perhitungan jumlah masing-masing status mutu (baik, cemar ringan, cemar sedang dan cemar berat) untuk setiap data pemantauan seluruh lokasi dengan menggunakan Metode indeks Pencemar dengan mengacu pada baku mutu air kelas II sesuai lampiran VI Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

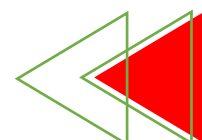
Dasar pertimbangan yang digunakan dalam penentuan lokasi prioritas titik pemantauan adalah :

1. Pada aliran sungai Kawasan hulu yang dianggap belum terpengaruh aktivitas manusia
2. Pada outlet daerah aliran sungai utama
3. Mewakili sumber pencemar (point dan no point sources)
4. Penetapan jumlah titik sampling harus representative mewakili hulu, tengah hilir pada wilayah administrasi.

Tabel 56
Lokasi Titik Pemantauan Air Sungai
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No.	SUNGAI	LOKASI
1.	Sungai Pangkajene Hulu	Desa Mangilu Kecamatan Bungoro
2.	Sungai Pangkajene Tengah	Kelurahan Minasatene Kecamatan Minasatene
3.	Sungai Pangkajene Hilir	Kelurahan Tekolabbua, Kecamatan Pangkajene
4.	Sungai Bantimala Hulu	Desa Tondongkura Kecamatan Tondong Tallasa
5.	Sungai Bantimala Tengah	Desa Bantimurung Kecamatan Tondong Tallasa
6.	Sungai Bantimala Hilir	Desa Bantimurung Kecamatan Tondong Tallasa

Lokasi pemantauan kualitas air sungai dalam 1 tahun berada pada 12 (Dua belas) titik pantau sungai dengan 6 lokasi, yaitu Sungai Pangkajene Hulu, Sungai Pangkajene Tengah, Sungai Pangkajene Hilir, Sungai Bantimala Hulu, Sungai Bantimala Tengah dan Sungai Bantimala Hilir. Dimana pada periode I (Bulan April-Oktober) kondisi mutu air dengan 6 titik pantau dalam kondisi “tercemar ringan” dan pada periode II (Bulan Oktober – April) 5 titik pantau juga dalam kondisi “baik”, 1 titik pantau dalam status “tercemar ringan”.





Peningkatan Indeks Kualitas Air pada tahun 2023 disebabkan meningkatnya kualitas air pada beberapa badan sungai dibandingkan pada tahun 2022 dimana pada periode Kedua (Bulan Oktober – Bulan April) hanya 1 titik pantau sungai yang tercemar berat .

Tabel 57
Penetapan Status Mutu Air Tahun 2023

NO	STATUS MUTU	NAMA TITIK PANTAU SUNGAI
PERIODE I (Bulan April – Oktober)		
1.	Baik (Memenuhi BM)	-
2.	Cemar Ringan	Pangkajene Hulu, Pangkajene Tengah, Pangkajene Hilir, Bantimala Hulu, Bantimala Tengah, Bantimala Hilir
3.	Cemar sedang	-
4.	Cemar berat	-
PERIODE II (Bulan Oktober – April)		
1.	Baik (Memenuhi BM)	Pangkajene Hulu, Pangkajene Tengah, Bantimala Hulu, Bantimala Tengah, Bantimala Hilir
2.	Cemar Ringan	Pangkajene Hilir
3.	Cemar sedang	-
4.	Cemar berat	-

Foto-Foto Pengujian Kualitas Mutu Air di titik pantau Sungai

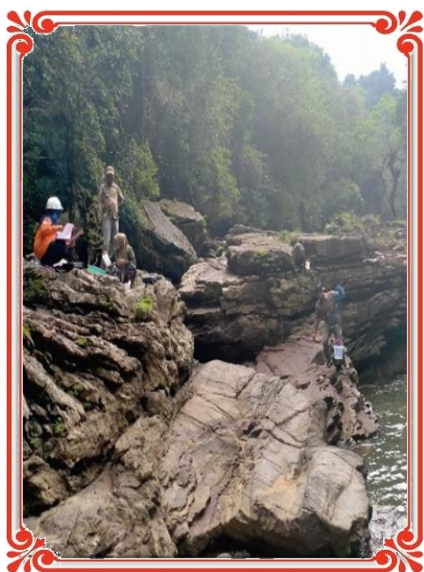
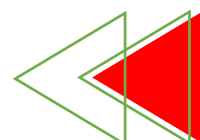


Foto 1. Pengujian mutu Air
Sungai Bantimala Hulu



Foto 2. Pengujian mutu Air
Sungai Bantimala Hulu



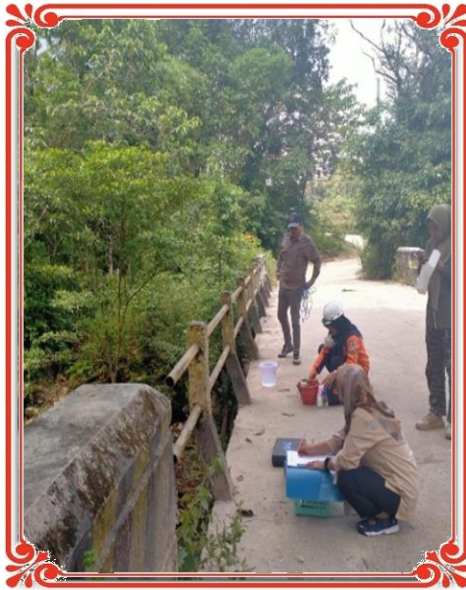


Foto 3. Pengujian mutu Air di Bantimala Tengah

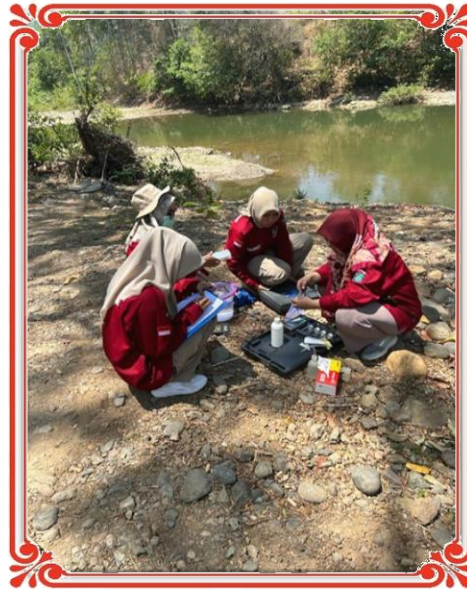


Foto 4. Pengujian mutu Air di Bantimala Hilir



Foto 5. Pengujian mutu Air di Pangkajene Hilir

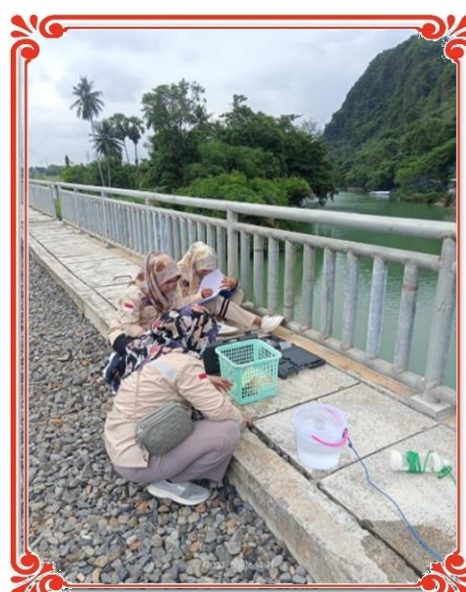
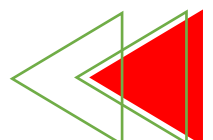
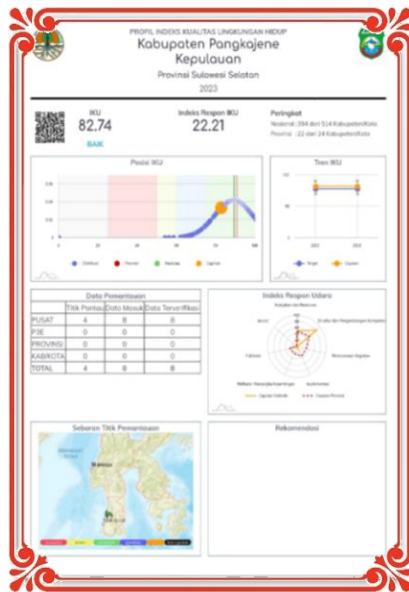


Foto 6. Pengujian mutu Air di Pangkajene Tengah





2. Indeks Kualitas Udara (IKU)

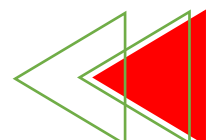


Dalam rangka pengendalian pencemaran udara, Kementerian Lingkungan Hidup melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan melakukan Kegiatan pemantauan kualitas lingkungan udara dengan metode Passive Sampler. Lokasi pemantauan terdiri dari: Daerah padat transportasi (jalan utama yang lalu lintasnya padat), Daerah/ kawasan Industri (bukan industrinya), Pemukiman padat penduduk (urban background), dan Kawasan komersil (perkantoran yang tidak terpengaruh langsung transportasi). Parameter yang diamati adalah gas hasil pembakaran bahan bakar fosil dan fasilitas industri lainnya (Sulfur dioksida, SO₂) dan senyawa Nitrogen dioksida (NO₂).

3. Indeks Kualitas Lahan (IKL)



Indeks Kualitas Lahan (IKL) merupakan nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG). Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) adalah suatu alat ukur yang mengukur tingkat kualitas penutupan lahan dalam suatu wilayah, dimana IKLH dibuat dengan mempertimbangkan beberapa factor seperti type dan luas dari tutupan lahan, stabilitas ekosistem dan tingkat degradasi lahan seperti lahan terbangun, sawah menjelang panen, sawah baru tanam, semak belukar, hutan tutupan padat,

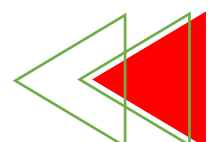




hutan tutupan sedang, hutan campuran, tanah terbuka dan badan air. Sedangkan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut adalah nilai yang menggambarkan kualitas Ekosistem Gambut yang merupakan nilai komposit dari beberapa parameter kualitas Ekosistem Gambut dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Kementerian Lingkungan Hidup melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan pemantauan dengan beberapa Komponen Indeks kualitas tutupan lahan meliputi : Hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan mangrove sekunder, hutan rawa primer, hutan rawa sekunder dan hutan tanaman, Belukar dan belukar rawa dalam Kawasan hutan (SKBH), Belukar dan belukar rawa dalam Kawasan lindung pada sempadan sungai, danau dan pantai serta lereng, rehabilitasi hutan dan lahan, Ruang terbuka Hijau yang berupa hutan kota atau taman kota, dan Taman Keanekaragaman hayati. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menyampaikan data IKTL berupa data Ruang Terbuka Hijau.

Dalam upaya pencapaian Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang baik di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan diperlukan upaya yang melibatkan stakeholder lainnya disamping perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan serta kelestarian lingkungan dalam mencapai Kualitas Lingkungan yang lebih baik.

Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tahun 2023 sebesar 100,24% sedangkan capaian indeks kualitas lingkungan hidup Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 74,29 % atau Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berada pada peringkat 14 dari 24 Kabupaten di Sulawesi Selatan dan Peringkat 274 dari 514 untuk skala Nasional. Adapun factor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian adalah :

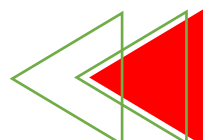




1. Tingkat pengawasan terhadap kegiatan/tempat usaha baik perusahaan besar maupun kecil selalu dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
2. Pemberian rekomendasi perijinan pembuangan air limbah dari industri rumah tangga maupun perusahaan selalu melalui kajian, sehingga pemberian ijin akan sesuai dengan daya tampung sungai Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
3. Air sungai merupakan bagian dari kegiatan masyarakat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, sehingga air sungai selalu diupayakan tetap terjaga dari hulu sampai hilir.
4. Dalam kelangsungannya, kualitas udara ditentukan tiga faktor. Pertama kebakaran hutan. Setelah itu pabrik industri dan kendaraan bermotor. Kualitas udara ditentukan kondisi geografis dimana hutan yang luas juga didukung minimnya pabrik industri sebagai salah satu pencemar udara.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian tujuan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah sebagai berikut :

1. Masih terjadi pencemaran sungai dari limbah rumah tangga dan limbah industri, terutama di daerah hilir sungai, ini dikarenakan kurangnya kesadaran dan kepatuhan dari beberapa pelaku usaha/ kegiatan dan masyarakat dalam pengelolaan limbahnya.
2. Masih terbatasnya kesadaran masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat antar lain perilaku membuang sampah di sembarang tempat bahkan di sungai.
3. Kebakaran lahan yang kerap terjadi pada musim kemarau
4. Kecenderungan alih fungsi lahan serta ketidakseimbangan antara pemanfaatan dengan penanaman pohon
5. Penambahan jumlah kendaraan serta masih banyaknya kendaraan yang berusia tua, menyebabkan peningkatan polusi udara





Solusi :

1. Peningkatan Pengawasan terhadap pembuangan air limbah yang berpotensi mencemari sungai
2. Memperketat pemberian izin pembuangan air limbah ke sungai dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung badan sungai
3. Melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap usaha yang pembuangan air limbah yang berpotensi mencemari sungai
4. Melakukan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar baku mutu lingkungan
5. Pembentukan, pendampingan, sosialisasi, promosi dan penguatan kelembagaan forum/ komunitas peduli sungai dan hutan

Adapun Dampak dari Pencemaran air, Udara dan Tutupan Lahan adalah sebagai berikut :



DAMPAK PENCEMARAN AIR

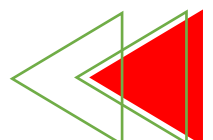
1. Terhadap Kesehatan Air yang tercemar dapat menjadi sumber penyakit menular, dapat membahayakan nyawa apabila mengandung bahan kimia berbahaya, dan pencemaran air dapat menyulitkan manusia untuk mendapatkan sumber air bersih.
2. Terhadap kehidupan biota air, banyaknya zat pencemar dalam air (misal sungai) akan menyebabkan kadar oksigen terlarut menurun dan dapat mengakibatkan kehidupan dalam air menjadi terganggu serta mengurangi perkembangannya
3. Terhadap estetika lingkungan perairan yang tercemar bisa ditandai dengan bau tak sedap dan kekeruhan yang mengurangi estetika lingkungan.

DAMPAK PENCEMARAN AIR

1. Terhadap Kesehatan udara tercemar dapat menyebabkan iritasi saluran pernafasan, iritasi muka, dan alergi kulit sampai pada timbulnya penyakit berbahaya seperti kanker dan gangguan terhadap system reproduksi.
2. Terhadap lingkungan udara yang dicemari asap/polusi tebal dapat mengganggu penglihatan sehingga mengurangi jarak pandang. Pencemaran udara juga mengakibatkan hujan asam yang dapat merusak lingkungan. Selain itu, pencemaran udara menjadi salah satu factor yang mempengaruhi terjadi pemanasan global yang dapat menimbulkan masalah lingkungan dalam skala global.

DAMPAK PENCEMARAN TUTUPAN LAHAN

1. Hilangnya kesuburan tanah mengakibatkan tanah menyerap sinar matahari terlalu banyak sehingga menjadi sangat kering dan gersang.
2. Turunnya sumber daya air dikarenakan pohon yang sangat berkontribusi dalam menjaga siklus air berkurang
3. Punahnya keanekaragaman hayati
4. Mengakibatkan banjir dan longsor diakibatkan kurangnya tutupan lahan sebagai penyerap air
5. Dalam skala global dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global yang mana dapat mempengaruhi iklim





Sasaran 5. Persentase Kepatuhan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah

Tabel 58
Analisis Pencapaian Sasaran Ke- 5
"Persentase Kepatuhan Terhadap RTRW"

No.	Sasaran Strategis	Capaian 2022	Tahun 2023			Capaian akhir RPJMD (2026)	Capaian s/d 2026 terhadap target akhir RPJMD
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)		
1.	Persentase Kepatuhan terhadap RTRW	100	100	53,5	53,5	100	53,5

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sasaran : Ketaatan terhadap RTRW dengan indikator Sasaran "Persentase ketaatan terhadap RTRW pada Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menghasilkan capaian kinerja 100%, dengan kriteria **Rendah** .

Adapun penjelasan indikator diuraikan sebagai berikut :

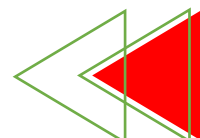
- Indikator Persentase ketaatan terhadap RTRW . Target tahun 2023 sebesar 100% dengan capaian/realisasi sebesar **53,5%** sedangkan untuk tahun 2022 capaian/realisasi sebesar **77,5 %** dengan target sebesar 100 %, atau mengalami penurunan sebesar **24%** dari tahun sebelumnya dengan target akhir renstra tahun 2026 sebesar 100 %.

Adapun data yang diperoleh tentang pemanfaatan lahan ini adalah tentang pemanfaatan lahan untuk kawasan permukiman yang sesuai dengan peruntukannya. Adalah sebagai berikut :

Persentase pemanfaatan lahan yang sesuai dengan rencana wilayah 2022

	INDIKATOR	TAHUN 2022	PERSENTASE
KRK	REKOMENDASI YANG KELUAR	138	93
	JUMLAH PEMOHON YANG MASUK	149	
KKPR	REKOMENDASI YANG KELUAR	17	85
	JUMLAH PEMOHON YANG MASUK	20	
		JUMLAH	89

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2022





Persentase pemanfaatan lahan yang sesuai dengan rencana wilayah 2023

	INDIKATOR	TAHUN 2023	PERSENTASE
KRK	REKOMENDASI YANG KELUAR	84	76
	JUMLAH PEMOHON YANG MASUK	110	
KKPR	REKOMENDASI YANG KELUAR	23	82
	JUMLAH PEMOHON YANG MASUK	28	
		JUMLAH	79

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2023

Metode atau cara yang dilakukan untuk mencapai target adalah dengan melakukan kegiatan sosialisai sehingga akan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya penataan ruang sehingga terkendalinya pemanfaatan ruang oleh masyarakat dengan Kebijakan meningkatkan pemahaman masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Faktor-faktor yang yang mempengaruhi capaian kinerja adalah karena adanya peningkatan pemanfaatan lahan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dengan dikeluarkannya rekomendasi sebanyak **107** terdiri atas Keterangan Rencana Kota (**KRK**) sebanyak **84** rekomendasi dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (**KKPR**) sebanyak **23** rekomendasi dari target **200** Lokasi atau sebesar **53,5 %** dari target , adanya peningkatan kegiatan survey dan pemetaan serta Pengendalian Pemanfaatan Lahan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang melalui Bidang Penataan Ruang sehingga masyarakat tertib dalam melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, sehingga hal ini berdampak signifikan dalam pencapaian realisasi kinerja untuk indikator Persentase ketaatan terhadap RTRW. Selain itu juga dikarenakan sampai pada tahun 2023 belum ada perubahan dari perencanaan ruang terhadap pemanfaatan ruang yang ada di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tetap sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten yang telah ditetapkan, sebab dokumen Rancangan RTRW masih sementara dalam proses penyusunan.

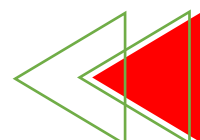




Foto-Foto Pelaksanaan kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang



Foto 6.
Kegiatan Survey, Pemetaan dan
Pengendalian Pemanfaatan Ruang
dalam rangka peningkatan
Kepatuhan Terhadap RTRW



Foto 7. Rapat Koordinasi Penataan Ruang tentang Revisi Perda
RTRW Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun
Anggaran 2021-2032

